

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Jakarta Islamic Index Yang Terdaftar Di Bursa Efek

Indonesia.

1. Jakarta Islamic Index (JII)

Kinerja perdagangan saham-saham syariah di Bursa Efek Indonesia diwakili oleh saham-saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII). Index ini diperkenalkan oleh Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Danareksa Investment Management (DIM) pada 3 Juli 2000.

Jakarta Islamic Index adalah indeks saham yang didasarkan atas prinsip syariah. Saham dalam JII terdiri atas 30 perusahaan yang keanggotaannya akan terus ditinjau secara berkala berdasarkan kinerja transaksi di perdagangan bursa, rasio-rasio keuangannya, dan ketaatannya pada prinsip-prinsip syariah sebagaimana termaktub dalam fatwa Dewan Syariah Nasional no. 05/DSN-MU/IV/2000 tentang jual beli saham dan fatwa no. 40/DSN-MUI/IX/2003 tentang pasar modal, serta pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di di bidang pasar modal. Saham yang dapat masuk ke dalam saham syariah harus memenuhi syarat yang disebutkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

No: 20/DSN-MUI/IX/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksadana Syariah.¹

Populasi penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) di Bursa Efek Indonesia yakni terdiri dari 30 perusahaan efek syariah yaitu:

Tabel 4.1 DAFTAR PERUSAHAAN JAKARTA ISLAMIC INDEX PERIODE JUNI-NOVEMBER 2015

No	Kode Saham	Nama Saham
1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk
2	ADRO	Adaro Energy Tbk
3	AKRA	AKR Corporindo Tbk
4	ASII	Astra International Tbk
5	ASRI	Alam Sutera Realty Tbk
6	BSDE	bumi Serpong Damai Tbk
7	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
8	INCO	Vale Indonesia Tbk
9	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk
10	INTP	Indocement Tunggul Prakasa Tbk
11	ITMG	Indo Tambang Raya Megah Tbk
12	JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk
13	KLBF	Kalbe Farma Tbk
14	LPKR	Lippo Karawaci Tbk
15	LPPF	Matahari Department Store Tbk
16	LSIP	PP London Sumatra Plantation Tbk
17	MPPA	Matahari Putra Prima Tbk
18	PGAS	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk
19	PTPP	PP (Persero) Tbk
20	PWON	Pakuwon Jati Tbk
21	SCMA	Surya Citra Media Tbk
22	SILO	Siloam International Hospitals Tbk
23	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk

¹Adiwarman A. Karim, *Bursa Efek & Investasi Syariah* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2009), hlm. 260

24	SMRA	Summarecon Agung Tbk
25	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk
26	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk
27	UNTR	United Tractors Tbk
28	UNVR	Unilever Indonesia Tbk
29	WIKA	Wijaya Karta (Persero) Tbk
30	WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk

Sumber: <http://www.idx.co.id>

2. Profil Perusahaan Populasi Penelitian Di Jakarta Islamic Index (JII)

Adapun profil seluruh perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) adalah sebagai berikut:²

1) PT. Astra Agro Lestari Tbk

PT. Astra Agro Lestari Tbk didirikan dengan nama PT. Suryaraya Cakrawala berdasarkan Akta Notaris Ny. Rukmasanti Hardjasatya, S.H., No. 12 tanggal 3 Oktober 1988, yang kemudian berubah menjadi PT Astra Agro Niaga berdasarkan Akta perubahan No. 9 tanggal 4 Agustus 1989 dari notaris yang sama. Akta pendirian Perusahaan dan perubahannya disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-10099.HT.01.01.TH.89 tanggal 31 Oktober 1989 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 101 tanggal 19 Desember 1989.

Pada tanggal 30 Juni 1997, Perusahaan melakukan penggabungan usaha dengan PT. Suryaraya Bahtera melalui perjanjian penggabungan usaha yang diaktakan dengan Akta Notaris Benny Kristianto, S.H., No. 126 tanggal 19 Juni

²Laporan keuangan Perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index (JII).

1997 beserta perubahannya No. 176 tanggal 30 Juni 1997. Penggabungan usaha ini dicatat dengan metode penyatuan kepemilikan (*pooling of interest*). Setelah penggabungan usaha ini, nama Perusahaan diubah menjadi PT. Astra Agro Lestari dan meningkatkan modal dasar dari Rp 250 miliar menjadi Rp 2 triliun yang terdiri dari 4 miliar saham dengan nilai nominal Rp 500 (Rupiah penuh). Perubahan nama dan peningkatan modal dasar Perusahaan ini diaktakan dengan Akta Notaris Benny Kristianto, S.H., No. 136 tanggal 23 Juni 1997 dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-5992.HT.01.04.TH.97 tanggal 2 Juli 1997 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 27 Nopember 1997.

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan guna memenuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di pasar modal, termasuk perubahan nama Perusahaan menjadi PT. Astra Agro Lestari Tbk, dan persetujuan para pemegang saham atas penawaran umum saham Perusahaan kepada masyarakat sebanyak 125,8 juta saham, diaktakan dengan Akta Notaris Benny Kristianto, S.H., No. 65 tanggal 11 Agustus 1997. Perubahan Anggaran Dasar tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-8271.HT.01.04.TH.97 tanggal 21 Agustus 1997 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 95 tanggal 27 Nopember 1997, Tambahan No. 5617.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan untuk memenuhi Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diaktakan dengan Akta Notaris Benny Kristianto, S.H., No.83 tanggal

20 Juni 2008 dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-46707.AH.01.02 Tahun 2008, tanggal 31 Juli 2008 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 21 tanggal 13 Maret 2009.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah perkebunan, perdagangan umum, perindustrian, pengangkutan, konsultan dan jasa. Kantor pusat Perusahaan dan entitas anak (“Grup”) berlokasi di Jalan Pulo Ayang Raya Blok OR no. 1, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta. Perkebunan kelapa sawit dan pabrik Perusahaan berlokasi di Kalimantan Selatan. Perkebunan dan pabrik pengolahan entitas anak berlokasi di pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Perusahaan mulai beroperasi komersial pada tahun 1995. Berdasarkan surat BAPEPAM No. S-2708/PM/1997 tanggal 21 Nopember 1997, penawaran umum perdana saham biasa Perusahaan kepada masyarakat sebanyak 125,8 juta saham dengan nilai nominal Rp 500 (Rupiah penuh) per saham dengan harga penawaran sebesar Rp 1.550 (Rupiah penuh) per saham, telah menjadi efektif. Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham tanggal 10 Mei 1999, disetujui untuk mengeluarkan saham bonus sebanyak 251,6 juta saham. Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham tanggal 10 Mei 2000, disetujui untuk memberikan hak opsi kepada karyawan Grup yang memenuhi syarat untuk membeli saham baru sebanyak 75,48 juta saham. Perusahaan telah mencatatkan seluruh sahamnya di Bursa Efek Indonesia.

2) **PT. Adaro Energy Tbk**

PT. Adaro Energy Tbk didirikan berdasarkan Akta Notaris Sukawaty Sumadi, S.H., Notaris di Jakarta, No. 25, tertanggal 28 Juli 2004. Akta pendirian Perusahaan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 59, tertanggal 25 Juli 2006, Tambahan Berita Negara No. 8036 dan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C-21493 HT.01.01.TH.2004 tertanggal 26 Agustus 2004. Anggaran Dasar Perusahaan telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., No. 36 tertanggal 6 Juli 2015 untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perusahaan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tertanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014, tertanggal 8 Desember 2014, tentang Dewan Direksi dan Komisaris Perusahaan Publik. Perubahan Anggaran Dasar ini telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0953799, tertanggal 3 Agustus 2015.

Pada bulan Juli 2008, Perusahaan melakukan Penawaran Umum Saham Perdana sebanyak 11.139.331.000 lembar saham (34,8% dari 31.985.962.000 modal saham yang ditempatkan dan disetor penuh). Penawaran kepada masyarakat tersebut dicatat di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 16 Juli 2008.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar, Perusahaan bergerak dalam bidang usaha perdagangan, jasa, industri, pengangkutan batubara, perbengkelan, pertambangan, dan konstruksi. Entitas anak bergerak dalam bidang usaha pertambangan batubara, perdagangan batubara, jasa kontraktor penambangan, infrastruktur, logistik batubara, dan pembangkitan listrik. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada bulan Juli 2005. Perusahaan berdomisili di Jakarta dan berlokasi di Gedung Menara Karya, lantai 23, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2, Jakarta Selatan.

3) PT. AKR Corporindo Tbk

PT. AKR Corporindo Tbk didirikan di Surabaya berdasarkan Akta Notaris Sastra Kosasih, S.H., No. 46 tanggal 28 November 1977 yang diubah dengan Akta Notaris No. 26 oleh notaris yang sama tanggal 12 April 1978. Akta pendirian dan perubahannya telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/151/7 tanggal 14 Juni 1978, didaftarkan pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam Surat No. 277/1978 dan No. 278/1978 tanggal 20 Juli 1978 serta diumumkan dalam lembaran Berita Negara No. 101 Tambahan No. 741 tanggal 19 Desember 1978. Pada tahun 1985, Perusahaan memindahkan kantor pusatnya ke lokasinya pada saat ini di Jakarta. Pada tahun 2004, Perusahaan mengganti namanya dari PT. Aneka Kimia Raya Tbk menjadi PT. AKR Corporindo Tbk. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu yang mana perubahan terakhir dicakup dalam Akta Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn No. 1 tanggal 5 Mei 2015 mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari 3.913.637.674 lembar

saham menjadi 3.939.712.574 lembar saham atau kenaikan sebesar 26.074.900 lembar saham sebagai hasil pelaksanaan opsi saham di bulan April 2015 dari Program Kompensasi Manajemen Berbasis Saham (MSOP) - MSOP 2011 Tahap I dan II dan MSOP 2014 Perusahaan.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan antara lain meliputi bidang industri barang kimia, perdagangan umum dan distribusi terutama bahan kimia dan bahan bakar minyak (BBM) dan gas, menjalankan usaha dalam bidang logistik, pengangkutan (termasuk untuk pemakaian sendiri dan mengoperasikan transportasi baik melalui darat maupun laut serta pengoperasian pipa penunjang angkutan laut), penyewaan gudang dan tangki, termasuk perbengkelan, ekspedisi dan pengemasan, melakukan pengembangan usaha melalui pengelolaan aset sendiri maupun pihak lain baik secara langsung maupun melalui penyertaan (investasi) atau pelepasan (divestasi) modal dalam perusahaan lain, menjalankan usaha dan bertindak sebagai perwakilan dan/atau peragenan dari perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri, kontraktor bangunan dan jasa lainnya kecuali jasa di bidang hukum.

Perusahaan saat ini bergerak dalam bidang distribusi produk bahan bakar minyak (BBM) ke pasar industri, distribusi dan perdagangan bahan kimia (seperti *caustic soda*, sodium sulfat, PVC resin dan *soda ash*) yang digunakan oleh berbagai industri di Indonesia sesuai dengan perjanjian distribusi dengan produsen asing dan lokal, penyewaan gudang, kendaraan angkutan, tangki dan jasa logistic lainnya.

Perusahaan memulai kegiatan usaha komersialnya pada bulan Juni 1978. Perusahaan berdomisili di Wisma AKR, Lantai 8, Jl. Panjang No. 5, Kebon Jeruk, Jakarta. Kantor cabang utama Perusahaan berlokasi di Jl. Sumatra No. 51-53, Surabaya. Kantor penjualan lainnya sekaligus terminal tangki berlokasi di Medan, Palembang, Lampung, Ciwandan (Banten), Bandung, Semarang, Pontianak, Balikpapan, Banjarmasin, Stagen (Kalimantan Selatan), Manado dan Bali. Perusahaan juga memiliki kantor perwakilan di Guigang, China.

Pada bulan September 1994, Perusahaan telah melakukan penawaran umum perdana sebanyak 15.000.000 lembar saham dengan harga penawaran sebesar Rp4.000 (dalam Rupiah penuh) per saham. Selanjutnya, pada bulan yang sama, seluruh saham Perusahaan sebanyak 65.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 (dalam Rupiah penuh) per saham telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

4) PT. Astra International Tbk

PT. Astra International Tbk (“Perseroan”) didirikan pada tahun 1957 dengan nama PT. Astra International Incorporated. Pada tahun 1990, Perseroan mengubah namanya menjadi PT Astra International Tbk. Perseroan berdomisili di Jakarta, Indonesia, dengan kantor pusat di Jl. Gaya Motor Raya No. 8, Sunter II, Jakarta. Ruang lingkup kegiatan Perseroan seperti yang tertuang dalam Anggaran Dasarnya adalah perdagangan umum, perindustrian, pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan, jasa dan konsultan. Ruang lingkup kegiatan utama entitas anak, ventura bersama dan entitas asosiasi meliputi

perakitan dan penyaluran mobil, sepeda motor berikut suku cadangnya, penjualan dan penyewaan alat berat, pertambangan dan jasa terkait, pengembangan perkebunan, jasa keuangan, infrastruktur dan teknologi informasi. Seluruh saham Perseroan telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

5) PT. Alam Sutera Realty Tbk

PT. Alam Sutera Realty Tbk didirikan berdasarkan akta notaris Ny. Erly Soebandjojo SH., No. 15 tanggal 3 November 1993. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan akta No. 256 tanggal 10 November 1997 oleh Erly Soehandjojo SH., notaris di Jakarta. Perubahan anggaran dasar ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat Keputusan No. C2-4967.HT.01.04-TH. 1998 tanggal 12 Mei 1998. Berdasarkan akta notaris Misahardi Wilamarta SH., No. 94 tanggal 23 April 2007, modal dasar Perusahaan ditingkatkan dari Rp 20 milyar menjadi Rp 250 milyar. Perubahan anggaran dasar ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. W7-05242.HT.01.04-TH.2007 tanggal 8 Mei 2007. Berdasarkan akta No-111 tanggal 23 Agustus 2007 yang dibuat oleh notaris Misahardi Wilamarta SH., Perusahaan telah meningkatkan modal dasarnya dari Rp. 250 milyar menjadi Rp. 2.400 milyar dan mengubah nama perusahaan dari PT Adhihutama Manunggal menjadi PT Alam Sutera Realty dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan No. W7.09419.HT.01.04-TH. 2007 tanggal 27 Agustus 2007.

Berdasarkan akta notaris Misahardi Wilamarta SH., No. 162 tanggal 29 Agustus 2007 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. W7-09583.HT.01.04-TH.2007 tanggal 30 Agustus 2007, maksud dan tujuan didirikan Perusahaan adalah berusaha dalam bidang pembangunan dan pengelolaan perumahan.

Berdasarkan akta notaris Misahardi Wilamarta, SH., No. 71 tanggal 19 september 2007 tentang risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan, disetujui untuk : mengubah status Perusahaan dari Perusahaan tertutup menjadi Perusahaan Terbuka, mengubah nilai nominal saham dari Rp 1.000 per saham menjadi Rp 100 per saham, menyetujui Perusahaan melakukan penawaran umum perdana kepada masyarakat di Indonesia, menyetujui memberikan kuasa kepada direksi Perusahaan untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor perusahaan setelah penawaran umum dilaksanakan, menyetujui perubahan anggaran dasar perusahaan disesuaikan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan pelaksanaanya dalam rangka menjadi perseroan Terbuka.

Sehubungan dengan hal ini tersebut di atas, maka perusahaan menjadi bernama PT Alam Sutera Realty Tbk, dengan maksud dan tujuan perusahaan adalah bergerak dalam bidang pembangunan dan pengelolaan perumahan. Modal dasar perusahaan berjumlah Rp2.400.000.000 riu yang terbagi atas 24.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100 per saham (Rupiah penuh).

Perusahaan dan entitas anak (bersama-sama disebut “Grup” berkedudukan di Wisma Argo Manunggal, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 22 Jakarta dan mempunyai proyek real estat yang berkedudukan di Kecamatan Serpong, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan dan Kecamatan Kuta Selatan, Bandung, Bali serta memiliki tanah untuk dikemangkan yang terletak di Kecamatan Pinang, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang Provinsi Jawa Barat, di Kecamatan Tanjung Pinang, Provinsi Riau serta Kecamatan Denpasar Selatan dan Bandung, Bali.

Perusahaan mulai melakukan kegiatan operasional dengan pembelian tanah dalam tahun 1999. Proyek real estat utama yang dimiliki oleh perusahaan dan entitas anak pada saat ini adalah proyek Kawasan Alam Sutera di Serpong dan proyek Suvarna Padi dan Suvarna Sutera di Pasar kemis, Tangerang. Pemegang saham utama dan pengendali grup adalah keluarga The Ning King.

6) PT. Bumi Serpong Damai Tbk

PT. Bumi Serpong Damai Tbk (perusahaan) didirikan pada tanggal 16 Januari 1984 berdasarkan Akta No. 50 dari Benny Kristianto, S.H. notaris di Jakarta. Akta pendirian perusahaan tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui surat keputusan No. C2-5710.HT.01.TH.85 tanggal 10 September 1985. Anggaran dasar perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir dengan akta No. 28 tanggal 28 Desember 2010 dari Charlon Situmeang, S.H., sebagai pengganti dari P. Sutrisno A. Tampubolon, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta. Berdasarkan rapat umum

pemegang saham luar biasa pada tanggal 19 November 2010 mengenai peningkatan modal dasar dan pernyataan kembali modal ditempatkan dan disetor perusahaan. Perubahan ini telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-03029.AH.01.02 Tahun 2011 tanggal 19 Januari 2011 dan diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia No. 57 tanggal 17 Juli 2012.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar, maksud dan tujuan perusahaan adalah berusaha dalam bidang pemangunan kota aru sebagai wilayah pemukiman yang terencana dan terpadu yang dilengkapi dengan prasarana-prasarana, fasilitas lingkungan dan penghijauan dengan nama BSD City.

Kantor perusahaan terletak di Sinar Mas Land Plaza. BSD Green Office Park, Tangerang. Proyek real estat perusahaan berupa Perumahan umi Serpong Damai yang berlokasi di Provinsi Banten. Perusahaan mulai beroperasi komersial pada tahun 1989.

Perusahaan dan entitas anak(selanjutnya disebut grup) didirikan dan menjalankan usahanya di Indonesia. Grup termasuk dalam kelompok usaha PT. Paraga Artamida.

7) PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk

PT. Indofood Sukses Makmur Tbk (Perusahaan) didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1990 dengan nama PT. Panganjaya Intikusuma, berdasarkan Akta Notaris Benny Kristianto, S.H., No. 228. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat

Keputusan No. C2 2915.HT.01.01.Th'91 tanggal 12 Juli 1991, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12 Tambahan No. 611 tanggal 11 Februari 1992. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir dimuat dalam Akta Notaris Kumala Tjahjani Widodo, S.H. No. 22 tanggal 8 Mei 2015 dan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU - 0936677.AH.01.02. Tahun 2015 tanggal 5 Juni 2015. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia masih dalam proses

Ruang lingkup kegiatan Perusahaan antara lain terdiri dari mendirikan dan menjalankan industri makanan olahan, bumbu penyedap, minuman ringan, kemasan, minyak goreng, penggilingan biji gandum dan pembuatan tekstil karung terigu.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 27, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76 – 78, Jakarta, Indonesia, sedangkan pabrik dan perkebunan Perusahaan dan Entitas Anak berlokasi di berbagai tempat di pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Malaysia. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1990.

8) PT. Vale Indonesia Tbk

PT. Vale Indonesia Tbk, (“Perseroan”) didirikan pada tanggal 25 Juli 1968 dengan akta No. 49 tanggal 25 Juli 1968, yang dibuat dihadapan Eliza Pondaag,

notaris publik di Jakarta. Anggaran Dasar Perseroan disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. J.A.5/59/18 tanggal 26 Juli 1968 dan diumumkan dalam Tambahan No. 93, Berita Negara Republik Indonesia No. 62 tanggal 2 Agustus 1968. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan yang terakhir diubah dengan akta No.121 tanggal 29 Juni 2015, yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti S.H., notaris publik di Jakarta tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada tanggal 29 Juni 2015. Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0938647.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 3 Juli 2015 dan telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.AHU-AH.01.03-0948078 Tahun 2015 tanggal 3 Juli 2015. Sekitar 58,73% saham Perseroan dimiliki oleh Vale Canada Limited, sekitar 20,49% oleh masyarakat melalui Bursa Efek Indonesia, sekitar 20,09% oleh Sumitomo Metal Mining Co., Ltd., dan oleh lainnya sekitar 0,69%

Entitas induk langsung Perseroan adalah Vale Canada Limited dan entitas pengendali utama adalah Vale S.A., sebuah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Republik Federal Brasil. Pabrik Perseroan berlokasi di Sorowako, Sulawesi Selatan dan kantor yang terdaftar berlokasi di Plaza Bapindo, Citibank Tower, Lt. 22, Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55, Jakarta.

Kewenangan operasi Perseroan awalnya didasarkan atas Kontrak Karya yang ditandatangani pada 27 Juli 1968 ("Kontrak Karya 1968") oleh Pemerintah

Republik Indonesia (“Pemerintah”) dan Perseroan, yang memberikan hak kepada Perseroan untuk mengembangkan dan mengoperasikan proyek nikel dan mineral-mineral tertentu lainnya di daerah yang sudah ditentukan di pulau Sulawesi. Kontrak Karya 1968 berakhir pada tanggal 31 Maret 2008. Pada tanggal 15 Januari 1996, Perseroan dan Pemerintah menandatangani Persetujuan Perubahan dan Perpanjangan Kontrak Karya 1968 (“KK 1996”), yang memperbaharui operasi Perseroan sampai tahun 2025.

Pada 17 Oktober 2014, Pemerintah dan Perseroan kembali menandatangani amandemen Kontrak Karya 1996 sebagai hasil kesepakatan renegotiasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pertambangan 2009 (“KK 2014”). Perubahan-perubahan dalam KK 2014 utamanya berfokus kepada enam butir strategis sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah: (1) luas wilayah Kontrak Karya; (2) keberlanjutan operasi usaha; (3) penerimaan negara; (4) kewajiban pengolahan dan pemurnian di dalam negeri; (5) kewajiban divestasi; dan (6) kewajiban pengutamakan penggunaan tenaga kerja, barang dan jasa dalam negeri.

KK 2014 yang telah ditandatangani telah mengamankan strategi bisnis Perseroan masa mendatang; KK 2014 memberikan kepastian investasi sehubungan dan hak dan kewajiban Perseroan. Berdasarkan ketentuan KK 2014, Kontrak Karya Perseroan akan berakhir pada tahun 2025 dan Perseroan dapat mengajukan untuk melanjutkan operasinya dalam bentuk izin usaha untuk jangka waktu perpanjangan dua kali sepuluh tahun, setelah memperoleh persetujuan dari Pemerintah.

KK 2014 mengatur secara rinci mengenai wilayah (Perseroan setuju untuk mengurangi wilayah kontraknya dari 190.510 hektar menjadi 118.435 hektar), peningkatan kewajiban divestasi dan tarif royalti 2% atau 3% yang dikaitkan dengan harga pasar nikel.

Selain itu, KK 2014 juga mengatur mengenai komitmen Perseroan untuk mengutamakan penggunaan tenaga kerja, barang dan jasa dalam negeri, serta mengenai komitmen investasi yang sejalan dengan strategi pertumbuhan Perseroan. Dengan ditandatanganinya KK 2014, kesanggupan Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam KK 1996 telah digantikan dengan komitmen investasi baru di Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara

9) PT. Indofood Sukses Makmur Tbk

PT. Indofood Sukses Makmur Tbk (Perusahaan) didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1990 dengan nama PT. Panganjaya Intikusuma, berdasarkan Akta Notaris Benny Kristianto, S.H., No. 228. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2 2915.HT.01.01.Th'91 tanggal 12 Juli 1991, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 12 Tambahan No. 611 tanggal 11 Februari 1992.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir dimuat dalam Akta Notaris Kumala Tjahjani Widodo, S.H. No. 22 tanggal 8 Mei 2015 dan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU - 0936677.AH.01.02. Tahun 2015 tanggal 5 Juni 2015. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia masih dalam proses.

Ruang lingkup kegiatan Perusahaan antara lain terdiri dari mendirikan dan menjalankan industri makanan olahan, bumbu penyedap, minuman ringan, kemasan, minyak goreng, penggilingan biji gandum dan pembuatan tekstil karung terigu. Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Sudirman Plaza, Indofood Tower, Lantai 27, Jl. Jend. Sudirman Kav. 76 – 78, Jakarta, Indonesia, sedangkan pabrik dan perkebunan Perusahaan dan Entitas Anak berlokasi di berbagai tempat di pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Malaysia. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1990.

10) PT. Indocement Tunggul Prakarsa Tbk

PT. Indocement Tunggul Prakarsa Tbk (“Perusahaan”) didirikan di Indonesia pada tanggal 16 Januari 1985 berdasarkan akta notaris Ridwan Suselo, S.H. No. 227. Akta pendirian tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-2876HT.01.01.Th.85 tanggal 17 Mei 1985, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 57, Tambahan No. 946 tanggal 16 Juli 1985. Anggaran dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, perubahan terakhir dengan akta notaris Deni Thanur, S.E., S.H., M.Kn. No. 19 tanggal 11 Juni 2015 antara lain mengenai perubahan Anggaran Dasar untuk menyesuaikan dengan peraturan Otoritas Jasa

Keuangan (“OJK”). Perubahan tersebut telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum No. AHU-0937768.AH.01.02. Tahun 2015 tanggal 22 Juni 2015.

Perusahaan memulai operasi komersialnya pada tahun 1985. Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan, antara lain, pabrikasi semen dan bahan-bahan bangunan, pertambangan, konstruksi dan perdagangan. Saat ini, Perusahaan dan entitas anaknya (selanjutnya disebut “Kelompok Usaha”) bergerak dalam beberapa bidang usaha yang meliputi pabrikasi dan penjualan semen (sebagai usaha inti) dan beton siap pakai, serta tambang agregat dan trass.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Wisma Indocement Lantai 8, Jl. Jend. Sudirman Kav. 70-71, Jakarta. Pabriknya berlokasi di Citeureup - Jawa Barat, Palimanan - Jawa Barat, dan Tarjun - Kalimantan Selatan. HeidelbergCement AG adalah entitas induk terakhir Kelompok Usaha.

Usaha semen mencakup operasi dari dua belas (12) pabrik Perusahaan yang berlokasi di tiga lokasi berbeda, yaitu: sembilan pabrik semen terpadu di Citeureup - Bogor, dua pabrik semen terpadu di Palimanan - Cirebon dan satu pabrik semen terpadu di Tarjun - Kalimantan Selatan. Usaha pabrikasi beton siap pakai, distribusi semen, dan tambang agregat meliputi sebagian besar operasi Entitas Anak.

11) PT. Indo TambangRaya Megah Tbk.

PT. Indo Tambangraya Megah Tbk didirikan dengan Akta Notaris Benny Kristianto, S.H., No. 13 tertanggal 2 September 1987 yang disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-640.HT.01.01.TH'89 tertanggal 20 Januari 1989. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan terakhir dilakukan berdasarkan Akta Notaris KumalaTjahjani Widodo, SH., MH., Mkn., notaris di Jakarta, No. 96 tertanggal 28 April 2015 terkait dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perusahaan dengan Peraturan No. 32/POJK.04/2014, No. 33/POJK.04/2014 dan No. 38/POJK.04/2014 dan sekaligus menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0935406.AH.01.02.Tahun 2015 tertanggal 19 Mei 2015.

Pada tanggal 18 Desember 2007, Perusahaan melakukan Penawaran Umum Perdana sebanyak 225.985.000 lembar saham yang merupakan 20% dari 1.129.925.000 lembar saham yang ditempatkan dan disetor penuh. Saham-saham dalam penawaran umum perdana tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Desember 2007.

Berdasarkan Akta Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH., No.21 tertanggal 5 April 2013 yang disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-20268.AH.01.01.Tahun 2013 tertanggal 16 April 2013, Perusahaan mendirikan

entitas anak usaha baru yang bernama PT ITM Indonesia. Bidang usaha utama entitas ini adalah perdagangan batu bara.

Berdasarkan Akta Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH., No.36 tertanggal 11 September 2013 yang disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.AHU-49454.AH.01.01.Tahun 2013 tertanggal 23 September 2013, Perusahaan mendirikan entitas anak usaha baru yang bernama PT. Tambang Raya Usaha Tama. Bidang usaha utama entitas ini adalah jasa penunjang kegiatan pertambangan.

Berdasarkan Akta Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH., No.22 tertanggal 13 Agustus 2014 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.AHU-21506.40.10.2014 tertanggal 21 Agustus 2014, Perusahaan mendirikan entitas anak usaha baru yang bernama PT ITM Batubara Utama yang direncanakan bergerak di bidang pertambangan.

Berdasarkan Akta Notaris Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH., No.23 tertanggal 13 Agustus 2014 yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No.AHU-21507.40.10.2014 tertanggal 21 Agustus 2014, Perusahaan mendirikan entitas anak usaha baru yang bernama PT ITM Energi Utama yang direncanakan bergerak di bidang energi dan penunjang ketenagalistrikan. Bidang usaha utama Perusahaan adalah bidang pertambangan dengan melakukan investasi pada entitas anak dan jasa pemasaran untuk pihak-pihak berelasi. Entitas anak usaha yang

dimilikinya bergerak dalam industry pertambangan batubara dan jasa pertambangan, perdagangan dan energy ketenagalistrikan.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jakarta. Dalam laporan keuangan interim konsolidasian ini, Perusahaan dan entitas anak secara bersama-sama disebut sebagai “Grup”. Entitas pengendali utama Grup adalah Banpu Public Company Limited, sebuah perusahaan yang didirikan di Kerajaan Thailand. Entitas induk langsung Perusahaan adalah Banpu Minerals (Singapore) Pte. Ltd., yang didirikan dan berdomisili di Singapura.

12) PT. Jasa Marga (Persero) Tbk

Perusahaan dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 1978 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia mengenai pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang pengelolaan, pemeliharaan dan pengadaan jaringan jalan tol, serta ketentuan-ketentuan pengusahaannya (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 1978 juncto Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 90/KMK.06/1978 tentang Penetapan Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga, tanggal 27 Pebruari 1978).

Perusahaan didirikan berdasarkan Akta No. 1, tanggal 1 Maret 1978 dari Notaris Kartini Mulyadi, S.H., dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. Y.A.5/130/1, tanggal 22 Pebruari 1982 dan didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta No. 766 dan No. 767, tanggal 2 Maret 1982

serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 73, tanggal 10 September 1982, tambahan No. 1138.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali diubah, dengan perubahan terakhir berdasarkan akta notaris Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 95 tanggal 21 Juni 2012 dari Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., sehubungan dengan perubahan ketentuan anggaran dasar Perusahaan. Akta perubahan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU AH.01.10-25313 tanggal 10 Juli 2012.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perusahaan adalah turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan di bidang pengusaha jalan tol dengan sarana penunjangnya dengan menerapkan prinsip-prinsip perusahaan terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a) Melakukan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan/atau pemeliharaan jalan tol;
- b) Mengusahakan lahan di ruang milik jalan tol (Rumijatol) dan lahan yang berbatasan dengan Rumijatol untuk tempat istirahat dan pelayanan berikut dengan fasilitas-fasilitasnya dan usaha lainnya, baik diusahakan sendiri maupun bekerja sama dengan pihak lain;
- c) Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka pemanfaatan dan pengembangan sumber daya yang dimiliki Perusahaan, baik secara langsung

maupun melalui penyertaan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial sejak tahun 1978. Perusahaan menjalankan kegiatan operasionalnya berdasarkan UU No. 38 tahun 2004 tentang Jalan dan PP No. 15 tahun 2005 tentang Jalan Tol: Wewenang penyelenggaraan jalan tol berada pada Pemerintah. Sebagian wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan tol dilaksanakan oleh Badan Pengatur Jalan Tol. Pengusahaan jalan tol dilakukan oleh badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik swasta. Pengusahaan jalan tol yang diberikan oleh Pemerintah kepada badan usaha dilakukan melalui pelelangan secara transparan dan terbuka. Perusahaan berdomisili di Jakarta dan pada saat ini mengoperasikan 26 ruas jalan tol yang dikelola oleh sembilan kantor cabang dan Entitas Anak

13) PT. Kalbe Farma Tbk.

PT. Kalbe Farma Tbk. (“Perusahaan”) didirikan di Negara Republik Indonesia, dalam rangka Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri No. 6 Tahun 1968 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1970, berdasarkan Akta Notaris Raden Imam Soesetyo Prawirokoesoemo No. 3 pada tanggal 10 September 1966. Akta pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. J.A.5/72/23 tanggal 12 September 1967 dan diumumkan dalam Tambahan No. 234, Berita Negara Republik Indonesia No. 102 pada tanggal 22 Desember 1967. Anggaran dasar

Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris DR. Irawan Soerodjo, S.H., Msi., No. 131, tanggal 18 Mei 2015, mengenai persetujuan dan perubahan anggaran dasar Perusahaan. Perubahan terakhir ini telah dicatatkan pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat keputusan No. AHU - AH.01.03 – 0939509 tanggal 10 Juni 2015.

Seperti yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi, antara lain usaha dalam bidang farmasi, perdagangan dan perwakilan. Saat ini, Perusahaan terutama bergerak dalam bidang pengembangan, pembuatan dan perdagangan sediaan farmasi termasuk obat dan produk konsumsi kesehatan. Perusahaan memulai operasi komersial pada tahun 1966.

Perusahaan berkedudukan di Jakarta, dimana kantor pusat berada di Gedung KALBE, Jl. Let. Jend. Suprpto Kav. 4, Cempaka Putih, Jakarta 10510 sedangkan fasilitas pabriknya berlokasi di Kawasan Industri Delta Silicon, Jl. M.H. Thamrin, Blok A3-1, Lippo Cikarang, Bekasi, Jawa Barat

14) PT. Lippo Karawaci Tbk.

PT. Lippo Karawaci Tbk (Perusahaan) didirikan dengan nama PT Tunggal Reksakencana pada tanggal 15 Oktober 1990 berdasarkan Akta Pendirian No. 233 yang dibuat di hadapan Misahardi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C2 6974.HT.01.01.TH.91 tanggal 22 Nopember 1991 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 62, Tambahan No. 3593

tanggal 4 Agustus 1992. Anggaran dasar Perusahaan telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Pernyataan Sebagian Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 30 tanggal 3 Juli 2015 yang dibuat di hadapan Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, mengenai persetujuan untuk mengubah dan menyusun kembali Anggaran Dasar Perusahaan. Perubahan ini telah dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No.AHU-AH.01.03.0951738 tanggal 15 Juli 2015 dan penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroaan No.AHU-AH.01.03.0951739 tanggal 15 Juli 2015.

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan adalah dalam bidang real estat, pengembangan perkotaan (*urban development*), pembebasan/pembelian, pengolahan, pematangan, pengurugan dan penggalian tanah; membangun sarana dan prasarana/infrastruktur; merencanakan, membangun, menyewakan, menjual, dan mengusahakan gedung-gedung, perumahan, perkantoran, perindustrian, perhotelan, rumah sakit, pusat perbelanjaan, pusat sarana olah raga dan sarana penunjang, termasuk tetapi tidak terbatas pada lapangan golf, klub-klub, restoran, tempat-tempat hiburan lain, laboratorium medik, apotek beserta fasilitasnya baik secara langsung maupun melalui penyertaan (investasi) ataupun pelepasan (divestasi) modal; menyediakan pengelolaan kawasan siap bangun, membangun jaringan prasarana lingkungan dan pengelolaannya, membangun dan mengelola fasilitas umum, serta jasa akomodasi, menjalankan usaha di bidang jasa antara lain

transportasi, jasa keamanan berikut jasa penunjang lainnya kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1993. Sampai dengan tanggal pelaporan, kegiatan utama Perusahaan adalah dalam bidang *Urban Development, Large Scale Integrated Development, Retail Malls, Healthcare, Hospitality and Infrastructure*, dan *Property and Portfolio Management*. Area kerja Perusahaan dan entitas anak (Grup) meliputi Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan beberapa entitas anak yang berdomisili di Singapura, Malaysia, British Virgin Island, Vanuatu, dan Seychelles. Perusahaan berkantor di Jl. Boulevard Palem Raya No. 7, Menara Matahari Lantai 22-23, Lippo Karawaci Central, Tangerang 15811, Banten - Indonesia. Perusahaan adalah salah satu perusahaan yang tergabung dalam kelompok usaha Lippo Grup.

15) PT. Matahari Department Store Tbk.

PT. Matahari Department Store Tbk didirikan dengan nama PT Stephens Utama International Leasing Corp berdasarkan Akta Notaris Misahardi Wilamarta, S.H., No. 2 tanggal 1 April 1982. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-2611-HT.01.01.TH.82 tanggal 18 November 1982 serta diumumkan dalam berita Negara No. 4 tanggal 14 Januari 1983, tambahan berita Negara No. 58.

Perusahaan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1982. Sejak tanggal 30 Oktober 2009, Perusahaan bergerak dalam usaha jaringan gerai serba

ada yang menyediakan berbagai macam barang seperti pakaian, aksesoris, tas, sepatu, kosmetik, dan peralatan rumah tangga serta jasa konsultan manajemen.

Kantor pusat operasional perusahaan berlokasi di Menara Matahari Lantai 15, Jl. Ulevar Palembang Raya No. 7, Lippo Karawaci Tangerang, Banten dan memiliki gerai-gerai yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia. Pada tanggal 30 September 2015, perusahaan mengoperasikan 140 gerai, perhitungan 140 gerai tersebut tidak termasuk King Plaza Bandung yang ditutup sementara akibat keakaran.

16) PT. Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk.

PT. Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk didirikan di Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris Raden Kadiman No. 93 tanggal 18 Desember 1962 yang diubah dengan Akta No. 20 tanggal 9 September 1963. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. J.A5/121/20 tanggal 14 September 1963 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 8 Oktober 1963,

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan Akta Notaris Desman, S.H., M.Hum., M.M., No. 11 tanggal 5 Mei 2015 mengenai perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perusahaan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”). Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0936385.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 3 Juni 2015, telah diterima dalam Surat No. AHUAH. 01.03-0936685

tanggal 3 Juni 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3512371.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 3 Juni 2015.

Berdasarkan Akta Notaris Pahala Sutrisno Amijoyo Tampubolon, S.H., M.Kn., No. 18 tanggal 24 Mei 2013, pemegang saham Perusahaan menyetujui perubahan status Perusahaan dari perusahaan dengan fasilitas Penanaman Modal Asing (“PMA”) menjadi perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (“PMDN”).

Perusahaan memulai operasi komersialnya pada tahun 1963 dan bergerak di bidang usaha perkebunan yang berlokasi di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan dengan lahan yang ditanami seluas 113.194 hektar pada tanggal 30 September 2015 (31 Desember 2014: 112.490 hektar) (tidak diaudit). Produk utama adalah minyak kelapa sawit dan karet, serta kakao, teh, dan benih dalam kuantitas yang lebih kecil.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan kantor-kantor cabang operasional berlokasi di Medan, Palembang, Makassar, Surabaya, dan Samarinda. Kantor pusat Perusahaan beralamat di Prudential Tower Lantai 15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Setiabudi, Jakarta Selatan.

17) PT. Matahari Putra Prima Tbk.

PT. Matahari Putra Prima Tbk (perusahaan) didirikan di Negara republic Indonesia pada tanggal 11 Maret 1986 berdasarkan akta notaris udiarti Kamadi, S.H. No 30 tanggal 11 Maret 1986 dan telah mendapatkan pengesahan dari

Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Kutipan dari Daftar Keputusan Menteri Kehakiman tertanggal 26 Juli 1986 No. C2-5238.HT.01-01. Th.86, akta mana telah diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 10 September 1991, tambahan berita Negara Republik Indonesia No. 2954. Akta tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan telah disesuaikan berdasarkan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas sebagaimana termuat pada akta pernyataan keputusan rapat No. 39 tanggal 8 Agustus 2008 yang dibuat oleh notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No. AHU-88903.AH.01.02 Tahun 2008 tanggal 21 Nopember 2008 dan diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia No. 13 Februari 2009 dan tambahan berita Negara No. 4395. Anggaran dasar telah beberapa kali diubah, terakhir dengan akta pernyataan keputusan rapat yang dibuat oleh notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., No.61, penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan No. AHU-AH.01.03-0940762 dan surat keputusan Menkumham No. AHU-0937216.AH.01.02 Tahun 2015 yang semuanya tersebut diatas tertanggal 12 Juni 2015.

Perusahaan melakukan kegiatan utama usaha yaitu jaringan toko swalayan yang menyediakan berbagai macam barang seperti untuk kebutuhan sehari-hari. Kantor Pusat operasional perusahaan berada di Menara Matahari Lantai 17, Jl. Boulevard Palem Raya No. 7, Lippo Karawaci 1200-Tangerang, Banten. Perusahaan mulai beroperasi komersial pada tahun 1986.

Pada tanggal 30 September dan 2014, perusahaan mengoperasikan toko Hypermart, Foodmart dan Bosfon Health dan Beauty masing-masing di 285 dan 246 lokasi di Jakarta dan kota-kota lainnya di Indonesia.

Entitas induk langsung perusahaan adalah PT Multipolar Tbk, yang merupakan pemegang saham mayoritas perusahaan. Entitas induk terakhir perusahaan adalah Lanius Limited.

18) PT. Perusahaan Gas Negara Tbk.

PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (“Perusahaan”) pada awalnya bernama Firma L. J. N. Eindhoven & Co. Gravenhage yang didirikan pada tahun 1859. Kemudian, pada tahun 1950, pada saat diambil alih oleh Pemerintah Belanda, Perusahaan diberi nama NV. Netherland Indische Gaz Maatschapij (NV. NIGM). Pada tahun 1958, saat diambil alih oleh Pemerintah Republik Indonesia, nama Perusahaan diganti menjadi Badan Pengambil Alih Perusahaan- Perusahaan Listrik dan Gas (BP3LG) yang kemudian beralih status menjadi BPU-PLN pada tahun 1961. Pada tanggal 13 Mei 1965, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19/1965, Perusahaan ditetapkan sebagai perusahaan negara dan dikenal sebagai Perusahaan Negara Gas (PN. Gas). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1984, PN. Gas diubah menjadi perusahaan umum (“Perum”) dengan nama Perusahaan Umum Gas Negara.

Setelah itu, status Perusahaan diubah dari Perum menjadi perusahaan perseroan terbatas yang dimiliki oleh Negara (Persero) dan namanya berubah menjadi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah

No. 37 tahun 1994 dan Akta Pendirian Perusahaan No. 486 tanggal 30 Mei 1996 yang diaktakan oleh Notaris Adam Kasdarmaji, S.H. Akta pendirian telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-7729HT.01.01.Th.96. tanggal 31 Mei 1996 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 8508 Tambahan Berita Negara No. 80 tanggal 4 Oktober 1996.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1994, perusahaan bertujuan untuk melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya di bidang pengembangan pemanfaatan gas bumi untuk kepentingan umum serta penyediaan gas dalam jumlah dan mutu yang memadai untuk melayani kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, perusahaan dapat melaksanakan perencanaan, pembangunan, pengelolaan dan usaha hilir bidang gas bumi yang meliputi kegiatan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga, perencanaan, pembangunan, pengembangan produksi, penyediaan, penyaluran dan distribusi gas buatan; atau usaha lain yang menunjang usaha di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada saat ini, usaha utama Perusahaan adalah distribusi dan transmisi gas bumi ke pelanggan industri, komersial dan rumah tangga. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan selama sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2015, yang terakhir berdasarkan Akta Notaris No. 23 dan 24 dari Notaris Fathiah Helmi, S.H., tanggal 6 April 2015, masing-masing terkait perubahan Anggaran Dasar Perusahaan dan perubahan susunan Dewan

Komisaris. Perubahan ini telah dilaporkan dan diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia masing - masing dalam Surat Penerimaan No. AHU-AH.01.03-0928400 dan No. AHU-AH.01.03-0928392 tanggal 29 April 2015

19) PT. PP (Persero) Tbk

Perseroan semula berbentuk N.V. Pembangunan Perumahan, yang merupakan hasil peleburan suatu Perusahaan Bangunan bekas milik Bank Industri Negara yang didirikan berdasarkan Akta Notaris Raden Mr. Soewandi di Jakarta, No. 48 tanggal 26 Agustus 1953 (Bank Industri Negara kemudian dilebur menjadi Bank Pembangunan Indonesia), dan selanjutnya berdasarkan Undang-Undang No.19 PRP Tahun 1960 dilebur ke dalam P.N.Pembangunan Perumahan, suatu Perusahaan Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No.63 Tahun 1961 tanggal 29 Maret 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pembangunan Perumahan, yang telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No.84/1961, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.2218.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Pembangunan Perumahan Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), yang telah diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 50 tahun 1971, bentuk Perusahaan Negara Pembangunan Perumahan diubah menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan didirikan dengan Akta Perseroan Terbatas PT Pembangunan Perumahan No. 78 tanggal 15 Maret

1973 Jo. Akta Perubahan No.247 tanggal 21 Maret 1974, keduanya dibuat di hadapan Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta (“Akta Pendirian”), yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Keputusannya No. Y.A.5/105/2 tanggal 30 Maret 1974; didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 3 April 1974, di bawah No. 1186 dan 1187; dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 48 tanggal 14 Juni 1974, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 249/1974.

Sesuai dengan perubahan anggaran dasar terakhir tersebut di atas, maksud dan tujuan perusahaan adalah turut serta melakukan usaha di bidang industri konstruksi, industri pabrikan, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, Engineering Procurement dan Construction (EPC), perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang konstruksi, teknologi informasi, kepariwisataan, perhotelan, jasa engineering dan perencanaan, pengembang untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip - prinsip perseroan terbatas Kegiatan usaha yang saat ini dilakukan adalah Jasa Konstruksi, Realiti (Pengembang) & Properti, Pracetak, Peralatan dan Investasi di bidang Infrastruktur dan Energi. Dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan, manajemen melaksanakan strategi korporasi yang bertumpu pada enam pilar bisnis yaitu: Konstruksi, EPC (Energi, Oil & Gas), Properti & Realiti, Pracetak, Peralatan, dan Investasi. Untuk menunjang keberhasilan pencapaian target kinerja perusahaan tersebut, perusahaan mencanangkan "Visi PT PP (Persero) Tbk.

20) PT. Pakuwon Jati Tbk.

PT.. Pakuwon Jati Tbk. ("Perusahaan") didirikan berdasarkan akta No. 281 tanggal 20 September 1982 dari Kartini Muljadi, S.H., notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. C2-308.HT.01.01.TH.83 tanggal 17 Januari 1983, serta diumumkan dalam Berita Negara No. 28 tanggal 8 April 1983 Tambahan No. 420. Anggaran dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan yang terakhir dengan akta No. 28 tanggal 13 Maret 2012 dari notaris Esther Mercia Sulaiman, S.H., notaris di Jakarta mengenai pemecahan saham. Akta perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Suratnya No. AHU-AH.01.10-09074 tanggal 14 Maret 2012.

Perusahaan berdomisili di Surabaya dengan kantor pusat berlokasi di Eastcoast Center Lt. 5, Pakuwon Town Square – Pakuwon City, Jl. Kejawan Putih Mutiara No. 17, Surabaya, Indonesia.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan bergerak dalam bidang pengusahaan (1) pusat perbelanjaan, (2) pusat perkantoran, (3) hotel dan (4) real estat. Perusahaan mulai melakukan kegiatan usaha pada bulan Mei 1986. Jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak ("Grup") masingmasing sebanyak 2.729 dan 2.491 karyawan pada 30 September 2015 dan 31 Desember 2014.

21) PT. Surya Citra Media Tbk.

PT. Surya Citra Media Tbk (“Perusahaan”) didirikan di Indonesia pada tanggal 29 Januari 1999 berdasarkan Akta Notaris Umar Saili, S.H., No. 3 pada tanggal yang sama dengan nama PT. Cipta Aneka Selaras. Akta Pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-18033 HT.01.01.TH.99 tanggal 25 Oktober 1999 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 9 Tambahan No. 997 tanggal 29 Januari 2002. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, diantaranya mengenai perubahan nama Perusahaan dari PT. Cipta Aneka Selaras menjadi PT Surya Citra Media berdasarkan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti Sutjipto, S.H., No. 103 tanggal 31 Desember 2001. Perubahan Anggaran Dasar ini telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-00124 HT.01.04.TH.2002 tanggal 4 Januari 2002 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 47 Tambahan No. 5690 tanggal 11 Juni 2002.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perusahaan, sebagaimana diaktakan dengan Akta Notaris Chandra Lim, S.H., LL.M., No. 27 tanggal 19 Mei 2015, mengenai penyesuaian Anggaran Dasar Perusahaan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) yang berlaku. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0934622 tanggal 26 Mei 2015.

Ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah bergerak dalam bidang usaha yang terkait dengan jasa multimedia. Perusahaan berkedudukan di SCTV Tower -

Senayan City, Jalan Asia Afrika Lot 19, Jakarta 10270. Perusahaan beroperasi secara komersial mulai tahun 2002. PT Elang Mahkota Teknologi Tbk adalah entitas induk terakhir dari Perusahaan dan entitas anaknya.

22) PT. Siloam International Hospital Tbk.

PT. Siloam International Hospitals Tbk. didirikan dengan nama PT. Sentralindo Wirasta pada tanggal 3 Agustus 1996 berdasarkan Akta Pendirian No. 3 yang dibuat dihadapan Myra Yuwono, S.H., Notaris di Sukabumi. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C2-8639.HT.01.01.TH.'96, tanggal 27 Agustus 1996 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 97, Tambahan No. 9518 pada tanggal 3 Desember 1996. Anggaran dasar Perusahaan telah diubah beberapa kali, perubahan terakhir berdasarkan Akta Notaris No.10 tanggal 12 Juni 2015 yang dibuat dihadapan Nurlani Yusup, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, tentang perubahan anggaran Dasar Perusahaan yang Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan suratnya No. AHU-AH.01.03-0942343 tertanggal 17 Juni 2015. Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan utama Perusahaan adalah dalam bidang jasa kesehatan, termasuk mendirikan dan mengelola rumah sakit, poliklinik, sarana dan pra sarana penunjang kesehatan, menyelenggarakan pelayanan dan penyelenggaraan kesehatan serta menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2010 setelah restrukturisasi unit-unit rumah sakit dari PT. Lippo Karawaci Tbk. Kegiatan utama Perusahaan adalah bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat yaitu mendirikan dan mengelola rumah sakit. Area kerja unit-unit rumah sakit Perusahaan dan Entitas Anak (selanjutnya disebut Grup) meliputi beberapa kota di pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Sulawesi dan Nusa Tenggara Timur. Perusahaan berkantor pusat di Gd. Fakultas Kedokteran UPH Lt.32. Jl. Boulevard Jend.Sudirman No.15, Tangerang 15810, Banten - Indonesia. Entitas induk Perusahaan adalah PT. Megapratama Karya Persada dengan entitas induk terakhir adalah PT. Lippo Karawaci Tbk.

Penawaran umum saham perdana Perusahaan sejumlah 156.100.000 lembar saham biasa kepada masyarakat dan telah mendapatkan pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan melalui surat No.S-260/D.04/2013 pada tanggal 2 September 2013 dan selanjutnya seluruh saham dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 September 2013.

23) PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk.

PT. Semen Indonesia Tbk didirikan dengan nama NV Pabrik Semen Gresik pada tanggal 25 Maret 1953 dengan Akta Notaris Raden Mr. Soewandi No. 41. Pada tanggal 17 April 1961, NV Pabrik Semen Gresik dijadikan Perusahaan Negara (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 132 tahun 1961, kemudian berubah menjadi PT. Semen Gresik (Persero) berdasarkan Akta Notaris J.N. Siregar, S.H. No. 81 tanggal 24 Oktober 1969.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir antara lain mengenai perubahan dewan direksi dan komisaris berdasarkan Akta No. 43 tanggal 25 Maret 2014 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, SH, Notaris di Jakarta. Perubahan ini telah dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Ruang lingkup kegiatan utama Perseroan menurut Anggaran Dasar adalah menjalankan usaha dalam bidang industri persemenan. Lokasi pabrik semen Perseroan dan Entitas Anak (Grup) berada di Gresik dan Tuban di Jawa Timur, Indarung di Sumatera Barat, Pangkep di Sulawesi Selatan dan Quang Ninh di Vietnam. Hasil produksi Grup dipasarkan di dalam dan di luar negeri.

Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Jl. Veteran, Gresik 61122, Jawa Timur. Perseroan memulai kegiatan komersialnya pada tanggal 7 Agustus 1957. The Company's head office is located at Jl. Veteran, Gresik 61122, East Java. The Company commenced commercial operations on August 7, 1957. Pemegang saham pengendali Perseroan adalah Pemerintah Republik Indonesia.

24) PT. Summarecon Agung Tbk.

PT. Summarecon Agung Tbk didirikan sesuai dengan Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan akta notaris Ridwan Suselo, S.H., No. 308 tanggal 26 November 1975. Anggaran dasar Perusahaan telah diterima dan dicatat oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. YA 5/344/6 tanggal 12 Juli 1977 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 79, Tambahan No. 597 tanggal 4 Oktober 1977. Anggaran dasar

Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta notaris Fathiah Helmi, S.H., No. 51 tanggal 24 Juli 2013, mengenai pembagian saham bonus, perubahan terakhir tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (MHHAM) dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.10-32548. Tanggal 2 Agustus 2013.

Sesuai dengan Pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan bergerak dalam bidang pembangunan real estat beserta sarana penunjangnya serta menjalankan usaha dalam bidang jasa dan perdagangan. Saat ini, ruang lingkup bisnis perusahaan bergerak di bidang penjualan atau penyewaan real estat, pusat perbelanjaan, fasilitas perkantoran, beserta sarana penunjangnya.

Kantor pusat Perusahaan berkedudukan di Jakarta Timur dan berkantor pusat di Plaza Summarecon, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 42, Jakarta. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1976. PT Semarop Agung adalah entitas induk terakhir Perusahaan dan Entitas Anaknya (selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai “Grup”).

25) PT. Sawit Sumbermas Sarana Tbk.

PT. Sawit Sumbermas Sarana Tbk. (“Perseroan”) didirikan di Jakarta, berdasarkan Akta No. 51 tanggal 22 November 1995 dari Notaris Enimarya Agoes Suwarko, S.H. Akta pendirian Perseroan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-8176.HT.01.01.TH.96 tanggal 26 Juli 1996, serta

selanjutnya diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 839, Tambahan No. 36 tanggal 22 Februari 2011.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta No. 2 tanggal 17 September 2013 dari Notaris Dedy Syamri, S.H. tentang amandemen ruang lingkup kegiatan Perseroan. Perubahan ini telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-54423.AH.01.02.Tahun 2013 tanggal 25 Oktober 2013, dan sedang dalam proses untuk diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Perseroan berdomisili di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Indonesia dengan kantor pusat di Jl. Haji Udan Said No. 47, Pangkalan Bun. Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah pertanian, perdagangan, dan industri. Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2005. Perseroan terutama bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit yang memproduksi minyak kelapa sawit dan inti sawit dengan kapasitas produksi 90 MT tandan buah segar (“TBS”) per jam (tidak diaudit). Pada tanggal 12 April 2013, Perseroan telah memulai produksi pabrik kelapa sawit kedua yang berkapasitas 60 MT TBS per jam (tidak diaudit). Perkebunan kelapa sawit dan kedua pabrik kelapa sawit berlokasi di Arut Selatan, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

Berdasarkan Akta No. 2 tanggal 17 September 2013 dari Notaris Dedy Syamri, S.H., Perseroan tidak memiliki pemegang saham pengendali pada tanggal

30 September 2015 (31 Desember 2014: tidak memiliki pemegang saham pengendali). Pemegang saham terakhir Perseroan dimiliki oleh perorangan.

26) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk.

Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk pada mulanya merupakan bagian dari "*Post en Telegraafdienst*", yang didirikan dan beroperasi secara komersial pada tahun 1884 berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda No. 7 tanggal 27 Maret 1884 dan diumumkan dalam Berita Negara Hindia Belanda No. 52 tanggal 3 April 1884. Pada tahun 1991, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 1991, status Perusahaan diubah menjadi perseroan terbatas milik negara ("Persero"). Entitas induk terakhir Perusahaan adalah Pemerintah Republik Indonesia ("Pemerintah") (Catatan 1c dan 22). Perusahaan didirikan berdasarkan akta notaris Imas Fatimah, S.H. No. 128 tanggal 24 September 1991. Akta pendirian tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-6870.HT.01.01.Th.1991 tanggal 19 November 1991 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5 tanggal 17 Januari 1992, Tambahan No. 210.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali diubah, perubahan terakhir antara lain dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan serta Peraturan dan Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara, penambahan kegiatan usaha utama dan penunjang Perseroan, penambahan hak khusus Pemegang Saham Seri A Dwiwarna, perubahan ketentuan tentang pembatasan wewenang Direksi terkait tindakan Direksi yang memerlukan

persetujuan Dewan Komisaris dalam menjalankan tindakan pengurusan Perseroan serta penyempurnaan redaksi dan sistematika Anggaran Dasar bertalian dengan penambahan substansi Anggaran Dasar, berdasarkan akta notaris Ashoya Ratam, S.H., MKn. No.20 tanggal 12 Mei 2015. Perubahan terakhir telah diterima dan disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“Menkumham”) berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0938775 tanggal 9 Juni 2015 dan Keputusan Menkumham No. AHU-0936901.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 9 Juni 2015.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah menyelenggarakan jaringan dan jasa telekomunikasi dan informatika, serta optimalisasi sumber daya Perusahaan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, Perusahaan menjalankan kegiatan yang meliputi:

1) Usaha utama:

- a) Merencanakan, membangun, menyediakan, mengembangkan, mengoperasikan, memasarkan/menjual/menyewakan, dan memelihara jaringan telekomunikasi dan informatika dalam arti yang seluas-luasnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Merencanakan, mengembangkan, menyediakan, memasarkan/menjual, dan meningkatkan layanan jasa telekomunikasi dan informatika dalam arti yang seluas-luasnya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c) Melakukan investasi termasuk penyertaan modal pada perusahaan lainnya sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan.

2) Usaha penunjang:

- a) Menyediakan jasa transaksi pembayaran dan pengiriman uang melalui jaringan telekomunikasi dan informatika.
- b) Menjalankan kegiatan dan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya yang dimiliki Perusahaan, yang antara lain meliputi pemanfaatan aset tetap dan aset bergerak, fasilitas sistem informasi, fasilitas pendidikan dan pelatihan, dan fasilitas pemeliharaan dan perbaikan.
- c) Bekerja sama dengan pihak lain dalam rangka optimalisasi sumber daya informatika, komunikasi atau teknologi yang dimiliki oleh pihak lain pelaku industri informatika, komunikasi dan teknologi, sejalan dengan dan untuk mencapai maksud dan tujuan Perseroan. Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Jalan Japati No. 1, Bandung, Jawa Barat.

27) PT. United Tractors Indonesia Tbk.

PT. United Tractors Tbk (“Perseroan”) didirikan di Indonesia pada tanggal 13 Oktober 1972 dengan nama PT. Inter Astra Motor Works, berdasarkan Akta Pendirian No. 69, dihadapan Djojo Muljadi, S.H. Akta Pendirian tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. Y.A.5/34/8 tanggal 6 Pebruari 1973 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No. 31, Tambahan No. 281 tanggal 17 April 1973. Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan Anggaran

Dasar terakhir terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2015 sebagaimana dituangkan dalam akta No. 63 tanggal 29 April 2015 yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah mendapat penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 28 Mei 2015 No. AHU-AH.01.03-0935494 dan No. AHUAH. 01.03-0935495.

Ruang lingkup kegiatan utama Perseroan dan entitas anak (bersama-sama disebut "Grup") meliputi penjualan dan penyewaan alat berat ("Mesin konstruksi") beserta pelayanan purna jual; penambangan batubara dan kontraktor penambangan; *engineering*, perencanaan, perakitan dan pembuatan komponen mesin, alat, peralatan dan alat berat; pembuatan kapal serta jasa perbaikannya; dan penyewaan kapal dan angkutan pelayaran; dan industri kontraktor.

Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1973. Perseroan dikendalikan oleh induk perusahaannya PT. Astra International Tbk, perusahaan yang didirikan di Indonesia. Pemegang saham terbesar PT. Astra International Tbk adalah Jardine Cycle & Carriage Ltd., perusahaan yang didirikan di Singapura. Jardine Cycle & Carriage Ltd. Adalah anak perusahaan dari Jardine Matheson Holdings Ltd., perusahaan yang didirikan di Bermuda.

Perseroan berkedudukan di Jakarta dan mempunyai 20 cabang, 21 kantor lokasi dan 10 kantor perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia. Kantor pusat berlokasi di Jalan Raya Bekasi Km. 22, Cakung, Jakarta. Pada tanggal 30 September 2015, Grup mempunyai karyawan sekitar 28.804 orang (31 Desember 2014: 27.227 orang).

28) PT. Unilever Indonesia Tbk.

PT. Unilever Indonesia Tbk ("Perseroan") didirikan pada tanggal 5 Desember 1933 dengan nama Lever's Zeepfabrieken N.V. dengan akta No. 23 oleh Tn. A.H. van Ophuijsen, notaris di Batavia, disetujui oleh Gouverneur Generaal van Nederlandsch-Indie dengan surat No. 14 tanggal 16 Desember 1933, didaftarkan di Raad van Justitie di Batavia dengan No. 302 pada tanggal 22 Desember 1933, dan diumumkan dalam *Javasche Courant* tanggal 9 Januari 1934, Tambahan No. 3.

Nama Perseroan diubah menjadi "PT. Unilever Indonesia" dengan akta No. 171 tanggal 22 Juli 1980 dari notaris Ny. Kartini Muljadi, S.H.. Selanjutnya perubahan nama Perseroan menjadi "PT. Unilever Indonesia Tbk", dilakukan dengan akta notaris Tn. Mudofir Hadi, S.H., No. 92 tanggal 30 Juni 1997. Akta ini disetujui oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. C2-1.049HT.01.04 TH.98 tanggal 23 Februari 1998 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 39 tanggal 15 Mei 1998, Tambahan No. 2620.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan; terakhir dengan akta notaris No. 17 tanggal 17 Desember 2014 dari Haji Syarif Siangan Tanudjaja, S.H., notaris di Jakarta, terkait dengan penambahan kegiatan usaha Perseroan dan penambahan jenis produk. Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-13007.40.20.2014 tanggal 18 Desember 2014.

Kegiatan usaha Perseroan meliputi bidang produksi, pemasaran dan distribusi barang-barang konsumsi yang meliputi sabun, deterjen, margarin,

makanan berinti susu, es krim, produk-produk kosmetik, minuman dengan bahan pokok teh dan minuman sari buah.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 13 Juni 2000, yang diaktakan dengan akta No. 82 tanggal 14 Juni 2000 dari notaris Singgih Susilo, S.H., Perseroan juga bertindak sebagai distributor utama untuk produk-produk Perseroan dan penyedia jasa penelitian pemasaran. Akta ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan (dahulu Menteri Kehakiman) Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-18482 HT.01.04-TH.2000. Perseroan mulai beroperasi secara komersial tahun 1933.

Kantor Perseroan berlokasi di Jalan Jendral Gatot Subroto Kav. 15, Jakarta. Pabrik-pabrik Perseroan berlokasi di Jalan Jababeka 9 Blok D, Jalan Jababeka Raya Blok O, Jalan Jababeka V Blok V No. 14-16, Kawasan Industri Jababeka Cikarang, Bekasi, Jawa Barat, dan Jalan Rungkut Industri IV No. 5-11, Kawasan Industri Rungkut, Surabaya, Jawa Timur.

29) PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk

PT. Wijaya Karya (Persero), Tbk., ("Perseroan") didirikan berdasarkan Undang-undang No.19 tahun 1960 jo Peraturan Pemerintah No.64 tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara/PN "Widjaja Karja" tanggal 29 Maret 1961. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.64 ini pula, perusahaan bangunan bekas milik Belanda yang bernama Naamloze Vennootschap Technische Handel Maatschappij en Bouwbedrijf Vis en Co. yang telah dikenakan nasionalisasi, dilebur ke dalam PN Widjaja Karja.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.40 tanggal 22 Juli 1971, PN. Widjaja Karja dinyatakan bubar dan dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 3 Undang-undang No.9 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia No.40 tahun 1969, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2904). Selanjutnya Perseroan ini dinamakan "PT. Wijaya Karya", berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No.110 tanggal 20 Desember 1972 yang dibuat di hadapan Dian Paramita Tamzil, pada waktu itu pengganti dari D Muljadi, SH., Notaris di Jakarta, Akta Perubahan Naskah Pendirian Perseroan Terbatas "PT. Wijaya Karya" No.106, tanggal 17 April 1973 yang dibuat dihadapan Kartini Muljadi, SH., Notaris di Jakarta, keduanya telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No. Y.A.5/165/14 tanggal 8 Mei 1973, didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta dengan No.1723 dan No.1724 tanggal 16 Mei 1973, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.76 tanggal 21 September 1973, Tambahan No.683.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali diubah, dan terakhir diubah dengan Akta No. 30 tanggal 21 Mei 2010, dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I dalam Surat Nomor AHU-33763.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 6 Juli 2010, dan terakhir diubah dengan Akta No. 20 tanggal 18 Maret 2014 dibuat dihadapan Nila Noordjasmani Soeyasa Besar, SH.MKn pengganti dari M. Nova Faisal, SH.MKn, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan

Hak Asasi Manusia R.I dalam Surat Nomor AHU-AH.01.10-13006 tanggal 26 Maret 2014.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang industri konstruksi, industri pabrikan, industri konversi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, energi terbarukan dan energi konversi, perdagangan, engineering procurement, construction, pengelolaan kawasan, layanan peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi jasa engineering dan perencanaan, dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Perseroan beralamat di Jl. D.I Panjaitan Kav.9, Jakarta Timur dengan lokasi kegiatan utama di seluruh Indonesia dan luar negeri. Perseroan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1961.

30) PT. Waskita Karya Persero Tbk.

Perusahaan Negara Waskita Karya didirikan pada tanggal 1 Januari 1961 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 1961, dari perusahaan asing bernama "Volker Aanemings Maatschappij NV" yang dinasionalisasi Pemerintah Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor: 40 Tahun 1970 status Perusahaan berubah dari Perusahaan Negara (PN) menjadi Perseroan (Persero). Selanjutnya, Perusahaan dinamakan PT. Waskita Karya (Persero) berdasarkan Akta Perseroan Terbatas Nomor 80 Tanggal 15 Maret 1973, yang dibuat di hadapan Notaris Kartini Mulyadi, S.H. Akta Perseroan Terbatas tersebut telah

disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 20 Agustus 1973 dengan surat keputusan Nomor: 4.a.5/310/3 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 82 tanggal 13 Nopember 1973, Tambahan Berita Negara Nomor 91. Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali diubah, dan perubahan terakhir dilakukan berdasarkan Akta No 46 tanggal 26 Mei 2015, yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dengan surat keputusan No AHU-AH.01.03-0934821 tanggal 26 Mei 2015. Perubahan anggaran dasar terakhir tersebut antara lain berkaitan dengan peningkatan modal, yaitu modal ditempatkan dan disetor perusahaan.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah turut melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya industri konstruksi, industri pabrikasi, jasa penyewaan, jasa keagenan, investasi, agro industri, perdagangan, pengelolaan kawasan, layanan jasa peningkatan kemampuan di bidang jasa konstruksi, teknologi informasi serta kepariwisataan dan pengembang dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha yaitu Pekerjaan pelaksanaan konstruksi, jasa pertambangan, pekerjaan terintegrasi *Engineering, Procurement and Construction* (EPC), rancang bangun (*Design and Build*), layanan jasa konsultasi manajemen, *building* manajemen, pabrikasi bahan dan komponen bangunan, pabrikasi

komponen dan peralatan konstruksi, pabrikasi barang logam, kayu, karet dan plastik, penyewaan peralatan konstruksi, layanan jasa keagenan bahan dan komponen bangunan serta peralatan konstruksi, investasi dan/atau pengelolaan usaha di bidang prasarana dan sarana dasar serta industri, melakukan usaha di bidang agro industri, ekspor-impor, perdagangan umum, pengelolaan kawasan, *system development*, layanan jasa bidang teknologi informasi dan kepariwisataan dan pengembangan realty. Kegiatan usaha Perusahaan yang saat ini telah dijalankan Perusahaan adalah kegiatan pelaksanaan konstruksi dan pekerjaan terintegrasi *Engineering, Procurement and Construction (EPC)*.

B. Penyajian Data

Penyajian data ini adalah hasil dari penelitian di lapangan dengan menggunakan laporan keuangan dan pertanyaan-pertanyaan manajemen terhadap Trainer Bursa Efek Indonesia KP Banjarmasin yang meliputi laporan neraca dan laba rugi serta pertanyaan manajemen umum, kelembagaan, dll. Hal ini sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan untuk mengetahui kinerja perusahaan dengan menggunakan analisa rasio keuangan pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index (JII) di Bursa Efek Indonesia. Untuk menjawab permasalahan tersebut, maka dilakukan penelitian lapangan dengan temuan sebagai berikut:

Saham-saham syariah yang masuk dalam perhitungan Jakarta Islamic Index (JII) terus dievaluasi dari sisi ketaatannya terhadap prinsip-prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam fatwa DSN. Selama ini Jakarta Islamic Index (JII) memang memiliki prospek yang bagus karena dapat dilihat bahwa perusahaan-

perusahaan yang masuk pada JII adalah perusahaan yang merupakan kapitalisasi pasar yang besar, kemudian ketika perusahaan masuk dalam JII adalah perusahaan yang memiliki prospek bagus, akan tetapi sangat perlu kiranya untuk terus menilai dari sisi fundamental karena perubahan kondisi perusahaan akan selalu ada apalagi dari sisi keuangan yang berubah-ubah, disisi lain kita melihat sangat banyak nya perusahaan yang sudah kategori syariah yang bersaing dan dengan senang hati mengganti posisi perusahaan yang tidak lagi memenuhi kriteria JII.³

Kriteria yang digunakan untuk menentukan saham-saham yang masuk dalam perhitungan JII adalah:⁴ Kumpulan saham dengan jenis usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan (kecuali termasuk dalam 10 kapitalisasi besar), saham yang berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun memiliki rasio kewajiban terhadap aktiva idealnya adalah maksimal sebesar 90%, 60 saham dari susunan saham berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar (*market capitalization*) terbesar selama satu tahun terakhir.

Apabila saham-saham tersebut tidak lagi memenuhi prinsip-prinsip syariah otoritas akan mengeluarkannya dari JII dan kedudukannya digantikan saham lain yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, setiap periode ada saham yang keluar dan yang masuk ke dalam JII. Evaluasi terhadap saham-saham yang masuk dalam perhitungan JII dilakukan setiap enam bulan sekali. Sedangkan

³Wawancara dengan Yuniar, tanggal 26 Mei 2016 di Kantor Bursa Efek Indonesia KP Banjarmasin.

⁴Wawancara dengan Yuniar.

perusahaan jenis usaha emiten akan terus diawasi berdasarkan data-data publik yang tersedia. Keluar masuknya saham dalam perhitungan JII pada kenyataannya banyak disebabkan oleh terlampauinya atas maksimum rasio kewajibannya terhadap aktivitya bahkan juga dari sisi syariahnya.⁵

Berikut adalah rekapitulasi data hasil perhitungan rasio-rasio keuangan yang mengacu kepada laporan keuangan perusahaan pada Jakarta Islamic Index (JII) di Bursa Efek Indonesia :

1. Data Rasio Likuiditas Perusahaan-perusahaan pada Jakarta Islamic Index (JII)

Berdasarkan rasio-rasio yang tercantum dalam bab II, maka penulis menganalisis keuangan berdasarkan likuiditas Jakarta Islamic Index (JII) sebagai berikut:

a. Data Rasio Lancar (*current ratio*)

Berikut ini adalah tabel yang memaparkan data hasil rasio lancar perusahaan-perusahaan Jakarta Islamic Index (JII) periode Juni-November 2015:

Tabel 4.1 RASIO LANCAR (*CURRENT RATIO*)

Jakarta Islamic Index (JII) Periode Juni-November 2015
(dalam rupiah penuh)

No	Kode Saham	Nama Saham	Aktiva Lancar	Utang Lancar/Liabilitas J.Pendek	(X)
1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk	2,568,605,000,000	5,705,344,000,000	0.45

⁵Wawancara dengan Yuniar, tanggal 26 Mei 2016 di Kantor Bursa Efek Indonesia KP Banjarmasin.

2	ADRO	Adaro Energy Tbk	18,262,929,797,000	8,682,645,573,000	2.10
3	AKRA	AKR Corporindo Tbk	8,301,637,816,000	5,905,149,043,000	1.41
4	ASII	Astra International Tbk	106,252,000,000,000	81,848,000,000,000	1.30
5	ASRI	Alam Sutera Realty Tbk	2,327,522,989,000	2,693,808,310,000	0.86
6	BSDE	bumi Serpong Damai Tbk	17,433,409,914,484	5,848,552,664,023	2.98
7	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	13,714,146,000,000	5,915,526,000,000	2.32
8	INCO	Vale Indonesia Tbk	9,059,154,589,000	2,061,580,335,000	4.39
9	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk	42,897,504,000,000	26,793,559,000,000	1.60
10	INTP	Indocement Tunggul Prakasa Tbk	11,468,345,000,000	2,075,400,000,000	5.53
11	ITMG	Indo Tambang Raya Megah Tbk	9,321,749,401,000	4,957,026,714,000	1.88
12	JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk	2,780,344,502,000	4,077,196,637,000	0.68
13	KLBF	Kalbe Farma Tbk	8,510,651,561,028	2,466,068,663,526	3.45
14	LPKR	Lippo Karawaci Tbk	32,450,815,403,924	4,657,691,078,786	6.97
15	LPPF	Matahari Department Store Tbk	2,015,856,000,000	2,551,465,000,000	0.79
16	LSIP	PP London Sumatra Plantation Tbk	1,328,397,000,000	659,250,000,000	2.02
17	MPPA	Matahari Putra Prima Tbk	4,031,162,000,000	3,078,521,000,000	1.31
18	PGAS	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	22,730,596,553,751	8,734,475,788,313	2.60
19	PTPP	PP (Persero) Tbk	14,488,402,043,895	9,322,656,212,985	1.55
20	PWON	Pakuwon Jati Tbk	5,828,062,205,000	4,180,692,702,000	1.39
21	SCMA	Surya Citra Media Tbk	3,243,926,997,000	795,612,226,000	4.08
22	SILO	Siloam International Hospitals Tbk	937,377,358,842	618,751,421,955	1.51
23	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk	10,320,169,845,000	5,691,339,223,000	1.81
24	SMRA	Summarecon Agung Tbk	6,780,203,411,000	4,165,843,831,000	1.63

25	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk	2,131,154,258,000	301,529,767,000	7.07
26	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	45,586,000,000,000	33,910,000,000,000	1.34
27	UNTR	United Tractors Tbk	41,757,815,000,000	22,012,276,000,000	1.90
28	UNVR	Unilever Indonesia Tbk	7,423,304,000,000	9,400,595,000,000	0.79
29	WIKA	Wijaya Karta (Persero) Tbk	10,852,945,764,000	9,594,657,641,000	1.13
30	WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk	17,413,762,929,463	12,694,123,302,186	1.37

Sumber: Laporan Keuangan Jakarta Islamic Index (JII) periode Juni-November 2015, per 30 September.

Data hasil perhitungan rasio tersebut berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Lancar} = \frac{\text{Aktiva lancar}}{\text{Utang Lancar}}$$

b. Data Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Berikut ini adalah tabel yang memaparkan data hasil rasio cepat perusahaan-perusahaan Jakarta Islamic Index (JII) periode Juni-November 2015:

Tabel 4.2 RASIO CEPAT (*QUICK RATIO*)

Jakarta Islamic Index (JII) Periode Juni-November 2015

(dalam rupiah penuh)

No	Nama Saham	Aktiva Lancar	Persediaan	Utang Lancar/Liabilitas J.Pendek	(X)
1	Astra Agro Lestari Tbk	2,568,605,000,000	1,426,894,000,000	5,705,344,000,000	0.20
2	Adaro Energy Tbk	18,262,929,797,000	1,052,988,194,000	8,682,645,573,000	1.98
3	AKR Corporindo	8,301,637,816,000	1,008,945,252,000	5,905,149,043,000	1.23

	Tbk				
4	Astra International Tbk	106,252,000,000,000	17,819,000,000,000	81,848,000,000,000	1.08
5	Alam Sutera Realty Tbk	2,327,522,989,000	1,272,122,699,000	2,693,808,310,000	0.39
6	bumi Serpong Damai Tbk	17,433,409,914,484	5,962,847,426,856	5,848,552,664,023	1.96
7	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	3,714,146,000,000	2,560,249,000,000	5,915,526,000,000	0.20
8	Vale Indonesia Tbk	9,059,154,589,000	1,695,785,586,000	2,061,580,335,000	3.57
9	Indofood Sukses Makmur Tbk	42,897,504,000,000	8,805,733,000,000	26,793,559,000,000	1.27
10	Indocement Tungal Prakasa Tbk	11,468,345,000,000	1,680,682,000,000	2,075,400,000,000	4.72
11	Indo Tambang Raya Megah Tbk	9,321,749,401,000	2,085,412,617,000	4,957,026,714,000	1.46
12	Kalbe Farma Tbk	8,510,651,561,028	3,018,379,321,519	2,466,068,663,526	2.23
13	Lippo Karawaci Tbk	32,450,815,403,924	19,147,082,883,980	4,657,691,078,786	2.86
14	Matahari Department Store Tbk	2,015,856,000,000	997,328,000,000	2,551,465,000,000	0.40
15	PP London Sumatra Plantation Tbk	1,328,397,000,000	486,707,000,000	659,250,000,000	1.28
16	Matahari Putra Prima Tbk	4,031,162,000,000	3,187,588,000,000	3,078,521,000,000	0.27
17	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	22,730,596,553,751	706,312,343,597	8,734,475,788,313	2.52
18	PP (Persero) Tbk	14,488,402,043,895	2,549,581,111,183	9,322,656,212,985	1.28
19	Pakuwon Jati Tbk	5,828,062,205,000	2,014,265,470,000	4,180,692,702,000	0.91
20	Surya Citra Media Tbk	3,243,926,997,000	509,177,615,000	795,612,226,000	3.44
21	Siloam International Hospitals Tbk	937,377,358,842	123,678,605,656	618,751,421,955	1.32
22	Semen Indonesia (Persero) Tbk	10,320,169,845,000	2,983,147,548,000	5,691,339,223,000	1.29
23	Summarecon Agung Tbk	6,780,203,411,000	4,694,301,776,000	4,165,843,831,000	0.50
24	Sawit Sumbermas Sarana Tbk	2,131,154,258,000	198,428,321,000	301,529,767,000	6.41

25	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	45,586,000,000,000	690,000,000,000	33,910,000,000,000	1.32
26	United Tractors Tbk	41,757,815,000,000	7,873,359,000,000	22,012,276,000,000	1.54
27	Unilever Indonesia Tbk	7,423,304,000,000	2,396,452,000,000	9,400,595,000,000	0.53
28	Wijaya Karya (Persero) Tbk	10,852,945,764,000	1,078,789,285,000	9,594,657,641,000	1.02
29	Waskita Karya (Persero) Tbk	17,413,762,929,463	999,342,093,663	12,694,123,302,186	1.29

Sumber: Laporan Keuangan Jakarta Islamic Index (JII) periode Juni-November 2015, per 30 September

Data hasil perhitungan rasio tersebut berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Cepat} = \frac{\text{Aktiva Lancar} - \text{Persediaan}}{\text{Utang Lancar}}$$

c. Data Rasio Kas atas Aktiva Lancar

Berikut ini adalah tabel yang memaparkan data hasil rasio kas atas aktiva lancar perusahaan-perusahaan Jakarta Islamic Index (JII) periode Juni-November 2015:

Tabel 4.3 RASIO KAS ATAS AKTIVA LANCAR

Jakarta Islamic Index (JII) Periode Juni-November 2015

(dalam rupiah penuh)

No	Kode Saham	Nama Saham	Kas	Aktiva Lancar	Rasio
1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk	443,062,000,000	2,568,605,000,000	17%
2	ADRO	Adaro Energy Tbk	11,508,192,719,000	18,262,929,797,000	63%
3	AKRA	AKR Corporindo Tbk	1,445,507,407,000	8,301,637,816,000	17%

4	ASII	Astra International Tbk	24,778,000,000,000	106,252,000,000,000	23%
5	ASRI	Alam Sutera Realty Tbk	235,274,054,000	2,327,522,989,000	10%
6	BSDE	bumi Serpong Damai Tbk	6,746,592,706,043	17,433,409,914,484	39%
7	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	6,126,299,000,000	13,714,146,000,000	45%
8	INCO	Vale Indonesia Tbk	4,668,738,181,000	9,059,154,589,000	52%
9	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk	11,583,945,000,000	42,897,504,000,000	27%
10	INTP	Indocement Tungal Prakasa Tbk	6,533,653,000,000	11,468,345,000,000	57%
11	ITMG	Indo Tambang Raya Megah Tbk	5,036,628,881,000	9,321,749,401,000	54%
12	JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk	2,498,462,270,000	2,780,344,502,000	90%
13	KLBF	Kalbe Farma Tbk	2,124,752,980,457	8,510,651,561,028	25%
14	LPKR	Lippo Karawaci Tbk	1,583,535,723,296	32,450,815,403,924	5%
15	LPPF	Matahari Department Store Tbk	659,770,000,000	2,015,856,000,000	33%
16	LSIP	PP London Sumatra Plantation Tbk	622,013,000,000	1,328,397,000,000	47%
17	MPPA	Matahari Putra Prima Tbk	180,211,000,000	4,031,162,000,000	4%
18	PGAS	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	13,813,837,636,494	22,730,596,553,751	61%
19	PTPP	PP (Persero) Tbk	1,720,982,937,060	14,488,402,043,895	12%
20	PWON	Pakuwon Jati Tbk	2,649,987,410,000	5,828,062,205,000	45%
21	SCMA	Surya Citra Media Tbk	1,187,261,327,000	3,243,926,997,000	37%
22	SILO	Siloam International Hospitals Tbk	180,058,662,280	937,377,358,842	19%
23	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk	2,648,792,272,000	10,320,169,845,000	26%

24	SMRA	Summarecon Agung Tbk	974,117,211,000	6,780,203,411,000	14%
25	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk	942,939,786,000	2,131,154,258,000	44%
26	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	26,264,000,000,000	45,586,000,000,000	58%
27	UNTR	United Tractors Tbk	15,928,778,000,000	41,757,815,000,000	38%
28	UNVR	Unilever Indonesia Tbk	834,415,000,000	7,423,304,000,000	11%
29	WIKA	Wijaya Karta (Persero) Tbk	1,230,197,074,000	10,852,945,764,000	11%
30	WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk	6,295,550,955,466	17,413,762,929,463	36%

Sumber: Laporan Keuangan Jakarta Islamic Index (JII) periode Juni-November 2015, per 30 September

Data hasil perhitungan rasio tersebut berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kas Atas Aktiva Lancar} = \frac{\text{Kas}}{\text{Aktiva Lancar}}$$

d. Data Rasio Kas Atas Utang Lancar

Berikut ini adalah tabel yang memaparkan data hasil rasio kas atas utang lancar perusahaan-perusahaan Jakarta Islamic Index (JII) periode Juni-November 2015:

Tabel 4.4 RASIO KAS ATAS UTANG LANCAR

Jakarta Islamic Index (JII) Periode Juni-November 2015

(dalam rupiah penuh)

No	Kode Saham	Nama Saham	Kas	Utang Lancar/Liabilitas J.Pendek	Rasio
1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk	443,062,000,000	5,705,344,000,000	8%

2	ADRO	Adaro Energy Tbk	11,508,192,719,000	8,682,645,573,000	133%
3	AKRA	AKR Corporindo Tbk	1,445,507,407,000	5,905,149,043,000	24%
4	ASII	Astra International Tbk	24,778,000,000,000	81,848,000,000,000	30%
5	ASRI	Alam Sutera Realty Tbk	235,274,054,000	2,693,808,310,000	9%
6	BSDE	bumi Serpong Damai Tbk	6,746,592,706,043	5,848,552,664,023	115%
7	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	6,126,299,000,000	5,915,526,000,000	104%
8	INCO	Vale Indonesia Tbk	4,668,738,181,000	2,061,580,335,000	226%
9	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk	11,583,945,000,000	26,793,559,000,000	43%
10	INTP	Indocement Tunggul Prakasa Tbk	6,533,653,000,000	2,075,400,000,000	315%
11	ITMG	Indo Tambang Raya Megah Tbk	5,036,628,881,000	4,957,026,714,000	102%
12	JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk	2,498,462,270,000	4,077,196,637,000	61%
13	KLBF	Kalbe Farma Tbk	2,124,752,980,457	2,466,068,663,526	86%
14	LPKR	Lippo Karawaci Tbk	1,583,535,723,296	4,657,691,078,786	34%
15	LPPF	Matahari Department Store Tbk	659,770,000,000	2,551,465,000,000	26%
16	LSIP	PP London Sumatra Plantation Tbk	622,013,000,000	659,250,000,000	94%
17	MPPA	Matahari Putra Prima Tbk	180,211,000,000	3,078,521,000,000	6%
18	PGAS	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	13,813,837,636,494	8,734,475,788,313	158%
19	PTPP	PP (Persero) Tbk	1,720,982,937,060	9,322,656,212,985	18%
20	PWON	Pakuwon Jati Tbk	2,649,987,410,000	4,180,692,702,000	63%
21	SCMA	Surya Citra Media Tbk	1,187,261,327,000	795,612,226,000	149%
22	SILO	Siloam International Hospitals Tbk	180,058,662,280	618,751,421,955	29%
23	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk	2,648,792,272,000	5,691,339,223,000	47%

24	SMRA	Summarecon Agung Tbk	974,117,211,000	4,165,843,831,000	23%
25	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk	942,939,786,000	301,529,767,000	313%
26	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	26,264,000,000,000	33,910,000,000,000	77%
27	UNTR	United Tractors Tbk	15,928,778,000,000	22,012,276,000,000	72%
28	UNVR	Unilever Indonesia Tbk	834,415,000,000	9,400,595,000,000	9%
29	WIKA	Wijaya Karta (Persero) Tbk	1,230,197,074,000	9,594,657,641,000	13%
30	WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk	6,295,550,955,466	12,694,123,302,186	50%

Sumber: Laporan Keuangan Jakarta Islamic Index (JII) periode Juni-November 2015, per 30 September

Data hasil perhitungan rasio tersebut berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kas Atas Utang Lancar} = \frac{\text{Kas}}{\text{Utang Lancar}}$$

e. Data Rasio Aktiva Lancar dan Total Aktiva

Berikut ini adalah tabel yang memaparkan data hasil rasio aktiva lancar dan total aktiva perusahaan-perusahaan Jakarta Islamic Index (JII) periode Juni-November 2015:

Tabel 4.5 RASIO AKTIVA LANCAR DAN TOTAL AKTIVA

Jakarta Islamic Index (JII) Periode Juni-November 2015

(dalam rupiah penuh)

No	Nama Saham	Aktiva Lancar	Total Aktiva	Rasio
1	Astra Agro Lestari Tbk	2,568,605,000,000	21,004,796,000,000	12%

2	Adaro Energy Tbk	18,262,929,797,000	91,096,758,023,000	20%
3	AKR Corporindo Tbk	8,301,637,816,000	15,916,678,351,000	52%
4	Astra International Tbk	106,252,000,000,000	255,759,000,000,000	42%
5	Alam Sutera Realty Tbk	2,327,522,989,000	17,084,708,918,000	14%
6	bumi Serpong Damai Tbk	17,433,409,914,484	35,621,239,367,757	49%
7	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	3,714,146,000,000	26,041,599,000,000	14%
8	Vale Indonesia Tbk	9,059,154,589,000	33,476,206,918,000	27%
9	Indofood Sukses Makmur Tbk	42,897,504,000,000	90,868,842,000,000	47%
10	Indocement Tunggal Prakasa Tbk	11,468,345,000,000	25,929,775,000,000	44%
11	Indo Tambang Raya Megah Tbk	9,321,749,401,000	19,083,091,546,000	49%
12	Jasa Marga (Persero) Tbk	2,780,344,502,000	33,166,267,262,000	8%
13	Kalbe Farma Tbk	8,510,651,561,028	13,259,344,410,474	64%
14	Lippo Karawaci Tbk	32,450,815,403,924	40,865,465,379,786	79%
15	Matahari Department Store Tbk	2,015,856,000,000	3,603,188,000,000	56%
16	PP London Sumatra Plantation Tbk	1,328,397,000,000	8,835,766,000,000	15%
17	Matahari Putra Prima Tbk	4,031,162,000,000	6,230,712,000,000	65%
18	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	22,730,596,553,751	90,605,493,124,775	25%
19	PP (Persero) Tbk	14,488,402,043,895	15,859,628,887,487	91%
20	Pakuwon Jati Tbk	5,828,062,205,000	19,049,146,034,000	31%
21	Surya Citra Media Tbk	3,243,926,997,000	4,943,237,834,000	66%
22	Siloam International Hospitals Tbk	937,377,358,842	3,013,736,264,746	31%
23	Semen Indonesia (Persero) Tbk	10,320,169,845,000	36,354,961,382,000	28%
24	Summarecon Agung Tbk	6,780,203,411,000	18,006,137,658,000	38%
25	Sawit Sumbermas Sarana Tbk	2,131,154,258,000	6,071,946,277,000	35%
26	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	45,586,000,000,000	158,394,000,000,000	29%

27	United Tractors Tbk	41,757,815,000,000	70,902,354,000,000	59%
28	Unilever Indonesia Tbk	7,423,304,000,000	15,984,771,000,000	46%
29	Wijaya Karta (Persero) Tbk	852,945,764,000	17,844,644,616,000	5%
30	Waskita Karya (Persero) Tbk	7,413,762,929,463	23,349,744,927,896	32%

Sumber: Laporan Keuangan Jakarta Islamic Index (JII) periode Juni-November 2015, per 30 September

Data hasil perhitungan rasio tersebut berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Aktiva Lancar dan Total Aktiva} = \frac{\text{Aktiva lancar}}{\text{Total Aktiva}}$$

f. Data Rasio Aktiva Lancar dan Total Utang

Berikut ini adalah tabel yang memaparkan data hasil rasio aktiva lancar dan total utang perusahaan-perusahaan Jakarta Islamic Index (JII) periode Juni-November 2015:

Tabel 4.6 RASIO AKTIVA LANCAR DAN TOTAL UTANG

Jakarta Islamic Index (JII) Periode Juni-November 2015

(dalam rupiah penuh)

No	Kode Saham	Nama Saham	Aktiva Lancar	Total Utang J.Panjang/Total Liabilitas J.Panjang	Rasio
1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk	2,568,605,000,000	4,063,536,000,000	63%
2	ADRO	Adaro Energy Tbk	18,262,929,797,000	32,589,370,476,000	56%
3	AKRA	AKR Corporindo Tbk	8,301,637,816,000	2,977,983,592,000	279%

4	ASII	Astra International Tbk	106,252,000,000,000	47,301,000,000,000	225%
5	ASRI	Alam Sutera Realty Tbk	2,327,522,989,000	8,318,209,363,000	28%
6	BSDE	bumi Serpong Damai Tbk	17,433,409,914,484	8,129,609,519,278	214%
7	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	3,714,146,000,000	4,449,659,000,000	83%
8	INCO	Vale Indonesia Tbk	9,059,154,589,000	4,486,610,299,000	202%
9	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk	42,897,504,000,000	22,876,142,000,000	188%
10	INTP	Indocement Tungal Prakasa Tbk	11,468,345,000,000	1,072,967,000,000	1069%
11	ITMG	Indo Tambang Raya Megah Tbk	9,321,749,401,000	842,953,384,000	1106%
12	JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk	2,780,344,502,000	17,489,297,289,000	16%
13	KLBF	Kalbe Farma Tbk	8,510,651,561,028	304,716,875,611	2793%
14	LPKR	Lippo Karawaci Tbk	32,450,815,403,924	17,435,233,602,930	186%
15	LPPF	Matahari Department Store Tbk	2,015,856,000,000	359,868,000,000	560%
16	LSIP	PP London Sumatra Plantation Tbk	1,328,397,000,000	1,046,359,000,000	127%
17	MPPA	Matahari Putra Prima Tbk	4,031,162,000,000	278,341,000,000	1448%
18	PGAS	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	22,730,596,553,751	39,230,113,953,031	58%
19	PTPP	PP (Persero) Tbk	14,488,402,043,895	2,978,209,731,637	486%
20	PWON	Pakuwon Jati Tbk	5,828,062,205,000	5,880,640,738,000	99%
21	SCMA	Surya Citra Media Tbk	3,243,926,997,000	326,524,840,000	993%
22	SILO	Siloam International Hospitals Tbk	937,377,358,842	691,092,540,884	136%
23	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk	10,320,169,845,000	4,325,057,834,000	239%

24	SMRA	Summarecon Agung Tbk	6,780,203,411,000	6,524,470,360,000	104%
25	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk	2,131,154,258,000	2,880,240,351,000	74%
26	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	45,586,000,000,000	37,399,000,000,000	122%
27	UNTR	United Tractors Tbk	41,757,815,000,000	6,367,968,000,000	656%
28	UNVR	Unilever Indonesia Tbk	7,423,304,000,000	828,569,000,000	896%
29	WIKA	Wijaya Karta (Persero) Tbk	10,852,945,764,000	3,093,400,171,000	351%
30	WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk	17,413,762,929,463	2,215,011,710,137	786%

Sumber: Laporan Keuangan Jakarta Islamic Index (JII) periode Juni-November 2015, per 30 September

Data hasil perhitungan rasio tersebut berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Aktiva Lancar dan Total Utang} = \frac{\text{Aktiva lancar}}{\text{Total Utang Jangka Panjang}}$$

2. Data Hasil Rasio Aktivitas

Berdasarkan rasio-rasio yang tercantum dalam bab II, maka penulis menganalisis keuangan berdasarkan likuiditas Jakarta Islamic Index (JII) sebagai berikut:

a. Data Rasio *Inventory Turn Over*

Berikut ini adalah tabel yang memaparkan data hasil rasio *inventory turn over* perusahaan-perusahaan Jakarta Islamic Index (JII) periode Juni-November 2015:

Tabel 4.7 RASIO INVENTORY TURN OVER

Jakarta Islamic Index (JII) Periode Juni-November 2015

(dalam rupiah penuh)

No	Nama Saham	Penjualan/Pendapatan Usaha/Pendapatan Bersih	Persediaan	(X)
1	Astra Agro Lestari Tbk	10,347,130,000,000	1,426,894,000,000	7.3
2	Adaro Energy Tbk	30,957,885,149,000	1,052,988,194,000	29.4
3	AKR Corporindo Tbk	15,033,677,986,000	1,008,945,252,000	14.9
4	Astra International Tbk	138,177,000,000,000	17,819,000,000,000	7.8
5	Alam Sutera Realty Tbk	2,169,770,238,000	1,272,122,699,000	1.7
6	bumi Serpong Damai Tbk	4,633,497,247,055	5,962,847,426,856	0.8
7	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	24,095,759,000,000	2,560,249,000,000	9.4
8	Vale Indonesia Tbk	8,986,719,695,000	1,695,785,586,000	5.3
9	Indofood Sukses Makmur Tbk	47,564,001,000,000	8,805,733,000,000	5.4
10	Indocement Tunggul Prakasa Tbk	12,886,170,000,000	1,680,682,000,000	7.7
11	Indo Tambang Raya Megah Tbk	17,684,403,350,000	2,085,412,617,000	8.5
12	Kalbe Farma Tbk	13,127,806,587,343	3,018,379,321,519	4.3
13	Lippo Karawaci Tbk	6,596,224,500,313	19,147,082,883,980	0.3
14	Matahari Department Store Tbk	6,812,964,000,000	997,328,000,000	6.8
15	PP London Sumatra Plantation Tbk	3,076,398,000,000	486,707,000,000	6.3
16	Matahari Putra Prima Tbk	10,447,959,000,000	3,187,588,000,000	3.3
17	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	31,340,099,431,564	706,312,343,597	44.4
18	PP (Persero) Tbk	8,774,669,718,095	2,549,581,111,183	3.4
19	Pakuwon Jati Tbk	3,563,032,055,000	2,014,265,470,000	1.8
20	Surya Citra Media Tbk	3,206,352,693,000	509,177,615,000	6.3

21	Siloam International Hospitals Tbk	3,013,142,142,653	123,678,605,656	24.4
22	Semen Indonesia (Persero) Tbk	19,114,609,462,000	2,983,147,548,000	6.4
23	Summarecon Agung Tbk	4,496,273,327,000	4,694,301,776,000	1.0
24	Sawit Sumbermas Sarana Tbk	1,761,095,236,000	198,428,321,000	8.9
25	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	75,719,000,000,000	690,000,000,000	109.7
26	United Tractors Tbk	38,294,590,000,000	7,873,359,000,000	4.9
27	Unilever Indonesia Tbk	27,546,680,000,000	2,396,452,000,000	11.5
28	Wijaya Karta (Persero) Tbk	8,091,546,974,000	1,078,789,285,000	7.5
29	Waskita Karya (Persero) Tbk	7,422,050,322,266	999,342,093,663	7.4

Sumber: Laporan Keuangan Jakarta Islamic Index (JII) periode Juni-November 2015, per 30 September

Data hasil perhitungan rasio tersebut berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Inventory Turn Over} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Persediaan}}$$

b. Data Rasio *Receivable Turn Over*

Berikut ini adalah tabel yang memaparkan data hasil rasio *receivable turn over* perusahaan-perusahaan Jakarta Islamic Index (JII) periode Juni-November 2015:

Tabel 4.8 RASIO RECEIVABLE TURN OVER

Jakarta Islamic Index (JII) Periode Juni-November 2015
(dalam rupiah penuh)

No	Nama Saham	Penjualan/Pendapatan Usaha/Pendapatan Bersih	Piutang	(X)
1	Astra Agro Lestari Tbk	10,347,130,000,000	732,938,000,000	14.1
2	Adaro Energy Tbk	30,957,885,149,000	4,013,438,368,000	7.7
3	AKR Corporindo Tbk	15,033,677,986,000	4,136,776,479,000	3.6
4	Astra International Tbk	138,177,000,000,000	94,450,000,000,000	1.5
5	Alam Sutera Realty Tbk	2,169,770,238,000	118,735,526,000	18.3
6	bumi Serpong Damai Tbk	4,633,497,247,055	330,794,553,224	14.0
7	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	24,095,759,000,000	4,286,816,000,000	5.6
8	Vale Indonesia Tbk	8,986,719,695,000	1,138,966,156,000	7.9
9	Indofood Sukses Makmur Tbk	47,564,001,000,000	6,417,206,000,000	7.4
10	Indocement Tunggul Prakasa Tbk	12,886,170,000,000	2,759,340,000,000	4.7
11	Indo Tambang Raya Megah Tbk	17,684,403,350,000	2,012,552,670,000	8.8
12	Jasa Marga (Persero) Tbk	6,259,166,467,000	208,550,030,000	30.0
13	Kalbe Farma Tbk	13,127,806,587,343	2,728,998,562,719	4.8
14	Lippo Karawaci Tbk	6,596,224,500,313	1,330,236,171,443	5.0
15	Matahari Department Store Tbk	6,812,964,000,000	54,892,000,000	124.1
16	PP London Sumatra Plantation Tbk	3,076,398,000,000	201,018,000,000	15.3
17	Matahari Putra Prima Tbk	10,447,959,000,000	515,542,000,000	20.3
18	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	31,340,099,431,564	8,578,963,831,096	3.7
19	PP (Persero) Tbk	8,774,669,718,095	4,228,390,083,046	2.1
20	Pakuwon Jati Tbk	3,563,032,055,000	462,648,460,000	7.7
21	Surya Citra Media Tbk	3,206,352,693,000	1,374,552,919,000	2.3
22	Siloam International Hospitals Tbk	3,013,142,142,653	564,072,637,815	5.3
23	Semen Indonesia (Persero) Tbk	19,114,609,462,000	3,792,446,669,000	5.0

24	Summarecon Agung Tbk	4,496,273,327,000	491,716,206,000	9.1
25	Sawit Sumbermas Sarana Tbk	1,761,095,236,000	208,428,122,000	8.4
26	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	75,719,000,000,000	9,870,000,000,000	7.7
27	United Tractors Tbk	38,294,590,000,000	14,411,243,000,000	2.7
28	Unilever Indonesia Tbk	27,546,680,000,000	4,088,653,000,000	6.7
29	Wijaya Karta (Persero) Tbk	8,091,546,974,000	3,563,000,209,000	2.3
30	Waskita Karya (Persero) Tbk	7,422,050,322,266	4,656,990,151,803	1.6

Sumber: Laporan Keuangan Jakarta Islamic Index (JII) periode Juni-November 2015, per 30 September

Data hasil perhitungan rasio tersebut berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Receivable turn Over} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Piutang}}$$

c. Data Rasio *Fixed Aset Turn Over*

Berikut ini adalah tabel yang memaparkan data hasil rasio *fixed asset turn over* perusahaan-perusahaan Jakarta Islamic Index (JII) periode Juni-November 2015:

Tabel 4.9 RASIO *FIXED ASSET TURN OVER*

Jakarta Islamic Index (JII) Periode Juni-November 2015

(dalam rupiah penuh)

No	Kode Saham	Nama Saham	Penjualan/Pendapatan Usaha/Pendapatan Bersih	Aktiva tetap	(X)
----	------------	------------	--	--------------	-----

1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk	10,347,130,000,000	9,051,743,000,000	1.1
2	ADRO	Adaro Energy Tbk	30,957,885,149,000	21,751,999,333,000	1.4
3	AKRA	AKR Corporindo Tbk	15,033,677,986,000	4,665,769,921,000	3.2
4	ASII	Astra International Tbk	138,177,000,000,000	42,273,000,000,000	3.3
5	ASRI	Alam Sutera Realty Tbk	2,169,770,238,000	1,085,377,302,000	2.0
6	BSDE	bumi Serpong Damai Tbk	4,633,497,247,055	758,000,433,419	6.1
7	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	24,095,759,000,000	6,161,649,000,000	3.9
8	INCO	Vale Indonesia Tbk	8,986,719,695,000	23,365,075,468,000	0.4
9	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk	47,564,001,000,000	24,169,763,000,000	2.0
10	INTP	Indocement Tunggul Prakasa Tbk	12,886,170,000,000	13,533,367,000,000	1.0
11	ITMG	Indo Tambang Raya Megah Tbk	17,684,403,350,000	3,841,980,782,000	4.6
12	JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk	6,259,166,467,000	756,765,138,000	8.3
13	KLBF	Kalbe Farma Tbk	13,127,806,587,343	3,802,024,577,013	3.5
14	LPKR	Lippo Karawaci Tbk	6,596,224,500,313	3,129,803,271,387	2.1
15	LPPF	Matahari Department Store Tbk	6,812,964,000,000	876,835,000,000	7.8
16	LSIP	PP London Sumatra Plantation Tbk	3,076,398,000,000	3,430,908,000,000	0.9
17	MPPA	Matahari Putra Prima Tbk	10,447,959,000,000	1,381,416,000,000	7.6
18	PGAS	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	31,340,099,431,564	29,255,656,609,626	1.1
19	PTPP	PP (Persero) Tbk	8,774,669,718,095	809,636,482,410	10.8
20	PWON	Pakuwon Jati Tbk	3,563,032,055,000	1,346,764,274,000	2.6
21	SCMA	Surya Citra Media Tbk	3,206,352,693,000	934,453,424,000	3.4
22	SILO	Siloam International Hospitals Tbk	3,013,142,142,653	1,581,371,855,850	1.9

23	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk	19,114,609,462,000	23,379,558,811	817.6
24	SMRA	Summarecon Agung Tbk	4,496,273,327,000	412,056,479,000	10.9
25	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk	1,761,095,236,000	1,655,446,899,000	1.1
26	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	75,719,000,000,000	98,900,000,000,000	0.8
27	UNTR	United Tractors Tbk	38,294,590,000,000	14,567,879,000,000	2.6
28	UNVR	Unilever Indonesia Tbk	27,546,680,000,000	7,813,991,000,000	3.5
29	WIKA	Wijaya Karta (Persero) Tbk	8,091,546,974,000	3,000,509,179,000	2.7
30	WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk	7,422,050,322,266	1,236,838,599,521	6.0

Sumber: Laporan Keuangan Jakarta Islamic Index (JII) periode Juni-November 2015, per 30 September

Data hasil perhitungan rasio tersebut berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Fixed Aset Turn Over} = \frac{\text{Penjualan}}{\text{Aktiva Tetap Bersih}}$$

d. Data Rasio Total Aset Turn Over

Berikut ini adalah tabel yang memaparkan data hasil rasio total asset turn over perusahaan-perusahaan Jakarta Islamic Index (JII) periode Juni-November 2015:

Tabel 4.10 RASIO TOTAL ASSET TURN OVER

Jakarta Islamic Index (JII) Periode Juni-November 2015

(dalam rupiah penuh)

No	Kode Saham	Nama Saham	Penjualan/Pendapatan Usaha/Pendapatan Bersih	Total Aktiva	Rasio
1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk	10,347,130,000,000	21,004,976,000,000	49%
2	ADRO	Adaro Energy Tbk	30,957,885,149,000	91,096,758,023,000	34%
3	AKRA	AKR Corporindo Tbk	15,033,677,986,000	15,916,678,351,000	94%
4	ASII	Astra International Tbk	138,177,000,000,000	255,759,000,000,000	54%
5	ASRI	Alam Sutera Realty Tbk	2,169,770,238,000	17,084,708,918,000	13%
6	BSDE	bumi Serpong Damai Tbk	4,633,497,247,055	35,621,239,367,757	13%
7	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	24,095,759,000,000	26,041,599,000,000	93%
8	INCO	Vale Indonesia Tbk	8,986,719,695,000	33,476,206,918,000	27%
9	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk	47,564,001,000,000	90,868,842,000,000	52%
10	INTP	Indocement Tunggul Prakasa Tbk	12,886,170,000,000	25,929,775,000,000	50%
11	ITMG	Indo Tambang Raya Megah Tbk	17,684,403,350,000	19,083,091,546,000	93%
12	JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk	6,259,166,467,000	33,166,267,262,000	19%
13	KLBF	Kalbe Farma Tbk	13,127,806,587,343	13,259,344,410,474	99%
14	LPKR	Lippo Karawaci Tbk	6,596,224,500,313	40,865,465,379,786	16%
15	LPPF	Matahari Department Store Tbk	6,812,964,000,000	3,603,188,000,000	189%
16	LSIP	PP London Sumatra Plantation Tbk	3,076,398,000,000	8,835,766,000,000	35%
17	MPPA	Matahari Putra Prima Tbk	10,447,959,000,000	6,230,712,000,000	168%
18	PGAS	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	31,340,099,431,564	90,605,493,124,775	35%
19	PTPP	PP (Persero) Tbk	8,774,669,718,095	15,859,628,887,487	55%
20	PWON	Pakuwon Jati Tbk	3,563,032,055,000	19,049,146,034,000	19%
21	SCMA	Surya Citra Media Tbk	3,206,352,693,000	4,943,237,834,000	65%

22	SILO	Siloam International Hospitals Tbk	3,013,142,142,653	3,013,736,264,746	100%
23	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk	19,114,609,462,000	36,354,961,382,000	53%
24	SMRA	Summarecon Agung Tbk	4,496,273,327,000	18,006,137,658,000	25%
25	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk	1,761,095,236,000	6,071,946,277,000	29%
26	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	75,719,000,000,000	158,394,000,000,000	48%
27	UNTR	United Tractors Tbk	38,294,590,000,000	70,902,354,000,000	54%
28	UNVR	Unilever Indonesia Tbk	27,546,680,000,000	15,984,771,000,000	172%
29	WIKA	Wijaya Karta (Persero) Tbk	8,091,546,974,000	17,844,644,616,000	45%
30	WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk	7,422,050,322,266	23,349,744,927,896	32%

Sumber: Laporan Keuangan Jakarta Islamic Index (JII) periode Juni-November 2015, per 30 September

Data hasil perhitungan rasio tersebut berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$Total\ Aset\ Turn\ Over = \frac{Penjualan}{Total\ Aset}$$

3. Data Hasil Rasio Rentabilitas

Berdasarkan rasio-rasio yang tercantum dalam bab II, maka penulis menganalisis kondisi keuangan berdasarkan likuiditas Jakarta Islamic Index (JII) sebagai berikut:

a. Data Rasio Margin Laba

Berikut ini adalah tabel yang memaparkan data hasil rasio margin laba perusahaan-perusahaan Jakarta Islamic Index (JII) periode Juni-November 2015:

Tabel 4.11 RASIO MARGIN LABA

Jakarta Islamic Index (JII) Periode Juni-November 2015

(dalam rupiah penuh)

NO	Nama Saham	Penjualan/Pendapatan Usaha/Pendapatan Bersih	Beban Pokok Penjualan/Beban Pokok Pendapatan	Penjualan/Pendapatan Usaha/Pendapatan Bersih	Rasio
1	Astra Agro Lestari Tbk	10,347,130,000,000	8,059,605,000,000	10,347,130,000,000	22%
2	Adaro Energy Tbk	30,957,885,149,000	24,556,425,742,000	30,957,885,149,000	21%
3	AKR Corporindo Tbk	15,033,677,986,000	13,394,141,092,000	15,033,677,986,000	11%
4	Astra International Tbk	138,177,000,000,000	110,914,000,000,000	138,177,000,000,000	20%
5	Alam Sutera Realty Tbk	2,169,770,238,000	499,758,020,000	2,169,770,238,000	77%
6	bumi Serpong Damai Tbk	4,633,497,247,055	1,174,542,884,828	4,633,497,247,055	75%
7	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	24,095,759,000,000	16,703,751,000,000	24,095,759,000,000	31%
8	Vale Indonesia Tbk	8,986,719,695,000	7,280,850,093,000	8,986,719,695,000	19%
9	Indofood Sukses Makmur Tbk	47,564,001,000,000	34,696,893,000,000	47,564,001,000,000	27%
10	Indocement Tunggul Prakasa Tbk	12,886,170,000,000	7,134,084,000,000	12,886,170,000,000	45%
11	Indo Tambang Raya Megah Tbk	17,684,403,350,000	21,037,867,699,758	17,684,403,350,000	-19%
12	Jasa Marga (Persero) Tbk	6,259,166,467,000	4,221,339,406,000	6,259,166,467,000	33%
13	Kalbe Farma Tbk	13,127,806,587,343	6,716,910,243,206	13,127,806,587,343	49%
14	Lippo Karawaci Tbk	6,596,224,500,313	3,535,434,672,413	6,596,224,500,313	46%
15	Matahari Department Store Tbk	6,812,964,000,000	2,520,011,000,000	6,812,964,000,000	63%
16	PP London Sumatra Plantation Tbk	3,076,398,000,000	2,175,387,000,000	3,076,398,000,000	29%
17	Matahari Putra Prima Tbk	10,447,959,000,000	8,647,133,000,000	10,447,959,000,000	17%
18	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	31,340,099,431,564	13,876,558,721,000	31,340,099,431,564	56%

19	PP (Persero) Tbk	8,774,669,718,095	7,596,487,574,474	8,774,669,718,095	13%
20	Pakuwon Jati Tbk	3,563,032,055,000	1,470,441,712,000	3,563,032,055,000	59%
21	Surya Citra Media Tbk	3,206,352,693,000	1,729,240,912,000	3,206,352,693,000	46%
22	Siloam International Hospitals Tbk	3,013,142,142,653	2,156,668,016,584	3,013,142,142,653	28%
23	Semen Indonesia (Persero) Tbk	19,114,609,462,000	11,601,621,323,000	19,114,609,462,000	39%
24	Summarecon Agung Tbk	4,496,273,327,000	2,172,376,938,000	4,496,273,327,000	52%
25	Sawit Sumbermas Sarana Tbk	1,761,095,236,000	855,849,524,000	1,761,095,236,000	51%
26	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	75,719,000,000,000	52,727,000,000,000	75,719,000,000,000	30%
27	United Tractors Tbk	38,294,590,000,000	29,363,538,000,000	38,294,590,000,000	23%
28	Unilever Indonesia Tbk	27,546,680,000,000	13,582,688,000,000	27,546,680,000,000	51%
29	Wijaya Karta (Persero) Tbk	8,091,546,974,000	7,112,487,118,000	8,091,546,974,000	12%
30	Waskita Karya (Persero) Tbk	7,422,050,322,266	6,527,367,448,920	7,422,050,322,266	12%

Sumber: Laporan Keuangan Jakarta Islamic Index (JII) periode Juni-November 2015, per 30 September

Data hasil perhitungan rasio tersebut berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$Profit\ Margin = \frac{Pendapatan\ Bersih - Harga\ Pokok\ Penjualan}{Penjualan}$$

b. Data Rasio *Net Profit Margin*

Berikut ini adalah tabel yang memaparkan data hasil rasio net profit margin perusahaan-perusahaan Jakarta Islamic Index (JII) periode Juni-November 2015:

Tabel 4.12 RASIO NET PROFIT MARGIN

Jakarta Islamic Index (JII) Periode Juni-November 2015

(dalam rupiah penuh)

No	Kode Saham	Nama Saham	Laba Bersih/Laba Periode Berjalan	Penjualan/Pendapatan Usaha/Pendapatan Bersih	Rasio
1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk	200,421,000,000	10,347,130,000,000	2%
2	ADRO	Adaro Energy Tbk	2,648,094,847,000	30,957,885,149,000	9%
3	AKRA	AKR Corporindo Tbk	873,688,195,000	15,033,677,986,000	6%
4	ASII	Astra International Tbk	14,611,000,000,000	138,177,000,000,000	11%
5	ASRI	Alam Sutera Realty Tbk	155,810,435,000	2,169,770,238,000	7%
6	BSDE	bumi Serpong Damai Tbk	1,892,936,098,741	4,633,497,247,055	41%
7	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	2,326,775,000,000	24,095,759,000,000	10%
8	INCO	Vale Indonesia Tbk	760,097,363,000	8,986,719,695,000	8%
9	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk	2,107,505,000,000	47,564,001,000,000	4%
10	INTP	Indocement Tunggul Prakasa Tbk	3,218,409,000,000	12,886,170,000,000	25%
11	ITMG	Indo Tambang Raya Megah Tbk	1,215,768,836,000	17,684,403,350,000	7%
12	JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk	830,077,147,000	6,259,166,467,000	13%
13	KLBF	Kalbe Farma Tbk	1,534,229,905,893	13,127,806,587,343	12%
14	LPKR	Lippo Karawaci Tbk	444,655,991,631	6,596,224,500,313	7%
15	LPPF	Matahari Department Store Tbk	1,384,040,000,000	6,812,964,000,000	20%
16	LSIP	PP London Sumatra Plantation Tbk	469,697,000,000	3,076,398,000,000	15%
17	MPPA	Matahari Putra Prima Tbk	245,669,000,000	10,447,959,000,000	2%
18	PGAS	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	4,490,965,436,009	31,340,099,431,564	14%

19	PTPP	PP (Persero) Tbk	450,260,400,061	8,774,669,718,095	5%
20	PWON	Pakuwon Jati Tbk	1,260,778,507,000	3,563,032,055,000	35%
21	SCMA	Surya Citra Media Tbk	1,141,466,890,000	3,206,352,693,000	36%
22	SILO	Siloam International Hospitals Tbk	67,605,357,023	3,013,142,142,653	2%
23	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk	3,208,358,811,000	19,114,609,462,000	17%
24	SMRA	Summarecon Agung Tbk	971,424,776,000	4,496,273,327,000	22%
25	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk	373,968,516,000	1,761,095,236,000	21%
26	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	17,337,000,000,000	75,719,000,000,000	23%
27	UNTR	United Tractors Tbk	5,552,029,000,000	38,294,590,000,000	14%
28	UNVR	Unilever Indonesia Tbk	4,183,173,000,000	27,546,680,000,000	15%
29	WIKA	Wijaya Karta (Persero) Tbk	420,939,555,000	8,091,546,974,000	5%
30	WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk	400,358,761,643	7,422,050,322,266	5%

Sumber: Laporan Keuangan Jakarta Islamic Index (JII) periode Juni-November 2015, per 30 September

Data hasil perhitungan rasio tersebut berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan}}$$

c. Data Rasio *Aset Turn Over*

Berikut ini adalah tabel yang memaparkan data hasil rasio *asset turn over* perusahaan-perusahaan Jakarta Islamic Index (JII) periode Juni-November 2015:

Tabel 4.13 RASIO ASSET TURN OVER

Jakarta Islamic Index (JII) Periode Juni-November 2015

(dalam rupiah penuh)

No	Kode Saham	Nama Saham	Penjualan/Pendapatan Usaha/Pendapatan Bersih	Total Aktiva	(X)
1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk	10,347,130,000,000	21,004,796,000,000	0.5
2	ADRO	Adaro Energy Tbk	30,957,885,149,000	91,096,758,023,000	0.3
3	AKRA	AKR Corporindo Tbk	15,033,677,986,000	15,916,678,351,000	0.9
4	ASII	Astra International Tbk	138,177,000,000,000	255,759,000,000,000	0.5
5	ASRI	Alam Sutera Realty Tbk	2,169,770,238,000	17,084,708,918,000	0.1
6	BSDE	bumi Serpong Damai Tbk	4,633,497,247,055	35,621,239,367,757	0.1
7	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	24,095,759,000,000	26,041,599,000,000	0.9
8	INCO	Vale Indonesia Tbk	8,986,719,695,000	33,476,206,918,000	0.3
9	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk	47,564,001,000,000	90,868,842,000,000	0.5
10	INTP	Indocement Tunggul Prakasa Tbk	12,886,170,000,000	25,929,775,000,000	0.5
11	ITMG	Indo Tambang Raya Megah Tbk	17,684,403,350,000	19,083,091,546,000	0.9
12	JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk	6,259,166,467,000	33,166,267,262,000	0.2
13	KLBF	Kalbe Farma Tbk	13,127,806,587,343	13,259,344,410,474	1.0
14	LPKR	Lippo Karawaci Tbk	6,596,224,500,313	40,865,465,379,786	0.2
15	LPPF	Matahari Department Store Tbk	6,812,964,000,000	3,603,188,000,000	1.9
16	LSIP	PP London Sumatra Plantation Tbk	3,076,398,000,000	8,835,766,000,000	0.3
17	MPPA	Matahari Putra Prima Tbk	10,447,959,000,000	6,230,712,000,000	1.7
18	PGAS	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	31,340,099,431,564	90,605,493,124,775	0.3
19	PTPP	PP (Persero) Tbk	8,774,669,718,095	15,859,628,887,487	0.6
20	PWON	Pakuwon Jati Tbk	3,563,032,055,000	19,049,146,034,000	0.2

21	SCM A	Surya Citra Media Tbk	3,206,352,693,000	4,943,237,834,000	0.6
22	SILO	Siloam International Hospitals Tbk	3,013,142,142,653	3,013,736,264,746	1.0
23	SMG R	Semen Indonesia (Persero) Tbk	19,114,609,462,000	36,354,961,382,000	0.5
24	SMR A	Summarecon Agung Tbk	4,496,273,327,000	18,006,137,658,000	0.2
25	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk	1,761,095,236,000	6,071,946,277,000	0.3
26	TLK M	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	75,719,000,000,000	158,394,000,000,000	0.5
27	UNT R	United Tractors Tbk	38,294,590,000,000	70,902,354,000,000	0.5
28	UNV R	Unilever Indonesia Tbk	27,546,680,000,000	15,984,771,000,000	1.7
29	WIK A	Wijaya Karta (Persero) Tbk	8,091,546,974,000	17,844,644,616,000	0.5
30	WSK T	Waskita Karya (Persero) Tbk	7,422,050,322,266	23,349,744,927,896	0.3

Sumber: Laporan Keuangan Jakarta Islamic Index (JII) periode Juni-November 2015, per 30 September

Data hasil perhitungan rasio tersebut berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Aset Turn Over (return on asset)} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Total Aktiva}}$$

d. Data Rasio *Return on Investment*

Berikut ini adalah tabel yang memaparkan data hasil rasio *return on investment* perusahaan-perusahaan Jakarta Islamic Index (JII) periode Juni-November 2015:

Tabel 4.14 RASIO RETURN ON INVESTMENT

Jakarta Islamic Index (JII) Periode Juni-November 2015

(dalam rupiah penuh)

No	Kode Saham	Nama Saham	Laba Bersih/Laba Periode Berjalan	Total Aktiva	Rasio
1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk	200,421,000,000	21,004,976,000,000	1%
2	ADRO	Adaro Energy Tbk	2,648,094,847,000	91,096,758,023,000	3%
3	AKRA	AKR Corporindo Tbk	873,688,195,000	15,916,678,351,000	5%
4	ASII	Astra International Tbk	14,611,000,000,000	255,759,000,000,000	6%
5	ASRI	Alam Sutera Realty Tbk	155,810,435,000	17,084,708,918,000	1%
6	BSDE	bumi Serpong Damai Tbk	1,892,936,098,741	35,621,239,367,757	5%
7	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	2,326,775,000,000	26,041,599,000,000	9%
8	INCO	Vale Indonesia Tbk	760,097,363,000	33,476,206,918,000	2%
9	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk	2,107,505,000,000	90,868,842,000,000	2%
10	INTP	Indocement Tunggul Prakasa Tbk	3,218,409,000,000	25,929,775,000,000	12%
11	ITMG	Indo Tambang Raya Megah Tbk	1,215,768,836,000	19,083,091,546,000	6%
12	JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk	830,077,147,000	33,166,267,262,000	3%
13	KLBF	Kalbe Farma Tbk	1,534,229,905,893	13,259,344,410,474	12%
14	LPKR	Lippo Karawaci Tbk	444,655,991,631	40,865,465,379,786	1%
15	LPPF	Matahari Department Store Tbk	1,384,040,000,000	3,603,188,000,000	38%
16	LSIP	PP London Sumatra Plantation Tbk	469,697,000,000	8,835,766,000,000	5%
17	MPPA	Matahari Putra Prima Tbk	245,669,000,000	6,230,712,000,000	4%
18	PGAS	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	4,490,965,436,009	90,605,493,124,775	5%
19	PTPP	PP (Persero) Tbk	450,260,400,061	15,859,628,887,487	3%
20	PWON	Pakuwon Jati Tbk	1,260,778,507,000	19,049,146,034,000	7%

21	SCMA	Surya Citra Media Tbk	1,141,466,890,000	4,943,237,834,000	23%
22	SILO	Siloam International Hospitals Tbk	67,605,357,023	3,013,736,264,746	2%
23	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk	3,208,358,811,000	36,354,961,382,000	9%
24	SMRA	Summarecon Agung Tbk	971,424,776,000	18,006,137,658,000	5%
25	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk	373,968,516,000	6,071,946,277,000	6%
26	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	17,337,000,000,000	158,394,000,000,000	11%
27	UNTR	United Tractors Tbk	5,552,029,000,000	70,902,354,000,000	8%
28	UNVR	Unilever Indonesia Tbk	4,183,173,000,000	15,984,771,000,000	26%
29	WIKA	Wijaya Karta (Persero) Tbk	420,939,555,000	17,844,644,616,000	2%
30	WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk	400,358,761,643	23,349,744,927,896	2%

Sumber: Laporan Keuangan Jakarta Islamic Index (JII) periode Juni-November 2015, per 30 September

Data hasil perhitungan rasio tersebut berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Return on Investment} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aktiva}}$$

e. Data Rasio Return On Total Aset

Berikut ini adalah tabel yang memaparkan data hasil rasio *return on total aset* perusahaan-perusahaan Jakarta Islamic Index (JII) periode Juni-November 2015:

Tabel 4.15 RASIO RETURN ON TOTAL ASSET

Jakarta Islamic Index (JII) Periode Juni-November 2015

(dalam rupiah penuh)

No	Kode Saham	Nama Saham	Laba Bersih/Laba Periode Berjalan	Total Ekuitas	Rasio
1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk	200,421,000,000	11,235,916,000,000	2%
2	ADRO	Adaro Energy Tbk	2,648,094,847,000	49,824,741,974,000	5%
3	AKRA	AKR Corporindo Tbk	873,688,195,000	7,033,545,716,000	12%
4	ASII	Astra International Tbk	14,611,000,000,000	126,610,000,000,000	12%
5	ASRI	Alam Sutera Realty Tbk	155,810,435,000	6,072,691,245,000	3%
6	BSDE	bumi Serpong Damai Tbk	1,892,936,098,741	21,643,077,184,456	9%
7	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	2,326,775,000,000	15,676,414,000,000	15%
8	INCO	Vale Indonesia Tbk	760,097,363,000	26,928,016,284,000	3%
9	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk	2,107,505,000,000	41,199,141,000,000	5%
10	INTP	Indocement Tungal Prakasa Tbk	3,218,409,000,000	22,781,408,000,000	14%
11	ITMG	Indo Tambang Raya Megah Tbk	1,215,768,836,000	13,283,111,448,000	9%
12	JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk	830,077,147,000	11,599,773,336,000	7%
13	KLBF	Kalbe Farma Tbk	1,534,229,905,893	10,486,558,871,337	15%
14	LPKR	Lippo Karawaci Tbk	444,655,991,631	18,772,540,698,070	2%
15	LPPF	Matahari Department Store Tbk	1,384,040,000,000	691,855,000,000	200%
16	LSIP	PP London Sumatra Plantation Tbk	469,697,000,000	7,130,157,000,000	7%
17	MPPA	Matahari Putra Prima Tbk	245,669,000,000	2,873,850,000,000	9%
18	PGAS	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	4,490,965,436,009	42,626,246,383,431	11%
19	PTPP	PP (Persero) Tbk	450,260,400,061	3,558,762,942,865	13%
20	PWON	Pakuwon Jati Tbk	1,260,778,507,000	8,987,812,594,000	14%

21	SCMA	Surya Citra Media Tbk	1,141,466,890,000	3,821,100,768,000	30%
22	SILO	Siloam International Hospitals Tbk	67,605,357,023	1,703,892,301,906	4%
23	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk	3,208,358,811,000	26,338,564,325,000	12%
24	SMRA	Summarecon Agung Tbk	971,424,776,000	7,315,823,467,000	13%
25	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk	373,968,516,000	2,890,176,159,000	13%
26	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	17,337,000,000,000	87,085,000,000,000	20%
27	UNTR	United Tractors Tbk	5,552,029,000,000	42,522,110,000,000	13%
28	UNVR	Unilever Indonesia Tbk	4,183,173,000,000	5,755,607,000,000	73%
29	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk	420,939,555,000	5,156,586,804,000	8%
30	WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk	400,358,761,643	8,440,609,915,573	5%

Sumber: Laporan Keuangan Jakarta Islamic Index (JII) periode Juni-November 2015, per 30 September

Data hasil perhitungan rasio tersebut berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$Return\ On\ Total\ Asset = \frac{Laba\ Bersih}{Rata - rata\ Modal\ (equity)}$$

4. Data Hasil Rasio Solvabilitas

Berdasarkan rasio-rasio yang tercantum dalam bab II, maka penulis menganalisis kondisi keuangan berdasarkan likuiditas Jakarta Islamic Index (JII) sebagai berikut:

a. Data Rasio Utang atas Modal

Berikut ini adalah tabel yang memaparkan data hasil rasio utang atas modal perusahaan-perusahaan Jakarta Islamic Index (JII) periode Juni-November 2015:

Tabel 4.16 RASIO UTANG ATAS MODAL

Jakarta Islamic Index (JII) Periode Juni-November 2015

(dalam rupiah penuh)

No	Kode Saham	Nama Saham	Total Liabilitas	Total Ekuitas	Rasio
1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk	9,768,880,000,000	11,235,916,000,000	87%
2	ADRO	Adaro Energy Tbk	41,272,016,049,000	49,824,741,974,000	83%
3	AKRA	AKR Corporindo Tbk	8,883,132,635,000	7,033,545,716,000	126%
4	ASII	Astra International Tbk	129,149,000,000,000	126,610,000,000,000	102%
5	ASRI	Alam Sutera Realty Tbk	11,012,017,673,000	6,072,691,245,000	181%
6	BSDE	bumi Serpong Damai Tbk	13,978,162,183,301	21,643,077,184,456	65%
7	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	10,365,185,000,000	15,676,414,000,000	66%
8	INCO	Vale Indonesia Tbk	6,548,190,634,000	26,928,016,284,000	24%
9	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk	49,669,701,000,000	41,199,141,000,000	121%
10	INTP	Indocement Tungal Prakasa Tbk	3,148,367,000,000	22,781,408,000,000	14%
11	ITMG	Indo Tambang Raya Megah Tbk	5,799,980,098,000	13,283,111,448,000	44%
12	JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk	21,566,493,926,000	11,599,773,336,000	186%
13	KLBF	Kalbe Farma Tbk	2,770,785,539,137	10,486,558,871,337	26%
14	LPKR	Lippo Karawaci Tbk	22,092,924,681,716	18,772,540,698,070	118%

15	LPPF	Matahari Department Store Tbk	2,911,333,000,000	691,855,000,000	421%
16	LSIP	PP London Sumatra Plantation Tbk	1,705,609,000,000	7,130,157,000,000	24%
17	MPPA	Matahari Putra Prima Tbk	3,356,862,000,000	2,873,850,000,000	117%
18	PGAS	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	48,052,531,741,344	42,626,246,383,431	113%
19	PTPP	PP (Persero) Tbk	12,300,865,944,622	3,558,762,942,865	346%
20	PWON	Pakuwon Jati Tbk	10,061,333,440	8,987,812,594,000	0,1%
21	SCMA	Surya Citra Media Tbk	1,122,137,066,000	3,821,100,768,000	29%
22	SILO	Siloam International Hospitals Tbk	1,309,843,962,839	1,703,892,301,906	77%
23	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk	10,016,397,057,000	26,338,564,325,000	38%
24	SMRA	Summarecon Agung Tbk	10,690,314,191,000	7,315,823,467,000	146%
25	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk	3,181,770,118,000	2,890,176,159,000	110%
26	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	71,309,000,000,000	87,085,000,000,000	82%
27	UNTR	United Tractors Tbk	28,380,244,000,000	42,522,110,000,000	67%
28	UNVR	Unilever Indonesia Tbk	10,229,164,000,000	5,755,607,000,000	178%
29	WIKA	Wijaya Karta (Persero) Tbk	12,688,057,812,000	5,156,586,804,000	246%
30	WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk	14,909,135,012,323	8,440,609,915,573	177%

Sumber: Laporan Keuangan Jakarta Islamic Index (JII) periode Juni-November 2015, per 30 September

Data hasil perhitungan rasio tersebut berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Utang Atas Modal} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Modal (equity)}}$$

b. Data Rasio Utang atas Aktiva

Berikut ini adalah tabel yang memaparkan data hasil rasio utang atas aktiva perusahaan-perusahaan Jakarta Islamic Index (JII) periode Juni-November 2015:

Tabel 4.17 RASIO UTANG ATAS AKTIVA

Jakarta Islamic Index (JII) Periode Juni-November 2015

(dalam rupiah penuh)

No	Kode Saham	Nama Saham	Total Liabilitas	Total Aktiva	Rasio
1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk	9,768,880,000,000	21,004,796,000,000	47%
2	ADRO	Adaro Energy Tbk	41,272,016,049,000	91,096,758,023,000	45%
3	AKRA	AKR Corporindo Tbk	8,883,132,635,000	15,916,678,351,000	56%
4	ASII	Astra International Tbk	129,149,000,000,000	255,759,000,000,000	50%
5	ASRI	Alam Sutera Realty Tbk	11,012,017,673,000	17,084,708,918,000	64%
6	BSDE	bumi Serpong Damai Tbk	13,978,162,183,301	35,621,239,367,757	39%
7	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	10,365,185,000,000	26,041,599,000,000	40%
8	INCO	Vale Indonesia Tbk	6,548,190,634,000	33,476,206,918,000	20%
9	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk	49,669,701,000,000	90,868,842,000,000	55%
10	INTP	Indocement Tungal Prakasa Tbk	3,148,367,000,000	25,929,775,000,000	12%
11	ITMG	Indo Tambang Raya Megah Tbk	5,799,980,098,000	19,083,091,546,000	30%
12	JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk	21,566,493,926,000	33,166,267,262,000	65%
13	KLBF	Kalbe Farma Tbk	2,770,785,539,137	13,259,344,410,474	21%
14	LPKR	Lippo Karawaci Tbk	22,092,924,681,716	40,865,465,379,786	54%

15	LPPF	Matahari Department Store Tbk	2,911,333,000,000	3,603,188,000,000	81%
16	LSIP	PP London Sumatra Plantation Tbk	1,705,609,000,000	8,835,766,000,000	19%
17	MPPA	Matahari Putra Prima Tbk	3,356,862,000,000	6,230,712,000,000	54%
18	PGAS	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	48,052,531,741,344	90,605,493,124,775	53%
19	PTPP	PP (Persero) Tbk	12,300,865,944,622	15,859,628,887,487	78%
20	PWON	Pakuwon Jati Tbk	10,061,333,440	19,049,146,034,000	0,1%
21	SCMA	Surya Citra Media Tbk	1,122,137,066,000	4,943,237,834,000	23%
22	SILO	Siloam International Hospitals Tbk	1,309,843,962,839	3,013,736,264,746	43%
23	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk	10,016,397,057,000	36,354,961,382,000	28%
24	SMRA	Summarecon Agung Tbk	10,690,314,191,000	18,006,137,658,000	59%
25	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk	3,181,770,118,000	6,071,946,277,000	52%
26	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	71,309,000,000,000	158,394,000,000,000	45%
27	UNTR	United Tractors Tbk	28,380,244,000,000	70,902,354,000,000	40%
28	UNVR	Unilever Indonesia Tbk	10,229,164,000,000	15,984,771,000,000	64%
29	WIKA	Wijaya Karta (Persero) Tbk	12,688,057,812,000	17,844,644,616,000	71%
30	WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk	14,909,135,012,323	23,349,744,927,896	64 %

Sumber: Laporan Keuangan Jakarta Islamic Index (JII) periode Juni-November 2015, per 30 September

Data hasil perhitungan rasio tersebut berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Utang Atas Aktiva} = \frac{\text{Total Utang}}{\text{Total Aktiva}}$$

5. Data Hasil Rasio Pasar

Berdasarkan rasio-rasio yang tercantum dalam bab II, maka penulis menganalisis keuangan berdasarkan likuiditas Jakarta Islamic Index (JII) sebagai berikut:

a. Data *Price Earning Ratio* (PER)

Rasio ini menunjukkan perbandingan antara harga saham dipasar atau harga perdana yang ditawarkan dibandingkan dengan pendapatan yang diterima. PER yang tinggi menunjukkan ekspektasi investor tentang prestasi perusahaan di masa yang akan datang cukup tinggi.

Berikut ini adalah tabel yang memaparkan data hasil rasio harga saham dipasar atau harga perdana yang ditawarkan perusahaan-perusahaan Jakarta Islamic Index (JII) periode Juni-November 2015:

Tabel 4.17 EARNING PER SHARE (EPS)

Jakarta Islamic Index (JII) Periode Juni-November 2015
(dalam rupiah penuh)

No	Kode Saham	Nama Saham	Laba Bersih/Laba Periode Berjalan	Jumlah Saham Beredar	EPS
1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk	200,421,000,000	157,500,000	1,272.51
2	ADRO	Adaro Energy Tbk	2,648,094,847,000	31985962000	82.79
3	AKRA	AKR Corporindo Tbk	873,688,195,000	3939712574	221.76
4	ASII	Astra International Tbk	14,611,000,000,000	40483553140	360.91
5	ASRI	Alam Sutera Realty Tbk	155,810,435,000	19649411888	7.93
6	BSDE	bumi Serpong Damai Tbk	1,892,936,098,741	1924669619200	0.98

7	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	2,326,775,000,000	5830954000	399.04
8	INCO	Vale Indonesia Tbk	760,097,363,000	9936338720	76.50
9	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk	2,107,505,000,000	8780426500	240.02
10	INTP	Indocement Tunggul Prakasa Tbk	3,218,409,000,000	3681231699	874.28
11	ITMG	Indo Tambang Raya Megah Tbk	1,215,768,836,000	1129925000	1,075.97
12	JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk	830,077,147,000	6800000000	122.07
13	KLBF	Kalbe Farma Tbk	1,534,229,905,893	46875122110	32.73
14	LPKR	Lippo Karawaci Tbk	444,655,991,631	23077689619	19.27
15	LPPF	Matahari Department Store Tbk	1,384,040,000,000	2917918080	474.32
16	LSIP	PP London Sumatra Plantation Tbk	469,697,000,000	6822863965	68.84
17	MPPA	Matahari Putra Prima Tbk	245,669,000,000	5377962800	45.68
18	PGAS	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	4,490,965,436,009	24241508196	185.26
19	PTPP	PP (Persero) Tbk	450,260,400,061	4842436500	92.98
20	PWON	Pakuwon Jati Tbk	1,260,778,507,000	48159602400	26.18
21	SCMA	Surya Citra Media Tbk	1,141,466,890,000	14621601234	78.07
22	SILO	Siloam International Hospitals Tbk	67,605,357,023	1156100000	58.48
23	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk	3,208,358,811,000	5931520000	540.90
24	SMRA	Summarecon Agung Tbk	971,424,776,000	14426781680	67.33
25	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk	373,968,516,000	9525000000	39.26
26	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	17,337,000,000,000	100799996399	171.99
27	UNTR	United Tractors Tbk	5,552,029,000,000	3730135136	1,488.43
28	UNVR	Unilever Indonesia Tbk	4,183,173,000,000	7630000000	548.25
29	WIKA	Wijaya Karta (Persero) Tbk	420,939,555,000	614922500	684.54
30	WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk	400,358,761,643	1356747356000	0.30

Sumber: Laporan Keuangan Jakarta Islamic Index (JII) periode Juni-November 2015, per 30 September

Data hasil perhitungan tersebut berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$Earning\ per\ Share\ (EPS) = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Jumlah Saham Beredar}}$$

Kemudian diketahui Price Earning Ratio, tabel sebagai berikut:

Tabel 4.17 PRICE EARNING RATIO (PER)

No	Kode Saham	Nama Saham	EPS	Harga Pasar Saham	(X)
1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk	1,272.51	18,125	14.24
2	ADRO	Adaro Energy Tbk	82.79	535	6.46
3	AKRA	AKR Corporindo Tbk	221.76	5,850	26.38
4	ASII	Astra International Tbk	360.91	5,225	14.48
5	ASRI	Alam Sutera Realty Tbk	7.93	316	39.85
6	BSDE	bumi Serpong Damai Tbk	0.98	1,405	1,428.55
7	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	399.04	12,400	31.07
8	INCO	Vale Indonesia Tbk	76.50	2,185	28.56
9	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk	240.02	5,500	22.9
10	INTP	Indocement Tunggal Prakasa Tbk	874.28	16,450	18.82
11	ITMG	Indo Tambang Raya Megah Tbk	1,075.97	9,875	9.18
12	JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk	122.07	4,825	39.53
13	KLBF	Kalbe Farma Tbk	32.73	1,375	42.01
14	LPKR	Lippo Karawaci Tbk	19.27	1,130	58.65
15	LPPF	Matahari Department Store Tbk	474.32	16,100	33.94
16	LSIP	PP London Sumatra Plantation Tbk	68.84	1,385	20.12
17	MPPA	Matahari Putra Prima Tbk	45.68	1,920	42.03
18	PGAS	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	185.26	2,530	13.66
19	PTPP	PP (Persero) Tbk	92.98	3,465	37.27

20	PWON	Pakuwon Jati Tbk	26.18	331	12.64
21	SCMA	Surya Citra Media Tbk	78.07	2,740	35.10
22	SILO	Siloam International Hospitals Tbk	58.48	12,375	211.62
23	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk	540.90	9,050	16.73
24	SMRA	Summarecon Agung Tbk	67.33	1,120	16.63
25	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk	39.26	1,615	41.13
26	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	171.99	2,645	15.38
27	UNTR	United Tractors Tbk	1,488.43	17,475	11.74
28	UNVR	Unilever Indonesia Tbk	548.25	38,000	69.31
29	WIKA	Wijaya Karta (Persero) Tbk	684.54	2,590	3.78
30	WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk	0.30	1,550	5,252.68

Sumber: Laporan Keuangan Jakarta Islamic Index (JII) periode Juni-November 2015, per 30 September

Data hasil perhitungan rasio tersebut berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$Price\ Earning\ Ratio\ (PER) = \frac{Harga\ Pasar\ Saham}{Earning\ per\ Share}$$

b. *Data Market to Book Value Ratio*

Berikut ini adalah tabel yang memaparkan data hasil rasio *market to book value* perusahaan-perusahaan Jakarta Islamic Index (JII) periode Juni-November 2015:

Tabel 4.18 BOOK VALUE

Jakarta Islamic Index (JII) Periode Juni-November 2015

Rasio Kas atas Aktiva Lancar

No	Kode Saham	Nama Saham	Total Ekuitas	Jumlah Saham Beredar	Book Value
1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk	11,235,916,000,000	157,500,000	71,339.15
2	ADRO	Adaro Energy Tbk	49,824,741,974,000	31,985,962,000	1,557.71
3	AKRA	AKR Corporindo Tbk	7,033,545,716,000	3,939,712,574	1,785.29
4	ASII	Astra International Tbk	126,610,000,000,000	40,483,553,140	3,127.44
5	ASRI	Alam Sutera Realty Tbk	6,072,691,245,000	19,649,411,888	309.05
6	BSDE	bumi Serpong Damai Tbk	21,643,077,184,456	1,924,669,619,200	11.25
7	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	15,676,414,000,000	5,830,954,000	2,688.48
8	INCO	Vale Indonesia Tbk	26,928,016,284,000	9,936,338,720	2,710.05
9	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk	41,199,141,000,000	8,780,426,500	4,692.16
10	INTP	Indocement Tunggul Prakasa Tbk	22,781,408,000,000	3,681,231,699	6,188.53
11	ITMG	Indo Tambang Raya Megah Tbk	13,283,111,448,000	1,129,925,000	11,755.75
12	JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk	11,599,773,336,000	6,800,000,000	1,705.85
13	KLBF	Kalbe Farma Tbk	10,486,558,871,337	46,875,122,110	223.71
14	LPKR	Lippo Karawaci Tbk	18,772,540,698,070	23,077,689,619	813.45
15	LPPF	Matahari Department Store Tbk	691,855,000,000	2,917,918,080	237.11
16	LSIP	PP London Sumatra Plantation Tbk	7,130,157,000,000	6,822,863,965	1,045.04
17	MPPA	Matahari Putra Prima Tbk	2,873,850,000,000	5,377,962,800	534.38
18	PGAS	Perusahaan Gas	42,626,246,383,431	24,241,508,196	1,758.40

Negara (Persero) Tbk					
19	PTPP	PP (Persero) Tbk	3,558,762,942,865	4,842,436,500	734.91
20	PWON	Pakuwon Jati Tbk	8,987,812,594,000	48,159,602,400	186.63
21	SCMA	Surya Citra Media Tbk	3,821,100,768,000	14,621,601,234	261.33
22	SILO	Siloam International Hospitals Tbk	1,703,892,301,906	1,156,100,000	1,473.83
23	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk	26,338,564,325,000	5,931,520,000	4,440.44
24	SMRA	Summarecon Agung Tbk	7,315,823,467,000	14,426,781,680	507.10
25	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk	2,890,176,159,000	9,525,000,000	303.43
26	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	87,085,000,000,000	100,799,996,399	863.94
27	UNTR	United Tractors Tbk	42,522,110,000,000	3,730,135,136	11,399.62
28	UNVR	Unilever Indonesia Tbk	5,755,607,000,000	7,630,000,000	754.34
29	WIKA	Wijaya Karta (Persero) Tbk	5,156,586,804,000	614,922,500	8,385.75
30	WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk	8,440,609,915,573	1,356,747,356,000	6.22

Sumber: Laporan Keuangan Jakarta Islamic Index (JII) periode Juni-November 2015, per 30 September

Data hasil perhitungan tersebut berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$Book\ Value = \frac{Total\ Ekuitas}{Jumlah\ Saham\ Beredar}$$

Kemudian diketahui Price Earning Ratio, tabel sebagai berikut:

Tabel 4.18 MARKET TO BOOK VALUE

No	Kode Saham	Nama Saham	Book Value	Harga Pasar Saham	(X)
----	------------	------------	------------	-------------------	-----

1	AALI	Astra Agro Lestari Tbk	71,339.15	18,125	0.25
2	ADRO	Adaro Energy Tbk	1,557.71	535	0.34
3	AKRA	AKR Corporindo Tbk	1,785.29	5,850	3.28
4	ASII	Astra International Tbk	3,127.44	5,225	1.67
5	ASRI	Alam Sutera Realty Tbk	309.05	316	1.02
6	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk	11.25	1,405	124.94
7	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk	2,688.48	12,400	4.61
8	INCO	Vale Indonesia Tbk	2,710.05	2,185	0.81
9	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk	4,692.16	5,500	1.17
10	INTP	Indocement Tungal Prakasa Tbk	6,188.53	16,450	2.66
11	ITMG	Indo Tambang Raya Megah Tbk	11,755.75	9,875	0.84
12	JSMR	Jasa Marga (Persero) Tbk	1,705.85	4,825	2.83
13	KLBF	Kalbe Farma Tbk	223.71	1,375	6.15
14	LPKR	Lippo Karawaci Tbk	813.45	1,130	1.39
15	LPPF	Matahari Department Store Tbk	237.11	16,100	67.90
16	LSIP	PP London Sumatra Plantation Tbk	1,045.04	1,385	1.33
17	MPPA	Matahari Putra Prima Tbk	534.38	1,920	3.59
18	PGAS	Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk	1,758.40	2,530	1.44
19	PTPP	PP (Persero) Tbk	734.91	3,465	4.71
20	PWON	Pakuwon Jati Tbk	186.63	331	1.77
21	SCMA	Surya Citra Media Tbk	261.33	2,740	10.48
22	SILO	Siloam International Hospitals Tbk	1,473.83	12,375	8.40
23	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk	4,440.44	9,050	2.04
24	SMRA	Summarecon Agung Tbk	507.10	1,120	2.21

25	SSMS	Sawit Sumbermas Sarana Tbk	303.43	1,615	5.32
26	TLKM	Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk	863.94	2,645	3.06
27	UNTR	United Tractors Tbk	11,399.62	17,475	1.53
28	UNVR	Unilever Indonesia Tbk	754.34	38,000	50.38
29	WIKA	Wijaya Karta (Persero) Tbk	8,385.75	2,590	0.31
30	WSKT	Waskita Karya (Persero) Tbk	6.22	1,550	249.15

Sumber: Laporan Keuangan Jakarta Islamic Index (JII) periode Juni-November 2015, per 30 September

Data hasil perhitungan tersebut berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Market to Book Value} = \frac{\text{Harga Pasar Saham}}{\text{Nilai Buku}}$$

C. Analisis Data

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka selanjutnya data akan dianalisis sesuai dengan permasalahan penelitian yang menjadi fokus pembahasan dalam menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian ini, yaitu kinerja perusahaan pada Jakarta Islamic index (JII) di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan analisa rasio keuangan yang meliputi: likuiditas, aktivitas, rentabilitas, solvabilitas dan pasar.

1. Analisis Kinerja Perusahaan Dengan Menggunakan Analisa Rasio Keuangan Pada Perusahaan Yang Terdaftar Pada Jakarta Islamic Index (JII) di Bursa Efek Indonesia

Kinerja perusahaan Jakarta Islamic Index periode Juni-November 2015 dengan menggunakan analisa rasio keuangan adalah sebagai berikut:

a. Rasio Likuiditas Perusahaan-perusahaan pada Jakarta Islamic Index (JII) periode Juni-November 2015

1) Rasio Lancar (*current ratio*)

Rasio ini menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini dibuat dalam bentuk berapa kali. Apabila rasio lancar ini 1 : 1 atau 100% ini berarti bahwa aktiva lancar dapat menutupi semua utang lancar. Rasio lancar yang lebih aman adalah jika berada diatas 1 atau diatas 100%. Artinya aktiva lancar harus jauh diatas jumlah utang lancar. Berdasarkan rekapitulasi perhitungan rasio lancar, diperoleh 25 perusahaan-perusahaan Jakarta Islamic Index (JII) yakni dengan kode saham: ADRO, ASII, BSDE, INCO, INDF, INTP, ITMG, KLBF, LPKR, LSIP, MPPA, PGAS, ICBP, PTPP, PWON, AKRA, SCMA, SILO, SMGR, SMRA, SSMS, TLKM, yang memiliki rasio diatas 1 atau 100% hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan perusahaan-perusahaan tersebut memiliki aktiva lancar yang lumayan jauh dari utang lancarnya.

Rasio lancar tertinggi dimiliki oleh perusahaan dengan kode saham SSMS yang menunjukkan bahwa aktiva lancar perusahaan dapat dikatakan sangat mampu menutupi kewajiban jangka pendeknya yaitu sebesar 7.07 kali. Kemudian disusul oleh perusahaan dengan kode saham LPKR yaitu sebesar 6.97 kali. Kode saham INTP sebesar 5.53 kali, kode saham INCO sebesar 4.39 kali, kode saham SCMA sebesar 4.08 kali, kode saham KLBF sebesar 3.45 kali, kode saham BSDE sebesar 2.98 kali, PGAS sebesar 2.60 kali, kode saham ICBP sebesar 2.32 kali, kode saham ADRO sebesar 2.10 kali, kode saham LSIP sebesar 2.02 kali, kode saham UNTR sebesar 1.90 kali, kode saham ITMG sebesar 1.88 kali, kode saham SMGR sebesar 1.81 kali, kode saham SMRA sebesar 1.63 kali, kode saham INDF sebesar 1.60 kali, kode saham PTPP sebesar 1.55 kali, kode saham SILO sebesar 1.50 kali, kode saham AKRA sebesar 1.41 kali, kode saham PWON sebesar 1.39 kali, kode saham WSKT sebesar 1.37 kali, kode saham TLKM sebesar 1.34 kali, MPPA sebesar 1.31 kali, kode saham ASII sebesar 1.30 kali.

Disamping itu terdapat pula 5 perusahaan yang memiliki angka rasio kurang dari 1 atau 100%, hal ini menunjukkan bahwa aktiva lancar menutupi kewajiban jangka pendek berada dibawah angka aman dan kemungkinan akan mengalami kesulitan dalam membayar tagihan jangka pendeknya, secara keseluruhan juga menunjukkan bahwa pada aktiva lancar memiliki angka yang lebih kecil dari utang lancar. Namun secara keseluruhan 10 perusahaan ini masih memiliki rasio yang lumayan baik

walaupun di bawah angka aman. Perusahaan dengan kode saham AALI memiliki angka rasio terkecil yaitu sebesar 0.45 kali, disusul oleh kode saham JSMR sebesar 0.68 kali, kode saham LPPF dan UNVR sebesar 0.79 kali, kode saham ASRI sebesar 0.89 kali.

2) Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling likuid mampu menutupi utang lancar. Semakin besar rasio ini semakin baik. Angka rasio ini tidak harus 100% atau 1 : 1. Berdasarkan perhitungan rasio lancar menunjukkan bahwa terdapat 21 perusahaan-perusahaan Jakarta Islamic Index (JII) yang memiliki rasio lebih dari 100% atau 1, yakni dengan kode saham: ADRO, AKRA, ASII, BSDE, INCO, INDF, INTG, ITMG, KLBF, LPKR, LSIP, PGAS, PTPP, SCMA, SILO, SMGR, SSMS, TLKM, UNTR, WIKA dan WSKT. Rasio cepat yang memiliki angka tertinggi yaitu perusahaan dengan kode saham SSMS yaitu sebesar 6.41 kali. Kemudian disusul oleh perusahaan dengan kode saham INTG yaitu memiliki rasio cepat sebesar 4.72 kali, perusahaan dengan kode saham INCO sebesar 3.57 kali, perusahaan dengan kode saham SCMA sebesar 3.44 kali, kode saham LPKR sebesar 2.86 kali, kode saham PGAS sebesar 2.52 kali, kode saham KLBF sebesar 2.23 kali, kode saham ADRO sebesar 1.98 kali, kode saham BSDE sebesar 1.96 kali, kode saham UNTR sebesar 1.54 kali, kode saham ITMG sebesar 1.46 kali, kode saham SILO dan TLKM sebesar 1.32 kali, kode saham SMGR dan WSKT sebesar 1.29 kali, kode saham LSIP dan PTPP sebesar 1.28 kali, kode saham INDF

sebesar 1.27 kali, kode saham AKRA sebesar 1.23 kali, kode saham ASII sebesar 1.08 kali, dan kode saham WIKA sebesar 1.02 kali. Berdasarkan rekapitulasi data penulis juga menemukan perusahaan-perusahaan yang memiliki rasio cepat dibawah 100% atau 1:1, walaupun pada rasio cepat ini tidak harus memiliki 100% atau 1:1, namun perusahaan dengan rasio 1 dapat dikatakan perusahaan yang memiliki rasio aman dan jika kurang dari angka aman tersebut perusahaan tidak dapat menutupi hutang lancar dengan segera jika terjadi kebangkrutan. Perusahaan-perusahaan yang memiliki rasio cepat terendah adalah perusahaan dengan kode saham ICBP sebesar 0.20 kali, perusahaan dengan kode saham MPPA sebesar 0.27 kali, perusahaan dengan kode saham ASRI sebesar 0.39 kali, perusahaan dengan kode saham LPPF sebesar 0.40 kali, perusahaan dengan kode saham SMRA sebesar 0.50 kali, perusahaan dengan kode saham UNVR sebesar 0.53 kali, perusahaan dengan kode saham JSMR sebesar 0.68 kali, perusahaan dengan kode saham PWON sebesar 0.91 kali.

3) Rasio Kas atas Aktiva Lancar

Rasio ini menunjukkan porsi jumlah kas dibandingkan dengan total aktiva lancar. Dari 30 perusahaan seluruhnya memiliki rasio kurang dari 100% yaitu maksimalnya adalah 90%. Adapun perusahaan yang memiliki rasio terbesar adalah perusahaan dengan kode saham JSMR yakni dengan rasio sebesar 90%, disusul oleh perusahaan dengan kode saham WSKT yakni dengan rasio sebesar 36%, perusahaan dengan kode saham ADRO yakni dengan rasio sebesar 63%, perusahaan dengan kode saham PGAS yakni

dengan rasio sebesar 61%, perusahaan dengan kode saham TLKM yakni dengan rasio sebesar 58%, perusahaan dengan kode saham INTP yakni dengan rasio sebesar 57%, perusahaan dengan kode saham ITMG yakni dengan rasio sebesar 54%, perusahaan dengan kode saham INCO yakni dengan rasio sebesar 52%, perusahaan dengan kode saham LSIP yakni dengan rasio sebesar 47%, perusahaan dengan kode saham PWON dan ICBP yakni dengan rasio sebesar 45%, perusahaan dengan kode saham SSMS yakni dengan rasio sebesar 44%, perusahaan dengan kode saham BSDE yakni dengan rasio sebesar 39%, perusahaan dengan kode saham UNTR yakni dengan rasio sebesar 38%, perusahaan dengan kode saham SCMA yakni dengan rasio sebesar 37%, perusahaan dengan kode saham LPPF yakni dengan rasio sebesar 33%, perusahaan dengan kode saham INDF yakni dengan rasio sebesar 27%, perusahaan dengan kode saham SMGR yakni dengan rasio sebesar 26%, perusahaan dengan kode saham KLBF yakni dengan rasio sebesar 25%, perusahaan dengan kode saham ASII yakni dengan rasio sebesar 23%, perusahaan dengan kode saham SILO yakni dengan rasio sebesar 19%, perusahaan dengan kode saham AALI dan AKRA yakni dengan rasio sebesar 17%, perusahaan dengan kode saham SMRA yakni dengan rasio sebesar 14,5, perusahaan dengan kode saham PTPP yakni dengan rasio sebesar 12%, perusahaan dengan kode saham UNVR dan WIKA yakni dengan rasio sebesar 11%, perusahaan dengan kode saham ASRI yakni dengan rasio sebesar 10%, perusahaan dengan kode saham LPKR yakni dengan rasio sebesar 5%, dan

rasio yang memiliki angka terendah adalah perusahaan dengan kode saham MPPA yakni dengan rasio sebesar 4%.

4) Rasio Kas Atas Utang Lancar

Rasio ini menunjukkan porsi kas yang dapat menutupi utang lancar. Dari 30 perusahaan terdapat 9 perusahaan yang memiliki rasio diatas 100% yaitu: perusahaan dengan kode saham INTP yakni dengan rasio sebesar 315%, perusahaan dengan kode saham SSMS dengan rasio sebesar 313%, perusahaan dengan kode saham INCO yakni dengan rasio sebesar 226%, perusahaan dengan kode saham PGAS yakni dengan rasio sebesar 158%, perusahaan dengan kode saham SCMA dengan rasio sebesar 149%, perusahaan dengan kode saham ADRO yakni sebesar 133%, perusahaan dengan kode saham BSDE dengan rasio sebesar 115%, perusahaan dengan kode saham ICBP yakni dengan rasio sebesar 104%, perusahaan dengan kode saham ITMG yakni dengan rasio sebesar 102%. Jika rasio kas atas utang lancar semakin besar, ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kemampuan yang benar-benar siap untuk digunakan untuk membayar utangnya.

Adapun perusahaan yang memiliki rasio 100% kebawah adalah perusahaan dengan kode saham LSIP yakni dengan rasio sebesar 94%, perusahaan dengan kode saham KLBF yakni dengan rasio sebesar 86%, disusul oleh perusahaan dengan kode saham TLKM yakni dengan rasio sebesar 77%, perusahaan dengan kode saham UNTR yakni dengan rasio sebesar 72%,

perusahaan dengan kode saham PWON yakni dengan rasio sebesar 63%, perusahaan dengan kode saham JSMR yakni dengan rasio sebesar 61%, perusahaan dengan kode saham WSKT yakni dengan rasio sebesar 50%, perusahaan dengan kode saham SMGR yakni dengan rasio sebesar 47%, perusahaan dengan kode saham INDF yakni dengan rasio sebesar 43%, perusahaan dengan kode saham LPKR yakni dengan rasio sebesar 34%, perusahaan dengan kode saham ASII yakni dengan rasio sebesar 30%, perusahaan dengan kode saham SILO yakni dengan rasio sebesar 29%, perusahaan dengan kode saham LPPF yakni dengan rasio sebesar 26%, perusahaan dengan kode saham AKRA yakni dengan rasio sebesar 24%, perusahaan dengan kode saham SMRA yakni dengan rasio sebesar 23%, perusahaan dengan kode saham PTPP yakni dengan rasio sebesar 18%, perusahaan dengan kode saham WIKA yakni dengan rasio sebesar 13%, perusahaan dengan kode saham UNVR dan ASRI yakni dengan rasio sebesar 9%, perusahaan dengan kode saham AALI yakni dengan rasio sebesar 8%, dan perusahaan yang memiliki rasio terendah adalah perusahaan dengan kode saham MPPA yakni dengan rasio sebesar 6%.

5) Rasio Aktiva Lancar dan Total Aktiva

Rasio ini menunjukkan porsi aktiva lancar atas total aktiva. Dari 30 perusahaan, rasio tertinggi diperoleh perusahaan dengan kode saham PTPP yakni dengan rasio sebesar 91%, disusul oleh perusahaan dengan kode saham LPKR yakni dengan rasio sebesar 79%, perusahaan dengan kode saham SCMA yakni dengan rasio sebesar 66%, perusahaan dengan kode

saham MPPA yakni dengan rasio sebesar 65%, perusahaan dengan kode saham KLBF yakni dengan rasio sebesar 64%, perusahaan dengan kode saham UNTR yakni dengan rasio sebesar 59%, perusahaan dengan kode saham LPPF yakni dengan rasio sebesar 56%, perusahaan dengan kode saham AKRA yakni dengan rasio sebesar 52%, perusahaan dengan kode saham BSDE dan ITMG yakni dengan rasio sebesar 49%, perusahaan dengan kode saham INDF yakni dengan rasio sebesar 47%, perusahaan dengan kode saham UNVR yakni dengan rasio sebesar 46%, perusahaan dengan kode saham INTTP yakni dengan rasio sebesar 44%, perusahaan dengan kode saham ASII yakni dengan rasio sebesar 42%, perusahaan dengan kode saham SMRA yakni dengan rasio sebesar 38%, perusahaan dengan kode saham SSMS yakni dengan rasio sebesar 35%, perusahaan dengan kode saham WSKT yakni dengan rasio sebesar 32%, perusahaan dengan kode saham SILO dan PWON yakni dengan rasio sebesar 31%, perusahaan dengan kode saham TLKM yakni dengan rasio sebesar 29%, perusahaan dengan kode saham SMGR yakni dengan rasio sebesar 28%, perusahaan dengan kode saham INCO yakni dengan rasio sebesar 27%, perusahaan dengan kode saham PGAS yakni dengan rasio sebesar 25%, perusahaan dengan kode saham ADRO yakni dengan rasio sebesar 20%, perusahaan dengan kode saham LSIP yakni dengan rasio sebesar 15%, perusahaan dengan kode saham ICBP dan ASRI yakni dengan rasio sebesar 14%, perusahaan dengan kode saham AALI yakni dengan rasio sebesar 12%, perusahaan dengan kode perusahaan JSMR yakni dengan

rasio sebesar 8%, perusahaan dengan kode saham WIKA yakni dengan rasio sebesar 5%.

6) Rasio Aktiva Lancar dan Total Utang

Rasio ini menunjukkan porsi aktiva lancar atas total kewajiban perusahaan. Dari 30 perusahaan, rasio tertinggi diperoleh perusahaan dengan kode saham KLBF yakni dengan rasio sebesar 2793%, kemudian disusul oleh perusahaan dengan kode saham MPPA yakni dengan rasio sebesar 1448%, perusahaan dengan kode saham ITMG yakni dengan rasio sebesar 1106%, perusahaan dengan kode saham INTP yakni dengan rasio sebesar 1069%, perusahaan dengan kode saham SCMA yakni rasio sebesar 993%, perusahaan dengan kode saham WSKT yakni dengan rasio sebesar 786%, perusahaan dengan kode saham UNVR yakni dengan rasio sebesar 896%, perusahaan dengan kode saham UNTR yakni dengan rasio sebesar 656%, perusahaan dengan kode saham LPPF yakni dengan rasio sebesar 560%, perusahaan dengan kode saham PTPP yakni dengan rasio sebesar 486%, perusahaan dengan kode saham WIKA yakni dengan rasio sebesar 351%, perusahaan dengan kode saham AKRA yakni dengan rasio sebesar 279%, perusahaan dengan kode saham SMGR yakni dengan rasio sebesar 239%, perusahaan dengan kode saham ASII yakni dengan rasio sebesar 225%, perusahaan dengan kode saham BSDE yakni dengan rasio sebesar 214%, perusahaan dengan kode saham INCO yakni dengan rasio sebesar 202%, perusahaan dengan kode saham INDF yakni dengan rasio sebesar 188%, perusahaan dengan kode saham LPKR yakni dengan rasio

sebesar 186%, perusahaan dengan kode saham SILO yakni dengan rasio sebesar 136%, perusahaan dengan kode saham LSIP yakni dengan rasio sebesar 127%, perusahaan dengan kode saham TLKM yakni dengan rasio sebesar 122%, perusahaan dengan kode saham SMRA yakni dengan rasio sebesar 104%, perusahaan dengan kode saham PWON yakni dengan rasio sebesar 99%, perusahaan dengan kode saham ICBP yakni dengan rasio sebesar 83%, perusahaan dengan kode saham SSMS yakni dengan rasio sebesar 74%, perusahaan dengan kode saham AALI yakni dengan rasio sebesar 63%, perusahaan dengan kode saham PGAS yakni dengan rasio sebesar 58%, perusahaan dengan kode saham ADRO yakni dengan rasio sebesar 56%, perusahaan dengan kode saham ASRI yakni dengan rasio sebesar 28%, dan perusahaan dengan kode saham JSMR yakni dengan rasio sebesar 16%.

Rasio likuiditas yang baik menurut kriteria perusahaan yang listing pada Jakarta Islamic Index (JII) kewajiban-kewajiban terhadap aktiva lancar maksimumnya adalah 90%. Jika demikian perusahaan dengan rasio sangat besar tersebut secara keseluruhan bukan menjadi acuan bahwa jika rasio semakin besar maka semakin baik karena batas maksimum hanyalah 90%. Hal ini disebabkan jika kondisi rasio yang terlalu tinggi dikhawatirkan ada dana yang menganggur atau yang tidak atau bahkan belum digunakan secara optimal, maka sesuai dengan kriteria Jakarta Islamic Index (JII) alangkah baiknya kewajiban-kewajiban terhadap aktiva lancar tidak melebihi 90% tersebut.

b. Rasio Aktivitas Perusahaan-perusahaan pada Jakarta Islamic Index (JII) periode Juni-November 2015

1) *Inventory Turn Over*

Rasio ini menunjukkan berapa cepat perputaran persediaan dalam siklus produksi normal. Semakin besar rasio ini semakin baik karena dianggap bahwa kegiatan penjualan berjalan cepat. Perusahaan yang mewakili dengan rasio terbesar yaitu: perusahaan dengan kode saham TLKM yakni dengan rasio sebesar 109.7 kali, kemudian disusul oleh perusahaan dengan kode saham PGAS yakni sebesar 44.4 kali, perusahaan dengan kode saham ADRO sebesar 29.4 kali, perusahaan dengan kode saham SILO yakni dengan rasio sebesar 24.9 kali, perusahaan dengan kode saham AKRA yakni dengan rasio sebesar 14.9 kali, perusahaan dengan kode saham UNVR yakni dengan rasio sebesar 11.5 kali, perusahaan dengan kode saham ICBP yakni dengan rasio sebesar 9.4 kali, perusahaan dengan kode saham SSMS yakni dengan rasio sebesar 8.9 kali, perusahaan dengan kode saham ITMG yakni dengan rasio sebesar 8.5 kali, perusahaan dengan kode saham ASII yakni dengan rasio sebesar 7.8 kali, perusahaan dengan kode saham INTG yakni dengan rasio sebesar 7.7 kali, perusahaan dengan kode saham WIKA yakni dengan rasio sebesar 7.5 kali, perusahaan dengan kode saham WSKT yakni dengan rasio sebesar 7.4 kali, perusahaan dengan kode saham AALI yakni dengan rasio sebesar 7.3 kali, perusahaan dengan kode saham LPPF yakni dengan rasio sebesar 6.8 kali, perusahaan dengan kode saham SMGR yakni dengan rasio sebesar 6.4

kali, perusahaan dengan kode saham LSIP dan SCMA yakni dengan rasio sebesar 6.3 kali, perusahaan dengan kode saham INDF yakni dengan rasio sebesar 5.4 kali, perusahaan dengan kode saham INCO yakni dengan rasio sebesar 5.3 kali, perusahaan dengan kode saham UNTR yakni dengan rasio sebesar 4.9 kali, perusahaan dengan kode saham KLBF yakni dengan rasio sebesar 4.3 kali, perusahaan dengan kode saham PTPP yakni dengan rasio sebesar 3.4 kali, perusahaan dengan kode saham MPPA yakni dengan rasio sebesar 3.3 kali, perusahaan dengan kode saham PWON yakni dengan rasio sebesar 1.8 kali, perusahaan dengan kode saham ASRI yakni dengan rasio sebesar 1.7 kali, perusahaan dengan kode saham SMRA yakni dengan rasio sebesar 1.0 kali, perusahaan dengan kode saham BSDE yakni dengan rasio sebesar 0.8 kali, perusahaan dengan kode saham LPKR yakni dengan rasio sebesar 0.3 kali.

Disamping ada pula perusahaan yang memiliki rasio terendah yakni dengan rasio dibawah angka 1 yaitu: perusahaan dengan kode saham LPKR yakni dengan rasio sebesar 0.3 kali, perusahaan dengan kode saham BSDE yakni dengan kode saham sebesar 0.8 kali.

2) *Receivable Turn Over*

Rasio ini menunjukkan berapa cepat penagihan piutang. Semakin besar semakin baik karena penagihan piutang dilakukan dengan cepat. Perusahaan yang memiliki rasio terbesar adalah perusahaan dengan kode saham LPPF yakni dengan rasio sebesar 124.1 kali, kemudian disusul oleh perusahaan dengan kode saham JSMR yakni dengan rasio sebesar 30 kali,

perusahaan dengan kode saham MPPA yakni dengan rasio sebesar 20.3 kali, perusahaan dengan kode saham ASRI yakni dengan rasio sebesar 18,3 kali perusahaan dengan kode saham LSIP yakni dengan rasio sebesar 15.3 kali, perusahaan dengan kode saham AALI yakni dengan rasio sebesar 14.1 kali, perusahaan dengan kode saham BSDE yakni dengan rasio sebesar 14 kali, perusahaan dengan kode saham SMRA yakni dengan rasio sebesar 9.1 kali, perusahaan dengan kode saham ITMG yakni dengan rasio sebesar 8.8 kali, perusahaan dengan kode saham SSMS yakni dengan rasio sebesar 8.4 kali, perusahaan dengan kode saham INCO yakni dengan rasio sebesar 7.9 kali, perusahaan dengan kode saham ADRO, PWON dan TLKM yakni dengan rasio sebesar 7.7 kali, perusahaan dengan kode saham INDF yakni dengan rasio sebesar 7.4 kali, perusahaan dengan kode saham UNVR yakni dengan rasio sebesar 6.7 kali, perusahaan dengan kode saham ICBP yakni dengan rasio sebesar 5.6 kali, perusahaan dengan kode saham SILO yakni dengan rasio sebesar 5.3 kali, perusahaan dengan kode saham SMGR dan LPKR yakni dengan rasio sebesar 5 kali, perusahaan dengan kode saham KLBF yakni dengan rasio sebesar 4.8 kali, perusahaan dengan kode saham INTP yakni dengan rasio sebesar 4.7 kali, perusahaan dengan kode saham PGAS yakni dengan rasio sebesar 3.7 kali, perusahaan dengan kode saham AKRA yakni dengan rasio sebesar 3.6 kali, perusahaan dengan kode saham UNTR yakni dengan rasio sebesar 2.7 kali, perusahaan dengan kode saham SCMA dan WIKA yakni dengan rasio sebesar 2.3 kali, perusahaan dengan kode saham PTPP yakni dengan

rasio sebesar 2.1 kali, perusahaan dengan kode saham WSKT yakni dengan rasio sebesar 1.6 kali, perusahaan dengan kode saham ASII yakni dengan rasio sebesar 1.5 kali.

3) *Fixed Aset Turn Over*

Rasio ini menunjukkan berapa kali nilai aktiva berputar bila diukur dari volume penjualan. Semakin tinggi rasio ini semakin baik. Artinya kemampuan aktiva tetap menciptakan penjualan tinggi. Dalam Hal ini terdapat satu perusahaan yang memiliki rasio yang jauh sangat besar dibandingkan rasio perusahaan lain, yaitu perusahaan dengan kode saham SMGR dengan rasio yakni sebesar 817.6 kali. Perusahaan dengan kode SMGR memiliki aktiva tetap yang rendah yakni Rp. 23.379.558.811 sedangkan penjualannya lumayan tinggi yakni Rp. 19.114.609.462.000. Disusul oleh perusahaan dengan kode saham SMRA yakni dengan rasio sebesar 10.9 kali, perusahaan dengan kode saham PTPP yakni dengan rasio sebesar 10.8 kali, perusahaan dengan kode saham JSMR yakni dengan rasio sebesar 8.3 kali, perusahaan dengan kode saham LPPF yakni dengan rasio sebesar 7.8 kali, perusahaan dengan kode saham MPPA dengan rasio sebesar 7.6 kali, perusahaan dengan kode saham BSDE yakni dengan rasio sebesar 6.1 kali, perusahaan dengan kode saham WSKT yakni dengan rasio sebesar 6 kali, perusahaan dengan kode saham ITMG yakni dengan rasio sebesar 4.6 kali, perusahaan dengan kode saham ICBP yakni dengan rasio sebesar 3.9 kali, perusahaan dengan kode saham UNVR dan KLBF yakni dengan rasio sebesar 3.5 kali, perusahaan dengan

kode saham SCMA yakni dengan rasio sebesar 3.4 kali, perusahaan dengan kode saham ASII yakni dengan rasio sebesar 3.3 kali, perusahaan dengan kode saham AKRA yakni dengan rasio sebesar 3.2 kali, perusahaan dengan kode saham sebesar UNTR yakni dengan rasio sebesar 2.8 kali, perusahaan dengan kode saham WIKA yakni dengan rasio sebesar 2.7 kali, perusahaan dengan kode saham PWON yakni dengan rasio sebesar 2.6 kali, perusahaan dengan kode saham LPKR yakni dengan rasio sebesar 2.1 kali, perusahaan dengan kode saham ASRI dan INDF yakni dengan rasio sebesar 2 kali, perusahaan dengan kode saham SILO yakni dengan rasio sebesar 1.9 kali, perusahaan dengan kode saham ADRO yakni dengan rasio sebesar 1.4 kali, perusahaan dengan kode saham AALI, PGAS, dan SSMS yakni dengan rasio sebesar 1.1 kali, perusahaan dengan kode saham INTP yakni dengan rasio sebesar 1.0 kali, perusahaan dengan kode saham LSIP yakni dengan rasio sebesar 0.9 kali, perusahaan dengan kode saham TLKM yakni dengan rasio sebesar 0.8 kali, perusahaan dengan kode saham INCO yakni dengan rasio sebesar 0.4 kali.

4) *Total Aset Turn Over*

Rasio ini menunjukkan perputaran total aktiva diukur dari volume penjualan dengan kata lain seberapa jauh kemampuan semua aktiva menciptakan penjualan tinggi. Perusahaan yang mewakili dengan rasio terbesar yaitu: perusahaan dengan kode saham LPPF yakni dengan rasio sebesar 189%, kemudian disusul oleh perusahaan dengan kode saham

UNVR yakni dengan rasio sebesar 172%, perusahaan dengan kode saham MPPA yakni dengan rasio sebesar 168%, perusahaan dengan kode saham SILO yakni dengan rasio sebesar 100%, perusahaan dengan saham KLBF yakni dengan rasio sebesar 99%, perusahaan dengan kode saham AKRA yakni dengan rasio sebesar ITMG dan ICBP yakni dengan rasio sebesar 93%, perusahaan dengan kode saham SCMA yakni dengan rasio sebesar 65%, perusahaan dengan kode saham PTPP yakni dengan rasio sebesar 55% perusahaan dengan kode saham ASII dan UNTR yakni dengan rasio sebesar 54%, perusahaan dengan kode saham SMGR yakni dengan rasio sebesar 53%, perusahaan dengan kode saham INDF yakni dengan rasio sebesar 52%, perusahaan dengan kode saham INTP yakni dengan rasio sebesar 50%, perusahaan dengan kode saham AALI yakni dengan rasio sebesar 49%, perusahaan dengan kode saham TLKM yakni dengan rasio sebesar 48%, perusahaan dengan kode saham WIKA yakni dengan rasio sebesar 45%, perusahaan dengan kode saham LSIP dan PGAS yakni dengan rasio sebesar 35%, perusahaan dengan kode saham ADRO yakni dengan rasio sebesar 34%, perusahaan dengan kode saham WSKT yakni dengan rasio sebesar 32%, perusahaan dengan kode saham SSMS yakni dengan rasio sebesar 29%, perusahaan dengan kode saham INCO yakni dengan rasio sebesar 27%, perusahaan dengan kode saham SMRA yakni dengan rasio sebesar 25%, perusahaan dengan kode saham JSMR dan PWON yakni dengan rasio sebesar 19%, perusahaan dengan kode saham

LPKR yakni dengan rasio sebesar 16%, perusahaan dengan kode saham BSDE dan ASRI yakni dengan rasio sebesar 13%.

c. Rasio Rentabilitas Perusahaan-perusahaan pada Jakarta Islamic Index (JII) periode Juni-November 2015

1) Margin Laba

Angka ini menunjukkan berapa besar persentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap jualan. Semakin besar rasio ini semakin baik karena dianggap kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba cukup tinggi. Dari 30 perusahaan pada Jakarta Islamic Index (JII) perusahaan yang memiliki rasio margin laba terbesar adalah perusahaan dengan kode saham ASRI yakni dengan rasio sebesar 77%, disusul oleh perusahaan dengan kode saham BSDE yakni dengan rasio sebesar 75%, perusahaan dengan kode saham LPPF yakni dengan rasio sebesar 63%, perusahaan dengan kode saham PWON yakni dengan rasio sebesar 59%, perusahaan dengan kode saham PGAS yakni dengan rasio sebesar 56%, perusahaan dengan kode saham SMRA yakni dengan rasio sebesar 52%, perusahaan dengan kode saham SSMS dan UNVR yakni dengan rasio sebesar 51%, perusahaan dengan kode saham KLBF yakni dengan rasio sebesar 49%, perusahaan dengan kode saham LPKR dan SCMA yakni dengan rasio sebesar 46%, perusahaan dengan kode saham INTP yakni dengan rasio sebesar 45%, perusahaan dengan kode saham SMGR yakni dengan rasio sebesar 39%, perusahaan dengan kode saham JSMR yakni dengan rasio

sebesar 33%, perusahaan dengan kode saham ICBP yakni dengan rasio sebesar 31%, perusahaan dengan kode saham TLKM yakni dengan rasio sebesar 30%, perusahaan dengan kode saham LSIP yakni dengan rasio sebesar 29%, perusahaan dengan kode saham SILO yakni dengan rasio sebesar 28%, perusahaan dengan kode saham INDF yakni dengan rasio sebesar 27%, perusahaan dengan kode saham UNTR yakni dengan rasio sebesar 23%, perusahaan dengan kode saham AALI yakni dengan rasio sebesar 22%, perusahaan dengan kode saham ADRO yakni dengan rasio sebesar 21%, perusahaan dengan kode saham ASII yakni dengan rasio sebesar 20%, perusahaan dengan kode saham INCO yakni dengan rasio sebesar 19%, perusahaan dengan kode saham MPPA yakni dengan rasio sebesar 17%, perusahaan dengan kode saham PTPP yakni dengan rasio sebesar 13%, perusahaan dengan kode saham WIKA dan WSKT yakni dengan rasio sebesar 12%, perusahaan dengan kode saham AKRA yakni dengan rasio sebesar 11%, perusahaan dengan kode saham ITMG yakni dengan rasio sebesar -19%.

Perusahaan dengan kode saham ITMG memiliki angka rasio min (-) dan merupakan rasio terendah dari 29 perusahaan, hal ini menunjukkan bahwa persentase pendapatan bersih yang diperoleh dari setiap jualan sangatlah rendah. Adapun penyebab nya tidak lain adalah tingkat penjualan yang sangat rendah sehingga pengeluaran lebih besar dari pada pendapatan. Jika melihat dari bidang usaha perusahaan, perusahaan dengan kode saham ITMG tersebut bergerak dibidang pertambangan, dan diketahui pula

bahwa pertambangan untuk beberapa daerah di Indonesia saat ini menghadapi beberapa kelesuan untuk menghasilkan hasil tambang melihat kondisi alam di beberapa daerah tersebut yang tidak memungkinkan.

2) *Net Profit Margin*

Rasio ini menunjukkan seberapa besar tingkat keberhasilan perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan. Dari 30 perusahaan pada Jakarta Islamic Index (JII) perusahaan yang memiliki rasio *net profit margin* terbesar adalah perusahaan dengan kode saham BSDE yakni dengan rasio sebesar 41%, kemudian disusul oleh perusahaan dengan kode saham SCMA dengan rasio sebesar 36%, perusahaan dengan kode saham PWON yakni dengan rasio sebesar 35%, perusahaan dengan kode saham INTP yakni dengan rasio sebesar 25%, perusahaan dengan kode saham TLKM yakni dengan rasio sebesar 23%, perusahaan dengan kode saham SMRA yakni dengan rasio sebesar 22%, perusahaan dengan kode saham SSMS yakni dengan rasio sebesar 21%, perusahaan dengan kode saham LPPF yakni dengan rasio sebesar 20%, perusahaan dengan kode saham SMGR yakni dengan rasio sebesar 17%, perusahaan dengan kode saham LSIP dan UNVR yakni dengan rasio sebesar 15%, perusahaan dengan kode saham UNTR dan PGAS yakni dengan rasio sebesar 14%, perusahaan dengan kode saham JSMR yakni dengan rasio sebesar 13%, perusahaan dengan kode saham KLBF yakni dengan rasio sebesar 12%, perusahaan dengan kode saham ASII yakni dengan rasio sebesar 11%, perusahaan dengan kode saham ICBP yakni dengan rasio sebesar 10%, perusahaan dengan

kode saham ADRO yakni dengan rasio sebesar 9%, perusahaan dengan kode saham INCO yakni dengan rasio sebesar 8%, perusahaan dengan kode saham ASRI, ITMG dan LPKR yakni dengan rasio sebesar 7%, perusahaan dengan kode saham AKRA yakni dengan rasio sebesar 6%, perusahaan dengan kode saham WSKT, WIKA, dan PTPP yakni dengan rasio sebesar 5%, perusahaan dengan kode saham INDF yakni dengan rasio sebesar 4%, perusahaan dengan kode saham MPPA, SILO, dan AALI yakni dengan rasio sebesar 2%.

3) *Asset Turn Over*

Rasio ini menggambarkan perputaran aktiva diukur dari volume penjualan. Semakin besar rasio ini semakin baik. Hal ini berarti bahwa aktiva dapat lebih cepat berputar dan meraih laba. Dari 30 perusahaan pada Jakarta Islamic Index (JII) perusahaan yang memiliki rasio *asset turn over* terbesar adalah perusahaan dengan kode saham LPPF yakni dengan rasio sebesar 1.9 kali, kemudian disusul oleh perusahaan dengan kode saham UNVR dan MPPA yakni dengan rasio sebesar 1.7 kali, perusahaan dengan kode saham SILO dan KLBF yakni dengan rasio sebesar 1.0 kali, perusahaan dengan kode saham AKRA, ITMG, dan ICBP yakni dengan rasio sebesar 0.9 kali, perusahaan dengan kode saham SCMA dan PTPP yakni dengan rasio sebesar 0.6 kali, perusahaan dengan kode saham ASII, UNTR, SMGR, INDF, INTP, AALI, TLKM, dan WIKA yakni dengan rasio sebesar 0.5 kali, perusahaan dengan kode saham LSIP, PGAS, ADRO, WSKT, SSMS dan INCO yakni dengan rasio sebesar 0.3 kali, perusahaan dengan

kode saham SMRA, JSMR, PWON, dan LPKR yakni dengan rasio sebesar 0.2 kali, perusahaan dengan kode saham BSDE dan ASRI yakni dengan rasio sebesar 0.1 kali.

4) *Return on Investment*

Rasio ini menunjukkan berapa persen diperoleh laba bersih bila diukur dari modal pemilik. Semakin besar semakin bagus. Dari 30 perusahaan pada Jakarta Islamic Index (JII) perusahaan yang memiliki rasio *return on investment* terbesar adalah perusahaan dengan kode saham LPPF yakni dengan rasio sebesar 38%, kemudian disusul oleh UNVR yakni dengan rasio sebesar 26%, perusahaan dengan kode saham SCMA yakni dengan rasio sebesar 23%, perusahaan dengan kode saham INTP dan KLBF yakni dengan rasio sebesar 12%, perusahaan dengan kode saham TLKM yakni dengan rasio sebesar 11%, perusahaan dengan kode saham ICBP dan SMGR yakni dengan rasio sebesar 9%, perusahaan dengan kode saham UNTR yakni dengan rasio sebesar 8%, perusahaan dengan kode saham PWON yakni dengan rasio sebesar 7%, perusahaan dengan kode saham ITMG, SSMS dan ASII yakni dengan rasio sebesar 6%, perusahaan dengan kode saham AKRA, SMRA, LSIP, BSDE dan PGAS yakni dengan rasio sebesar 5%, perusahaan dengan kode saham MPPA yakni dengan rasio sebesar 4%, perusahaan dengan kode saham ADRO, PTPP dan JSMR yakni dengan rasio sebesar 3%, perusahaan dengan kode saham WIKA, INCO, SILO, INDF dan WSKT yakni dengan rasio sebesar 2%,

perusahaan dengan kode saham LPKR, AALI dan ASRI yakni dengan rasio sebesar 1%.

5) *Return On Total Aset*

Rasio ini menunjukkan berapa besar laba bersih diperoleh perusahaan bila diukur dari nilai aktiva. Dari 30 perusahaan pada Jakarta Islamic Index (JII) perusahaan yang memiliki rasio *return on total asset* terbesar adalah perusahaan dengan kode saham LPPF yakni dengan rasio sebesar 200%, perusahaan dengan kode saham UNVR yakni dengan rasio sebesar 30%, perusahaan dengan kode saham TLKM yakni dengan rasio sebesar 20%, perusahaan dengan kode saham ICBP dan KLBF yakni dengan rasio sebesar 15%, perusahaan dengan kode saham INTP dan PWON yakni dengan rasio sebesar 14%, perusahaan dengan kode saham SMRA, UNTR, SSMS dan PTPP yakni dengan rasio sebesar 13%, perusahaan dengan kode saham AKRA, SMGR dan ASII yakni dengan rasio sebesar 12%, perusahaan dengan kode saham PGAS yakni dengan rasio sebesar 11%, perusahaan dengan kode saham ITMG, BSDE dan MPPA yakni dengan rasio sebesar 9%, perusahaan dengan kode saham WIKA yakni dengan rasio sebesar 8%, perusahaan dengan kode saham JSMR dan LSIP yakni dengan rasio sebesar 7%, perusahaan dengan kode saham ADRO, INDF, dan WSKT yakni dengan rasio sebesar 5%, perusahaan dengan kode saham SILO yakni dengan rasio sebesar 4%, perusahaan dengan kode saham INCO dan ASRI yakni dengan rasio sebesar 3%, perusahaan dengan kode saham LPKR dan AALI yakni dengan rasio sebesar 2%.

d. Rasio Solvabilitas Perusahaan-perusahaan pada Jakarta Islamic Index (JII) periode Juni-November 2015

1) Rasio Utang atas Modal

Rasio ini menggambarkan sampai sejauh mana modal pemilik dapat menutupi utang-utang kepada pihak luar. Dari 30 perusahaan terdapat 15 perusahaan yang memiliki rasio 100% keatas, adapun perusahaan-perusahaan tersebut yaitu perusahaan dengan kode saham LPPF yang memiliki rasio tertinggi yakni dengan rasio sebesar 421%, kemudian disusul oleh perusahaan dengan kode saham PTPP yakni dengan rasio sebesar 346%, perusahaan dengan kode saham WIKA yakni dengan rasio sebesar 246%, perusahaan dengan kode saham JSMR dengan kode saham 186%, perusahaan dengan kode saham ASRI yakni dengan rasio sebesar 181%, perusahaan dengan kode saham UNVR yakni dengan rasio sebesar 178%, perusahaan dengan kode saham WSKT yakni dengan rasio sebesar 177%, perusahaan dengan kode saham SMRA yakni dengan rasio sebesar 146%, perusahaan dengan kode saham AKRA yakni dengan rasio sebesar 126%, perusahaan dengan kode saham INDF yakni dengan rasio sebesar 121%, perusahaan dengan kode saham LPKR yakni dengan rasio sebesar 118%, perusahaan dengan kode saham MPPA yakni dengan rasio sebesar 117%, perusahaan dengan kode saham PGAS yakni dengan rasio sebesar 113%, perusahaan dengan kode saham SSMS yakni dengan rasio sebesar 110%, perusahaan dengan kode saham ASII yakni dengan rasio sebesar 102%. Bagi pemegang saham atau pihak perusahaan yakni manajemen

risiko, leverage rasio ini sebaiknya besar, hal ini dikarenakan adanya kesempatan perusahaan untuk mendapatkan laba yang besar. Namun bagi pihak bank (kreditur) semakin besar rasio ini, akan semakin tidak menguntungkan karena semakin besar risiko yang akan ditanggung. Adapun perusahaan dengan rasio terkecil adalah perusahaan dengan kode saham PWON yakni dengan rasio sebesar 0.001% hal ini tentu sangat rendah jika dibanding dengan 29 perusahaan lainnya.

Adapun untuk keamanan pihak luar rasio terbaik jika jumlah modal lebih besar dari jumlah utang atau minimal sama, dalam hal ini diperoleh 14 perusahaan yang memiliki total ekuitas yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah utang, secara keseluruhan perusahaan-perusahaan tersebut memiliki tingkat rasio kurang dari 100% dan lebih dari 10% , perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan dengan kode saham: AALI, ADRO, TLKM, SILO, UNTR, ICBP, BSDE, ITMG, SMGR, SCMA, KLBF, INCO, LSIP, dan INTP.

2) Rasio Utang atas Aktiva

Rasio ini menunjukkan sejauh mana utang dapat ditutupi oleh aktiva, lebih besar rasionya lebih aman (*solvable*). Dari 30 perusahaan diperoleh perusahaan yang memiliki rasio terbesar yaitu perusahaan dengan kode saham LPPF yakni dengan rasio sebesar 81%, kemudian disusul oleh perusahaan dengan kode saham PTPP yakni dengan rasio sebesar 78%, perusahaan dengan kode saham WIKA yakni dengan rasio sebesar 71%, perusahaan dengan kode saham JSMR yakni dengan rasio sebesar 65%,

perusahaan dengan kode saham ASRI, WSKT dan UNVR yakni dengan rasio sebesar 64%, perusahaan dengan kode saham SMRA yakni dengan rasio sebesar 59%, perusahaan dengan kode saham AKRA yakni dengan rasio sebesar 56%, perusahaan dengan kode saham INDF yakni dengan rasio sebesar 55%, perusahaan dengan kode saham LPKR dan MPPA yakni dengan rasio sebesar 54%, perusahaan dengan kode saham PGAS yakni dengan rasio sebesar 53%, perusahaan dengan kode saham SSMS yakni dengan rasio sebesar 52%, perusahaan dengan kode saham ASII yakni dengan rasio sebesar 50%, perusahaan dengan kode saham AALI yakni dengan rasio sebesar 47%, perusahaan dengan kode saham ADRO dan TLKM yakni dengan rasio sebesar 45%, perusahaan dengan kode saham SILO yakni dengan rasio sebesar 43%, perusahaan dengan kode saham UNTR dan ICBP yakni dengan rasio sebesar 40%, perusahaan dengan kode saham BSDE yakni dengan rasio sebesar 39%, perusahaan dengan kode saham ITMG yakni dengan rasio sebesar 30%, perusahaan dengan kode saham SMGR yakni dengan rasio sebesar 28%, perusahaan dengan kode saham SCMA yakni dengan rasio sebesar 23%, perusahaan dengan kode saham KLBF yakni dengan rasio sebesar 21%, perusahaan dengan kode saham INCO yakni dengan rasio sebesar 20%, perusahaan dengan kode saham LSIP yakni dengan rasio sebesar 19%, perusahaan dengan kode saham INTP yakni dengan rasio sebesar 12%.

Adapun perusahaan dengan rasio terkecil adalah perusahaan dengan kode saham PWON yakni dengan rasio sebesar 0.05% hal ini tentu sangat

rendah jika dibanding dengan 29 perusahaan lainnya. Jika dilihat dari berapa porsi utang dibanding dengan aktiva yakni supaya aman porsi utang terhadap aktiva harus lebih kecil, dalam hal ini seluruh perusahaan pada Jakarta Islamic Index (JII) yaitu terdiri dari 30 perusahaan memiliki porsi yang aman yakni porsi utang terhadap aktiva lebih kecil.

- e. Rasio Pasar Perusahaan-perusahaan pada Jakarta Islamic Index (JII) periode Juni-November 2015

1) *Price Earning Ratio* (PER)

Rasio ini menunjukkan perbandingan antara harga saham dipasar atau harga perdana yang ditawarkan dibandingkan dengan pendapatan yang diterima. PER yang tinggi menunjukkan ekspektasi investor tentang prestasi perusahaan di masa yang akan datang cukup tinggi. Dari 30 perusahaan diperoleh perusahaan yang memiliki rasio terbesar yaitu perusahaan dengan kode saham WSKT yakni dengan rasio sebesar 5,252.7 kali, kemudian disusul oleh perusahaan dengan kode saham BSDE yakni dengan rasio sebesar 1,428.6 kali, perusahaan dengan kode saham SILO yakni dengan rasio 211.6 kali, perusahaan dengan kode saham UNVR yakni dengan rasio sebesar 69.3 kali, perusahaan dengan kode saham LPKR yakni dengan rasio sebesar 58.6 kali, perusahaan dengan kode saham MPPA dan KLBF yakni dengan rasio sebesar 42 kali, perusahaan dengan kode saham SSMS yakni dengan rasio sebesar 41.1 kali, perusahaan dengan kode saham ASRI yakni dengan rasio sebesar 39.9 kali,

perusahaan dengan kode saham JSMR yakni dengan rasio sebesar 39.5 kali, perusahaan dengan kode saham PTPP yakni dengan rasio sebesar 37.3 kali, perusahaan dengan kode saham SCMA yakni dengan rasio sebesar 35.1 kali, perusahaan dengan kode saham LPPF dengan rasio sebesar 33.9 kali, perusahaan dengan kode saham ICBP yakni dengan rasio sebesar 31.1 kali, perusahaan dengan kode saham INDF yakni dengan rasio sebesar 28.7 kali, perusahaan dengan kode saham INCO yakni dengan rasio sebesar 28.6 kali, perusahaan dengan kode saham AKRA yakni dengan rasio sebesar 26.4 kali, perusahaan dengan kode saham LSIP yakni dengan rasio sebesar 20.1 kali, perusahaan dengan kode saham INTP yakni dengan rasio sebesar 18.8 kali, perusahaan dengan kode saham SMGR yakni dengan rasio sebesar 16.7 kali, perusahaan dengan kode saham SMRA yakni dengan rasio sebesar 16.6 kali, perusahaan dengan kode saham TLKM yakni dengan rasio sebesar 15.4 kali, perusahaan dengan kode saham ASII yakni dengan rasio sebesar 14.5 kali, perusahaan dengan kode saham AALI yakni dengan rasio sebesar 14.2 kali, perusahaan dengan kode saham PGAS yakni dengan rasio sebesar 13.7 kali, perusahaan dengan kode saham PWON yakni dengan rasio sebesar 12.6 kali, perusahaan dengan kode saham UNTR yakni dengan rasio sebesar 11.7 kali, perusahaan dengan kode saham ITMG yakni dengan rasio sebesar 9.2 kali, perusahaan dengan kode saham ADRO yakni dengan rasio sebesar 6.5 kali, perusahaan dengan kode saham WIKA yakni dengan rasio sebesar 3.8 kali.

2) *Market to Book Value Ratio*

Rasio ini menunjukkan perbandingan harga saham dipasar dengan nilai buku saham tersebut yang digambarkan di Neraca. Dari 30 perusahaan diperoleh perusahaan yang memiliki rasio terbesar yaitu perusahaan dengan kode saham WSKT yakni dengan rasio sebesar 249.1 kali, perusahaan dengan kode saham BSDE yakni dengan rasio sebesar 124.9 kali, perusahaan dengan kode saham LPPF yakni dengan rasio sebesar 67.9 kali, perusahaan dengan kode saham UNVR yakni dengan rasio sebesar 50.4 kali, perusahaan dengan kode saham SCMA yakni dengan rasio sebesar 10.5 kali, perusahaan dengan kode saham SILO yakni dengan rasio sebesar 8.4 kali, perusahaan dengan kode saham KLBF yakni dengan rasio sebesar 6.1 kali, perusahaan dengan kode saham SSMS yakni dengan rasio sebesar 5.3 kali, perusahaan dengan kode saham PTPP yakni dengan rasio sebesar 4.7 kali, perusahaan dengan kode saham ICBP yakni dengan rasio sebesar 4.6 kali, perusahaan dengan kode saham MPPA yakni dengan rasio sebesar 3.6 kali, perusahaan dengan kode saham AKRA yakni dengan rasio sebesar 3.3 kali, perusahaan dengan kode saham TLKM yakni dengan rasio sebesar 3.1 kali, perusahaan dengan kode saham JSMR yakni dengan rasio sebesar 2.8 kali, perusahaan dengan kode saham INTIP yakni dengan rasio sebesar 2.7 kali, perusahaan dengan kode saham SMRA yakni dengan rasio sebesar 2.2 kali, perusahaan dengan kode saham SMGR yakni dengan rasio sebesar 2.0 kali, perusahaan dengan kode saham PWON yakni dengan rasio sebesar 1.8 kali,

perusahaan dengan kode saham ASII yakni dengan rasio sebesar 1.7 kali, perusahaan dengan kode saham UNTR yakni dengan rasio sebesar 1.5 kali, perusahaan dengan kode saham PGAS dan LPKR yakni dengan rasio sebesar 1.4 kali, perusahaan dengan kode saham LSIP yakni dengan rasio sebesar 1.3 kali, perusahaan dengan kode saham INDF yakni dengan rasio sebesar 1.2 kali, perusahaan dengan kode saham ASRI yakni dengan rasio sebesar 1.0 kali, perusahaan dengan kode saham ITMG dan INCO yakni dengan rasio sebesar 0.8 kali, perusahaan dengan kode saham ADRO, WIKA dan AALI yakni dengan rasio sebesar 0.3 kali.

Jumlah populasi adalah 30 perusahaan, namun dalam analisa rasio *inventory turn over* dan rasio cepat hanya menganalisa 29 perusahaan, karena keterbatasan data yang didapat yakni data persediaan yang tidak ada di laporan neraca pada perusahaan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk. Dan setelah ditelaah kembali mengenai laporan keuangan tersebut, penulis menemukan indikasi bahwa pada perusahaan PT. Jasa Marga (Persero) Tbk memang tidak mencantumkan persediaan pada laporan neraca pada perusahaan disebabkan oleh Perusahaan Perseroan (Persero) tersebut berada pada wewenang pemerintah, adapun perusahaan bergerak di bidang pengelolaan, pemeliharaan dan pengadaan jaringan jalan tol. Hal ini pun sesuai dengan keterangan yang penulis dapat dari responden di Bursa Efek Indonesia KP Banjarmasin.

2. Analisis Konsep Dan Kebijakan Ekonomi Islam Terhadap Kinerja Perusahaan Yang Terdaftar Pada Jakarta Islamic Index (JII) di Bursa Efek Indonesia.

Meskipun instrumen pasar modal syariah masih dalam tahap pengembangan, dengan adanya index syariah ini yang merupakan index terakhir yang dikeluarkan Bursa Efek Indonesia setelah Index Individual, Index Harga Saham Sektoral, Index LQ 45 dan Indexs Harga Saham Gabungan (IHSG), ini menunjukkan bahwa praktik ekonomi Islam khususnya pasar modal syariah di Indonesia memiliki performa yang cukup menjanjikan. Dengan kata lain, peran ekonomi syariah tidak semata-mata terletak pada perubahan akadnya yang sesuai syariah, tetapi juga dalam aspek keuangan secara fundamental memiliki prospek yang baik karena perusahaan yang masuk pada Jakarta Islamic Index (JII) merupakan kumpulan saham yang likuid dan berdasarkan rata-rata kapitalisasi pasar terbesar selama satu tahun.

Dimana semuanya harus memenuhi kriteria-kriteria yang mengarah pada perwujudan tujuan syariah (*maqāṣid asy-syarī'ah*), yaitu: perlindungan agama (*dīn*), jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), harta (*māl*), keturunan (*naṣl*). Dalam hal ini produk/jasa yang dihasilkan perusahaan yang *listing* pada Jakarta Islamic Index (JII) dikategorikan halāl, Jakarta Islamic Index (JII) telah melakukan penyaringan terhadap perusahaan yang *listing*, unit usahanya merupakan usaha syariah, hasil usaha tidak mengandung unsur riba bukan suatu investasi yang mengandung *garar*, tidak menempatkan investor pada kondisi *garar* ataupun *maisīr*, perusahaan memberi informasi yang transparan dan memenuhi ketentuan, dimana hal-hal ini merupakan wujud dari kriteria-kriteria yang mengarah pada perwujudan syariah

(*maqāṣid asy-syarī'ah*) tersebut. Disamping itu, beberapa instrumen pada pasar modal syariah juga digunakan sebagai penopang kegiatan ekonomi Islam, yang mana *falāḥ* menjadi suatu tujuan dan hal tersebut dapat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan secara seimbang sehingga tercipta *maṣlahah*.

Moralitas Islam dapat membawa pada perwujudan *falāḥ*, hanya jika terdapat basis kebijakan yang mendukung, yang dimaksud dengan basis kebijakan disini ialah segala sesuatu yang akan menjadi persyaratan bagi implementasi ekonomi Islam, sebagai suatu keharusan dan mutlak harus diusahakan, sebab jika tidak maka akan mengganggu optimalitas dan efektivitas implementasi ekonomi Islam yaitu: (1) penghapusan riba (2) pelembagaan zakat (3) penghapusan yang haram dan, (4) pelarangan *garar*. Dalam hal ini, pasar modal syariah di Indonesia merupakan perwujudan dari implementasi penerapan ekonomi Islam, yakni dalam pasar modal syariah khususnya Jakarta Islamic Index (JII) akan terus ditinjau secara berkala berdasarkan kinerja transaksi perdagangan di bursa, rasio-rasio keuangan, dan ketaatan pada prinsip-prinsip syariahnya yang telah termaktub pada fatwa-fatwa DSN.

Jika demikian pasar modal syariah dan adanya Jakarta Islamic Index (JII) merupakan kebijakan yang mendukung dalam tujuan mencapai *falāḥ* yakni: penghapusan riba, penghapusan yang haram dan pelarangan *garar*. Dimana pada Jakarta Islamic Index (JII) tidak ada unsur riba karena akad-akad transaksi yang sesuai syariah, dan sesuai dengan dalil pelarangan riba secara tegas yang dapat

dijumpai dalam Al-qur'an, diantara ayat Al-qur'an yang melarang riba yaitu Allah berfirman dalam Q.S.al-Baqarah/2:275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ اللَّهِ ۗ
وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”

Kemudian usaha dan distribusi bukan dari non halal, karena pada perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index (JII) untuk masuk dalam daftar index tersebut sangat ketat dari sisi syariah yakni seperti produksi, distribusi dll, yang berdasarkan pada dalil pelarangan yang haram di dalam Al-qur'an diantara ayat Al-qur'an yang menjelaskan hal tersebut yaitu Allah berfirman dalam Q.S.al-Baqarah/2:168 dan.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

“Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.”

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah/2:172-173.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (١٧٢) إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ
الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْحَمَّ الْخَنِزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ (١٧٣)

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Begitu pula dari sisi investasi bukanlah spekulasi atau *garar*. Karena pemilik investasi selain berpartisipasi secara penuh dalam perusahaan dengan sistem bagi hasil dan risiko, pemegang saham juga dapat memperoleh likuiditas dengan menjual saham yang mereka miliki sesuai dengan sistem di bursa efek dan hal ini tentu sangat didukung oleh kebijakan Jakarta Islamic Index (JII) yang memiliki kriteria perusahaan likuid didalamnya. Adapun hadis yang melarang *garar* yakni:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual-beli al-ḥaṣāh dan jual-beli al-garar.

Namun demikian kebijakan pelebagaan zakat belumlah terdukung. Dalam hal ini, sebagai pasar modal syariah yang masuk di dalamnya adalah perusahaan *listing* dalam daftar efek syariah, akan sangat elok kiranya untuk menerapkan zakat ataupun infaq dan ṣadaqah yakni dengan adanya kebijakan tersebut yang termaktub di pelaporan keuangan berupa laporan neraca, dan dari 30 perusahaan Jakarta Islamic Index (JII) khususnya hal ini belumlah terlaksanakan, tidak lain hal ini karena pada umumnya perusahaan menggunakan penyajian akuntansi yang berbeda-beda yang bersifat umum, dan karena kebijakan, tujuan manajemen perusahaan yang berbeda-beda pula, maka untuk pengembangan pasar modal syariah sangat perlu adanya kerangka hukum untuk memfasilitasi pengembangan pasar modal syariah, yakni dengan adanya penyusunan standar akuntansi syariah untuk perusahaan efek yang *listing* pada daftar efek syariah yang di dalamnya mengharuskan pelaporan zakat, ataupun infaq dan ṣadaqah. Hal ini tidak lain adalah untuk tercapainya tujuan *falāḥ* dalam penerapan ekonomi Islam.

Pemerintah memiliki kedudukan dan peranan penting dalam ekonomi Islam. Eksistensi peran pemerintah dalam sistem ekonomi Islam bukan semata karena adanya kegagalan pasar. Pada dasarnya, peran pemerintah merupakan derivasi dari konsep kekhalifahan dan konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif (*fard al-kifāyah*) untuk merealisasikan *falāḥ*. Jika demikian maka, Dewan

Syariah Nasional dan Badan Pengawas Pasar Modal yang merupakan otoritas pemerintah yang berwenang harus memberikan perhatian besar kepada pasar modal syariah khususnya Jakarta Islamic Index (JII) karena instrumen pasar modal syariah merupakan potensi dan sekaligus tantangan pengembangan pasar modal di Indonesia. Maka dari itu pemerintah harus memiliki strategi untuk mencapai pengembangan pasar modal syariah yang tujuannya adalah *falāḥ* dan salah satunya adalah mengembangkan kerangka hukum untuk memfasilitasi jalannya pasar modal yang sesuai dengan konsep syariah.